



KILAS BALIK DEWAN KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2020 2021

TENTANG WANTANNAS

Dewan Ketahanan Nasional sesuai Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 adalah lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Memiliki tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

KILAS BALIK
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
2020-2021



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KILAS BALIK WANTANNAS 2020-2021

Pengarang :

**Harjo Susmoro
I Gusti Putu Wirajena
Abdul Cholik**

Editor :

**Dedy Purwadi
Dessy Fajar Nita
Nathalina Pakpahan
Yayat Ruhiat**

Desain Cover :

Novira Khairunisa

Cetakan I : Januari 2023

Penerbit :

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat
Telp : 021- 3451067
www.wantannas.go.id
setjen@wantannas.go.id

KATA PENGANTAR

Selama periode tahun 2020 sampai tahun 2021, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagai Lembaga yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia semakin menunjukkan eksistensinya.

Kiprah dan Peran Dewan Ketahanan Nasional dalam penguatan peran dalam pengambilan keputusan terkait masalah keamanan nasional yang bersifat krusial, mendesak dan strategis. Terlebih, persoalan ketahanan nasional dewasa ini bukan hanya ranah militer saja, namun juga menyangkut multidimensional dalam berbangsa dan bernegara. Apalagi tantangan keamanan yang dihadapi semakin kompleks, tidak lagi hanya menyangkut politik dan ideologi atau terorisme semata, tetap juga ketahanan ekonomi, ketahanan energi, lingkungan hidup dan keselamatan manusia.

Kiprah dan peran Dewan Ketahanan Nasional tersebut, dirangkai dalam sebuah buku Kilas Balik Dewan Ketahanan Nasional tahun 2020 – 2021. Buku Kilas Balik ini merupakan sebuah rangkaian publikasi kegiatan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kilas balik pelaksanaan tugas Setjen Wantannas selama 2 tahun terakhir.

Melalui publikasi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai upaya-upaya Wantannas dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional melalui kegiatan dan kajian-kajian yang dilaksanakan dalam memberikan masukan kepada Presiden selaku ketua Dewan Ketahanan Nasional.

Jakarta, Januari 2023
Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Audiensi Sesjen Wantannas	1
Kunjungan Kerja Dalam Negeri.....	38
Narasumber	99
Wankamnas	124
Rakertas, Pokjasus & Ramusmat.....	142
Penghargaan.....	157
Prasidang Dewan	163
Kegiatan Internal Dewan Ketahanan Nasional.....	172

AUDIENSI SESJEN WANTANNAS



KUNJUNGAN MENPAN- RB TERKAIT PENGUATAN PERAN WANTANNAS

Jakarta, 07/10/20



Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Laksda TNI Dr. Harjo Susmoro, S.Sos, SH, S.Pi, MH. dengan didampingi Pejabat Eselon I dan II Setjen Wantannas menerima langsung kunjungan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Menpan RB) di *Situation Room*, Lantai V Gedung B Kantor Setjen Wantannas, Rabu (7/10/2020).

Dalam sambutannya, Sesjen Wantannas menyampaikan rasa terima kasih kepada Menteri Tjahjo bersama tim atas kesediaan waktu berkunjung ke Setjen Wantannas.

“Kami berharap ini menjadi awal yang baik ke depan terkait masalah penguatan peran Lembaga Setjen Wantannas nantinya, karena selama ini seolah-olah fungsi Wantannas sendiri seakan pasif,” ucap Sesjen.

Menteri Tjahjo menyampaikan bahwa kunjungan ini terkait dengan salah satu visi dan misi Presiden Jokowi yaitu reformasi birokrasi yang tujuannya untuk mempermudah proses pengambilan keputusan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.



Dalam hal ini, Setjen Wantannas dirasa perlu melakukan penguatan peran sesuai fungsinya dalam memberikan masukan ke Presiden melalui produk-produk kajiannya terkait pembinaan ketahanan nasional.

Menteri Tjahjo juga mempertanyakan Setjen Wantannas yang tidak pernah diundang dalam rapat-rapat terbatas yang dilaksanakan Presiden dan jajarannya.

“Sejak lima tahun lalu, kami menyoroti lembaga-lembaga yang diketuai secara langsung oleh Presiden sudah tidak pernah diundang dalam kegiatan rapat terbatas, salah satunya ya Wantannas ini, ada juga Dewan Nuklir Nasional dan dewan-dewan yang lainnya,” ucapnya.

Menteri Tjahjo juga menyampaikan pandangannya terkait konsepsi pengintegrasian kebijakan keamanan nasional. Menurutnya, jika ingin merealisasikan wacana pengintegrasian fungsi keamanan nasional ke dalam *National Security Council*, lembaga tersebut harus memastikan sinkronisasi antara program dan kebijakan keamanan nasional yang terfokus pada dua hal yaitu sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan rekomendasi perumusan kebijakan.

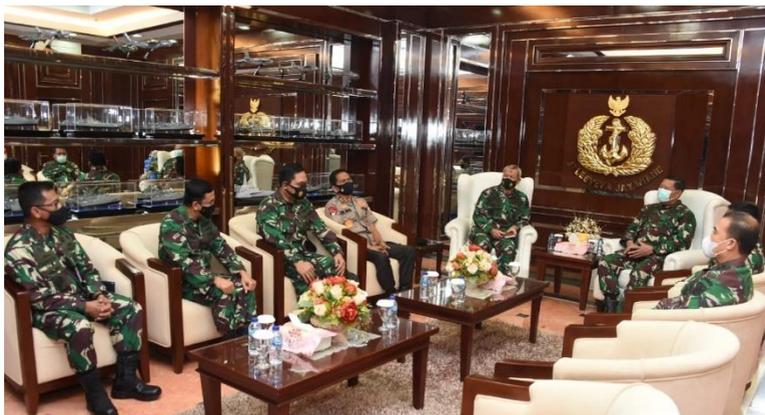
Menteri Tjahjo didampingi oleh Deputy Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB Rini Widyantini, SH., MPM., Staf Khusus Menteri Bidang Penanganan Anti Korupsi Rakhmad Setyadi, S.I.K., M.H., Staf Khusus Menteri Bidang Penanganan Radikalisme Yoyon Tony Surya Putra, S.I.K., M.H., Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Muhammad Immanudin, serta Staf Khusus Menteri Bidang Pelayanan Publik dan Umum Saifudin Latief. ***(np)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>



SESJEN WANTANNAS MELAKSANAKAN AUDIENSI DENGAN KSAL

Jakarta, 21/10/20



Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., Rabu (21/10/2020) resmi mendapat kehormatan setingkat lebih tinggi yaitu Laksamana Madya. Kenaikan Pangkat tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 89/TNI/Tahun 2020 tentang Kenaikan Pangkat ke dan dalam Golongan Perwira Tinggi TNI. Laporan Korps Kenaikan Pangkat Pati TNI dipimpin langsung oleh Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P., di Aula Gatot Soebroto, Denma Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Laporan Korps Kenaikan Pangkat (Kekat) puluhan Pati TNI sesuai Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin / 2328 / X / 2020 tanggal 19 Oktober 2020. Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., didampingi Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksdya TNI Ahmadi Heri Purwono, S.E., M.M.

Pada acara yang sama, Sesjen Wantannas berkesempatan untuk melakukan audiensi dengan Kasal terkait posisi, kedudukan dan struktur organisasi Setjen Wantannas serta upaya-upaya yang sudah dan saat ini sedang dikerjakan untuk merevitalisasi Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Keamanan Nasional (DKN). Dalam perbincangan tersebut, juga turut dibahas isu-isu dan masalah



nasional yang sedang marak terjadi. Pengharapan dan niat baik juga disampaikan oleh kedua lembaga yaitu Setjen Wantannas dan TNI AL untuk saling *support* dan transformasi informasi di masa datang.

Dalam audiensi tersebut, Sesjen Wantannas didampingi Pejabat Eselon I lainnya seperti Deputy Bidang Politik dan Strategi Irjen Pol Drs. Sukma Edi Mulyono, M.H., Deputy Bidang Pengembangan Marsda TNI Dr. Sungkono, S.E., M.Si., Deputy Bidang Sistem Nasional Mayjen TNI Made Datrawan, S.IP, serta Staf Ahli Pertahanan Keamanan Laksda TNI Gregorius Agung W.D., M.Tr (Han).

Audiensi diakhiri dengan pemberian plakat dan foto bersama. ***(dfn)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>





TIM WANTANNAS KUNJUNGI LANTAMAL VIII

Jumat, 12/11/20



Danlantamal VIII Manado Brigadir Jenderal TNI (Mar) Donar Philip Rompas bersama tim dari Dewan Ketahanan Nasional (ANTARA/Dispen Lantamal) (1)

Manado (ANTARA) - Tim Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) melakukan kunjungan ke Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VIII Manado.

"Kedatangan tim yang dipimpin Sekretaris Jenderal (Sesjen) Wantanas Laksdya Harjo Susmoro, diterima Komandan Lantamal (Danlantamal) VIII Brigadir Jenderal TNI (Mar) Donar Philip Rompas," kata Kepala Dinas Penerangan Lantamal VIII Mayor Laut (KH) Samuel Pontoh, di Manado, Kamis (12/11)

Saat menerima kunjungan tersebut Danlantamal Donar Rompas menyampaikan selamat datang kepada Sesjen Wantanas beserta rombongan Tim Kajian Daerah Setjen Wantanas.

"Terima kasih atas kunjungan serta kepercayaan Setjen Wantanas dimana Lantamal VIII menjadi salah satu objek kajian di Sulut," kata Rompas.



Pada saat tersebut Danlantamal menyampaikan profil Lantamal VIII dalam sebuah cuplikan video.

Pada kesempatan tersebut Sesjen Wantannas Laksdya TNI Harjo Susmoro, menyampaikan pentingnya Wantannas yang memiliki tugas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Sesjen Wantannas didampingi Tim yang terdiri dari Laksda TNI Gregorius Agung, Marsma TNI (Purn) Uganda Irwanto, Kolonel Sus H. Nurofik, Drs. Irwan Iding, Drs. Rustam, Valentinus Sudarjanto Sumitro S.IP., M.Si.

Sedangkan Danlantamal didampingi para pejabat utama antara lain Lantamal VIII, para Asisten Danlantamal VIII, Kepala Dinas terkait.

<https://manado.antaranews.com/berita/111216/tim-wantannas-kunjungi-lantamal-viii>



SESJEN WANTANNAS JELASKAN EKISTENSI WANTANNAS KEPADA WAKAPOLRI

Jakarta, 13/11/20



Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, S.H, M.H., mengadakan audiensi dengan Wakapolri di kantor Mabes Polri, Jalan Trunojoyo No.3, Jakarta Selatan, Selasa (13/11/2020).

Bertempat di Lantai 2 Ruang Rapat Wakapolri, Sesjen Wantannas beserta tim disambut langsung oleh Wakapolri Komjen Pol. Dr. Drs. Gatot Eddy Pramono, M.Si. Wakapolri didampingi oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen. Pol. Drs. Sutrisno Yudi Hermawan, Koordinator Staf Ahli Kapolri Irjen. Pol. Drs. Refdi Andri, M.Si., Wakil Kepala Intelijen Keamanan Polri Irjen. Pol. Drs. Suntana, M.Si.

Dalam kesempatan itu, Sesjen Wantannas menyampaikan tugas dan kedudukan Wantannas sebagai lembaga yang diketuai langsung oleh Presiden.

“Kehadiran kami selain ingin memperkenalkan diri selaku Sesjen Wantannas yang baru, juga terkait kinerja Setjen Wantannas yang saat ini masih kurang diberdayakan. Kebanyakan orang hanya melihat Setjen Wantannasnya saja bukan Dewan Ketahanan Nasionalnya. Padahal kalau di negara lain, Lembaga



Dewan Keamanan ini adalah lembaga yang peranannya penting karena ketuanya adalah Presiden langsung,” ucap Sesjen.

Dewan Ketahanan Nasional sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jendral Dewan Ketahanan Nasional, adalah lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dewan Ketahanan Nasional mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan gerakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Sesjen menambahkan, selama ini kementerian dan lembaga lainnya hanya melihat Setjen Wantannas saja, sehingga tidak menyadari bahwa mereka adalah anggota tetap Wantannas.

Dalam paparannya, Sesjen menggambarkan kedudukan Setjen Wantannas bagaikan sebuah dapur, di mana Sesjen Wantannas bersama 14 anggota tetap Wantannas lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara adalah juru masaknya. Sehingga apabila Presiden menginginkan sebuah hidangan, maka para juru masak ini yang akan menyediakan bahan sesuai kajian dari masing-masing K/L dan akan dibahas bersama untuk membuat suatu kebijakan. Dalam hal ini, Sesjen Wantannas berharap dapat didukung dan dibantu oleh Polri apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki untuk membuat kedudukan Wantannas kembali diberdayakan.

Audiensi Sesjen Wantannas bersama Wakapolri didampingi oleh Deputy Bidang Politik dan Strategi Irjen Pol Drs. Sukma Edi Mulyono, M.H., Deputy Bidang Pengembangan Marsda TNI Dr. Sungkono, S.E., M.Si., Deputy Bidang Sistem Nasional Mayjen TNI Made Datrawan, S.IP serta Staf Ahli Pertahanan Keamanan Laksda TNI Gregorius Agung W.D., M.Tr (Han). ***(np)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>



KASAU TERIMA AUDIENSI SESJEN WANTANNAS

Jakarta, 16/11/20



TNI AU. Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., menerima Audiensi Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Laksamana Madya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., di Gedung Raden Suryadi Suryadarma Mabesau Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (16/11/2020).

Pada pertemuan tersebut, Sesjen Wantannas menjelaskan tugas dan fungsi secara garis besar Wantannas yaitu merumuskan kebijakan, strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan-kesatuan bangsa dan negara serta perkiraan risiko pembangunan nasional yang akan dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan kebijakan dan strategi merehabilitasi akibat risiko pembangunan tersebut serta mencarikan solusinya untuk kemudian dilaporkan kepada Ketua dewan Wantannas yaitu Presiden Republik Indonesia.

Di akhir tatap muka Kasau mengucapkan selamat atas jabatan baru kepada Laksamana Madya TNI Dr. Harjo Susmoro sebagai Sesjen Wantannas yang baru sekaligus menegaskan TNI AU akan selalu mendukung setiap program-program Wantannas dalam memberikan masukan dari sisi Angkatan Udara.

<https://tni-au.mil.id/kasau-terima-audiensi-sesjen-wantannas/>



AUDIENSI SEKRETARIS JENDERAL WANTANNAS DENGAN MENPAN RB

Jakarta, 21/01/21



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menerima audiensi Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Laksdya TNI Harjo Susmoro di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (21/01). Pertemuan tersebut, membahas perubahan nama Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Keamanan Nasional.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini, Plt. Staf Ahli bidang Politik dan Hukum Kementerian PANRB Muhammad Imanuddin, Staf Khusus Menteri PANRB bidang Penanganan Anti-Korupsi Rakhmad Setyadi, Staf Khusus Menteri PANRB bidang Penanganan Radikalisme Yoyon Tony Surya Putra, serta sejumlah anggota Wantannas.

<https://menpan.go.id/site/berita-foto/audiensi-sekretaris-jenderal-wantanas>



SESJEN WANTANNAS SOSIALISASIKAN TUGAS DAN KEDUDUKAN WANTANNAS DIHADAPAN KEPALA BPKP

Jakarta, 08/02/21



Wantannas.go.id : Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, S.H, M.H., dengan didampingi para Deputi Setjen Wantannas mengadakan audiensi ke Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) yang berlokasi di Jalan Pramuka No. 33 pada Senin (8/2/2021).

Sesjen Wantannas beserta tim disambut langsung oleh Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Ak., M.B.A. yang didampingi Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Iwan Taufiq Purwanto, S.E., M.B.A.

Sesjen Wantannas menjelaskan maksud kedatangan tim dalam kunjungan kerja ini adalah untuk mensosialisasikan tugas dan kedudukan Setjen Wantannas sebagai Lembaga mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan gerakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Tidak luput disampaikan pentingnya saat ini negara Indonesia memiliki Dewan Keamanan Nasional. Sebagaimana kita ketahui bersama, perkembangan



lingkungan strategis yang sangat dinamis, telah membawa perubahan terhadap spektrum ancaman yang semakin kompleks dan berimplikasi terhadap terancamnya eksistensi negara. Bentuk dan sifat ancaman yang dikategorikan berbahaya dan berpotensi menghancurkan sebuah negara berubah menjadi multidimensional.

Ancaman inilah yang membuat banyak negara merevisi sistem keamanan nasional maupun struktur organisasi yang menyangkut keamanan di negara mereka masing-masing. Oleh sebab itu, beberapa negara dewasa ini telah menguatkan peran lembaga yang dinamakan Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas) yang merupakan lembaga pemerintah dalam pengambilan keputusan terkait masalah Kamnas yang bersifat krusial, mendesak, dan strategis. Hal ini terjadi bukan hanya di Indonesia, namun juga di Amerika Serikat serta beberapa negara besar lainnya.

Namun saat ini, peran Wantannas kurang dioptimalkan oleh Presiden selaku Ketua Wantannas. Untuk itulah Wantannas dirasa perlu direformasi menjadi Wankamnas dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan negara saat ini yang belum memiliki badan yang mengatasi ancaman keamanan nasional.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan bahwa untuk mengembalikan kedudukan lembaga agar kembali dikenal masyarakat maupun pemerintah, lembaga tersebut harus melakukan pendekatan yang *out of the box*.

“Kalau boleh saran nih, mari kita tunjukkan manfaatnya, kembalikan lagi namanya melalui prestasi dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Kepala BPKP.

Dalam audiensi tersebut, Sesjen Wantannas didampingi oleh Deputy Bidang Politik dan Strategi Irjen Pol Drs. Sukma Edi Mulyono, M.H., Deputy Bidang Pengembangan Marsda TNI Dr. Sungkono, S.E., M.Si., Deputy Bidang Sistem Nasional Mayjen TNI Made Datrawan, S.IP serta Deputy Bidang Pengkajian dan Penginderaan Laksda TNI Dr. Dani Achdani, S.Sos., S.E., M.AP ***(np)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>



DEWAN KETAHANAN NASIONAL KUNJUNGI LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 15/02/21



Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos.,S.H.,M.H. didampingi sejumlah Pejabat Tinggi Wantannas melakukan audiensi dengan Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, Senin, 15 Februari 2021. Turut hadir dalam audiensi tersebut Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Wiekto Syofyan, Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P, Tenaga Ahli Pengajar Bidang Pertahanan dan Keamanan Lemhannas RI Laksda TNI Budi Setiawan,S.T, Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bidang Pertahanan dan Keamanan Lemhannas RI Brigjen TNI Supriyatna, S.I.P., M.M., dan Direktur Pertahanan Keamanan dan Geografi Debidjianstrat Lemhannas RI Marsma TNI Heddezul, S.Sos.

“Masalah keamanan merupakan bagian dari kepentingan nasional suatu negara,” Sesjen Wantannas Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H. Menurut Harjo, kepentingan nasional adalah keadaan sejahtera dan aman. Harjo berpendapat bahwa keadaan sejahtera lebih kepada faktor politik, karena bergantung bagaimana pemerintahan untuk bisa menjamin warganya sejahtera. Sedangkan keamanan dibebani faktor kenegaraan karena menyangkut bagaimana mempertahankan agar negara itu tetap merdeka, tetap bersatu tetap



berdaulat, dan intinya adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keamanan memiliki peran yang sangat penting, tapi ternyata tanpa sadar mengalami degradasi. Oleh karena itu, Wantannas dirasa perlu direformasi menjadi Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas).

Harjo menyampaikan bahwa terkait nomenklatur saat ini sudah dalam tahap penyusunan Keputusan Presiden (Keppres) yang lebih lengkap dan komprehensif. Selain Keppres, saat ini juga sedang disusun rancangan strategi keamanan nasional. “Rancangan strategi keamanan nasional adalah bagaimana mempertahankan Indonesia tetap merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” kata Harjo. Rancangan strategi keamanan nasional juga diperlukan guna mencapai cita-cita nasional dan tujuan nasional.

Pada kesempatan tersebut Harjo juga menyampaikan bahwa Setjen Wantannas berencana menggunakan data pengukuran ketahanan nasional dari Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) Lemhannas RI untuk memberikan masukan kepada Presiden selaku ketua Dewan. “Kami tahu di sini ada satu alat ukur ketahanan nasional melalui Labkurtannas dan kalau sesuai dengan tugas pokok dari Wantannas itu ada salah satunya melakukan pengawasan, pengidentifikasian, penilaian, mengevaluasi situasi perkembangan keamanan nasional dan ketahanan nasional,” kata Harjo.

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan bahwa perubahan nomenklatur bukanlah perkara yang sederhana sebab istilah Dewan Ketahanan Nasional telah tercatat di dalam undang-undang. Namun, hal tersebut bukan berarti tidak mungkin. “Memang kelihatannya rumit,” kata Agus. Dalam kesempatan tersebut, Agus berbagi sejarah mengenai perubahan nama yang juga pernah berubah dari Lembaga Pertahanan Nasional menjadi Lembaga Ketahanan Nasional. “Dari pertahanan menjadi ketahanan,” tutur Agus. Namun, walaupun mengalami perubahan nama, untuk fungsi tidak mengalami perubahan dan tetap bertugas untuk mendidik praktisi ketahanan.

Sejumlah Pejabat Tinggi yang turut mendampingi Sesjen Wantannas dalam audiensi tersebut adalah Deputy Bidang Politik dan Strategi Irjen Pol Drs. Sukma Edi Mulyono, M.H., Deputy Bidang Pengembangan Marsda TNI Dr. Sungkono, S.E., M.Si., Deputy Bidang Sistem Nasional Mayjen TNI Made Datrawan, S.IP. serta Deputy Bidang Pengkajian dan Penginderaan Laksda TNI Dr. Dani Achdani, S.Sos., S.E., M.AP.



<https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1002-dewan-ketahanan-nasional-kunjungi-lembaga-ketahanan-nasional-republik-indonesia>



SESJEN WATANNAS TEKANKAN PEMBENTUKAN DOB BUKAN PECAH UNTUK BERPISAH

Gorontalo, 17/03/21



KOTA GORONTALO, Kominfortik – Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Watannas) Laksdya TNI Harjo Susmoro menekankan agar pembentukan lima Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Gorontalo agar tidak dimaknai dengan pecah untuk berpisah. Hal ini diungkapkannya pada audiensi dan ramah tamah bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo dan jajaran Forkopimda terkait kontribusi pembentukan DOB terhadap stabilitas sosial ekonomi daerah dalam perspektif keamanan nasional di Aula Rumah Jabatan Wagub Gorontalo, Kamis (17/3/2021).

“Kita sudah punya pengalaman, Indonesia dulunya satu pada jamannya Sriwijaya dan Majapahit kemudian diporak – porandakan oleh VOC, Belanda, dipecah belah sehingga tidak jauh beda dengan sekarang ini dibuat pecah dan akhirnya tidak satu. Nah ini yang paling bahaya. Sehingga bagaimanapun, walau terpecah tetapi tetap satu itu yang harus kita ributkan karena pecah untuk berpisah ini sangat bahaya, kalau pecah untuk bersatu ini untuk saling menguatkan,” terang Harjo Susmoro.

Harjo Susmoro menjelaskan pemekaran daerah merupakan masalah penting yang memerlukan banyak pertimbangan yang harus dikaji. Jangan sampai



pemekaran daerah hanya akan menambah kebutuhan pemerintah pusat terlebih saat ini kebutuhan belum mampu tertutupi dengan APBN dan pemasukan devisa yang belum seimbang. Sehingga konsekuensinya setiap tahun hutang terus bertambah.

Tidak hanya itu, pemekaran daerah ini juga harus diperhatikan dampak baik buruknya dan kepentingannya secara komprehensif benar – benar murni untuk kepentingan masyarakat. Jika terjadi kekeliruan, dampak yang akan dirasakan tidak hanya di Gorontalo saja namun juga secara nasional apalagi sampai mempengaruhi keutuhan NKRI.

Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim memberikan sambutan pada audiensi dan ramah tamah Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Watannas) Laksdya TNI Harjo Susmoro bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo dan jajaran Forkopimda terkait kontribusi pembentukan DOB terhadap stabilitas sosial ekonomi daerah dalam perspektif keamanan nasional di Aula Rumah Jabatan Wagub Gorontalo, Kamis (17/3/2021). (Foto: Mila)

“Kita jangan sampai salah mengambil keputusan, ada orang yang motivasinya Mungkin mohon maaf ekstimnya nanti akan memisahkan diri pelan – pelan oleh DOB, hal itu bisa memungkinkan. Keutuhan NKRI tetap harus menjadi syarat utama, itu yang harus kita pahami. Saya menghargai dan apresiasi dengan semangat otonomi daerah untuk kepentingan daerah saya paham mengapa harus ada otonomi baru. Jangan sampai kita salah mengambil keputusan kemudian keliru yang disalahkan Presiden lagi,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, mewakili lima komite pembentukan DOB, Ridwan Tohopei Ketua Komite Bone Pesisir dan Weni Liputo Ketua Presidium Kota Telaga memaparkan secara singkat latar belakang pemekaran dari daerah masing – masing. Berdasarkan kajian komite Bone Pesisir, jarak menuju induk kabupaten untuk keperluan administratif dari daerah Bone Pesisir sangat jauh bahkan bisa menghabiskan biaya hingga Rp.200.00/orang. Sedangkan komite Kota Telaga menegaskan bahwa pemekaran daerah bukan karena kemauan dengan contoh banyak daerah yang mekar tapi bupatinya bukan dari ketua panitia pemekaran tersebut. Menurut Weni hal itu bukan landasan mengapa pembentukan DOB ini diperjuangkan. Tujuan yang sama yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Menanggapi hal tersebut, Wagub Idris meminta Sesjen Watannas dapat mengusulkan pada Pemerintah Pusat untuk pembentukan daerah administratif. Hal ini bercermin dari pengalamannya yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah di Kabupaten Boalemo dimana daerah administratif itu dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Tentunya ini dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat agar dapat dilihat strategi yang sudah dibentuk dan melihat daerah mana yang mampu untuk mandiri.

“Mungkin pak sekjen bisa bisa usulkan ke kementrian dalam negeri maupun ke pak presiden untuk dibentuk saja daerah administratif dengan tetap keuangan kepegawaian dan semuanya itu dari daerah induk. Tetapi daerah administratif itu dalam rangka pelayanan kepada masyarakat jadi semuanya dari daerah induk sehingga anggaran yang dikhawatirkan itu hampir tidak ada karena semuanya di drop dari daerah induk sesuai dengan kebutuhan seperti dulu Kabupaten Boalemo memang dibentuk defintif saya waktu itu sebagai sekda yang pertama di Boalemo. Kemudian di Sulut, Bitung itu kota administratif juga dari Sulawesi Utara dan Kabupaten Minahasa,” jelas Idris.

Selebihnya Idris berharap kunjungan Sesjen Watannas akan memberikan pertimbangan dan masukan ke pemerintah pusat untuk mempercepat pembentukan daerah otonomi baru di Provinsi Gorontalo.

Source berita: <https://gorontaloprov.go.id/sesjen-watannas-tekanan-pembentukan-dob-bukan-pecah-untuk-berpisah/>

<https://indonesiakini.go.id/berita/5444068/sesjen-watannas-tekanan-pembentukan-dob-bukan-pecah-untuk-berpisah>

<https://gorontalopost.id/2022/03/18/watannas-dob-bukan-pecah-untuk-berpisah/>

<https://prosesnews.id/sesjen-watannas-tekanan-pembentukan-dob-bukan-pecah-untuk-berpisah/>

<https://hulondalo.id/sesjen-watannas-ingatkan-jangan-terpecah-karena-dob/>



SETJEN WANTANNAS KAJI REALISASI MOU PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA DI KALTARA

Kaltara, 24/03/21



Sengketa perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan terdapat pada dua titik, dimana titik perbatasan status *quo* tersebut terletak di Sei Sumantipal dan Sei Sinapad, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Perkembangan terakhir menunjukkan Indonesia dan Malaysia bersepakat soal tapal batas kedua negara di dua titik di Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Hal itu dilakukan lewat menandatangani nota kesepahaman (*Memorandum Of Understanding/Mou*) antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) dengan Kementerian Air, Tanah, dan Sumber Asli Malaysia yang ditandatangani pada Kamis, 21 November tahun 2019. Setelah dua tahun berlalu, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) melalui Kedeputian Politik dan Strategi melaksanakan kegiatan Pengkajian Daerahn (Kajida) untuk melihat realisasi dari MoU yang telah disepakati dan kendala yang dihadapi, serta permasalahan mewujudkan hukum yang berkeadilan di daerah perbatasan.

Tim kajida yang dipimpin langsung oleh Deputi Politik dan Strategi Irjen Pol Drs. Sukma Edi Mulyono, M.H. bersama tim berangkat ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada Selasa, (23/03/2021).

Hari berikutnya, giliran Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H. yang



menyambangi Kaltara. Kedatangannya itu disambut langsung Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH.,M.Hum di Bandara Internasional Juwata Tarakan pada Rabu,(24/03) siang.

Kedatangan Setjen Wantannas RI, Laksdya TNI. Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H.,M.H disambut hangat Gubernur Zainal di Ruang VIVP. Dikatakan Gubernur Zainal, kedatangan Setjen Wantannas RI tak lain untuk pengelolaan perbatasan Kaltara.

“Sinergi Pemerintah Provinsi Kaltara dengan Wantannas dalam rangka menjaga dan mengamankan perbatasan negara,” jelasnya.

Sesuai jadwal, tim Kajida Setjen Wantannas akan melanjutkan kunjungan kerja ke Lantamal VIII/Tarakan, di hari berikutnya ke Dandim 0911/Nunukan dan Polda Kaltara. Di hari terakhir, Tim Kajida di jadwalkan akan berkunjung ke Universitas Borneo Tarakan sebelum kembali ke Jakarta.

Daftar pejabat Setjen Wantannas yang turut mendampingi dalam kegiatan kajida antara lain, Pembantu Deputi Politik Nasional Brigjen Pol Drs. Ismail Bafadal, M.H., Anjak bidang Pulahta Polnas Kolonel Inf M. Affandi, S.IP., M.M., Anjak bidang Musjian Polnas Kolonel POM Djati Santoso S.H., M.H, serta Anjak bidang Monev Polnas Dr. Ulmi Listianingsih, S.Sos., M.M. ***(np)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>



SESJEN WANTANNAS KUNJUNGI UNIVERSITAS INDONESIA BAHAS KETAHANAN NASIONAL BIDANG PENDIDIKAN

Depok, 09/04/21



Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.H., M.H., mengadakan pertemuan dengan Pimpinan Tinggi di Universitas Indonesia (UI) pada Jumat (9/4/2021). Dalam kunjungannya, Sesjen Wantannas yang didampingi para Deputi Setjen Wantannas disambut langsung oleh Rektor UI Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D beserta para pimpinan UI lainnya.

Dalam paparannya, Sesjen Wantannas menyampaikan tujuan kunjungannya tidak lain untuk mensosialisasikan tugas dan kedudukan Wantannas sebagai lembaga yang memiliki tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan gerakan pembinaan ketahanan nasional demi tercapainya tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Sesjen Wantannas menyampaikan bahwa persoalan ketahanan nasional sekarang ini bukan hanya dalam ranah militer saja namun menyangkut multidimensional seperti masalah nyawa dan kelangsungan hidup masyarakat bernegara.



Ancaman inilah yang membuat banyak negara dewasa ini lebih menguatkan peran lembaga Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas) yang merupakan lembaga pemerintah dalam pengambilan keputusan terkait masalah Kamnas yang bersifat krusial, mendesak, dan strategis. Hal ini terjadi bukan hanya di Indonesia, namun juga di Amerika Serikat serta beberapa negara besar lainnya.

“Indonesia punya wadahnya berupa forum Dewan Ketahanan Nasional, hanya saja kurang dioptimalkan. Kita sudah melaksanakan studi banding dengan negara-negara lain seperti negara Turki, Rusia, Jepang, Amerika Serikat dan minggu dengan negara China, semuanya memiliki Lembaga Keamanan Negara dan berjalan dengan baik serta berada di bawah Presiden atau Kepala Negara,” ucap Sesjen.

Ia juga menambahkan bahwa saat ini Setjen Wantannas sedang menjajaki komunikasi dan sosialisasi dengan lembaga pendidikan seperti universitas yang *notabene*-nya bebas kepentingan agar semakin banyak pihak-pihak termasuk akademisi yang menyadari bahwa peran Lembaga Keamanan sangat diperlukan negara ini.

Ketahanan Nasional dalam bidang pendidikan, menurut Sesjen dapat dilakukan dengan pembinaan dan peningkatan aspek sosial-budaya serta wawasan kebangsaan. Hal ini sangat tepat jika ditempuh melalui jalur akademisi sebagai generasi muda yang mempunyai ciri khas yang dominan dan menonjol dalam pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Dalam sambutannya, Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D. menyampaikan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia memang menurun secara kualitas. Menurutnya, anak-anak sekarang lebih menyukai ilmu-ilmu praktis dan tidak mendalam. Perubahan kurikulum yang menitikberatkan pada kompetensi siswa semata atau bahkan kemampuan logika, kreatifitas dan inovasi siswa semata, secara tidak langsung mengakibatkan berkurangnya sensitifitas siswa pada masalah sosial dan budaya seperti budi pekerti yang merupakan bagian dari jati diri bangsa. Solusi yang dibutuhkan saat ini adalah solusi yang menyeluruh dengan adanya *balancing* ilmu-ilmu praktis dengan wawasan kebangsaan.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof. Dr. Rer. Nat. Abdul Haris, M.Sc., juga menyampaikan bahwa *job future* yang sangat terbuka di era globalisasi dan potensi anak-anak muda yang sangat besar, apabila tidak diisi



dengan landasan kecintaan kepada negara dikhawatirkan bangsa Indonesia akan kehilangan generasinya.

Diskusi yang dilaksanakan di Ruang Rapat A, Gedung PAU, Kampus UI, Depok berlangsung selama dua jam lebih. Sesjen Wantannas didampingi oleh Deputy Pengembangan Marsda TNI Dr. Sungkono, S.E., M.Si., Deputy Bidang Pengkajian dan Penginderaan Laksda TNI Dr. Dani Achdani, S.Sos., S.E., M.AP., Plt. Deputy Bidang Sistem Nasional Brigjen TNI Karev Marpaung, S.Sos., M.M. serta Pembantu Deputy Urusan Politik Nasional Brigjen Pol Drs. Ismail Bafadal, M.H.***(np)



Source : <https://www.wantannas.go.id/>



SESJEN WANTANNAS AUDIENSI DENGAN REKTOR ITB

Bandung, 23/04/21



Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Laksdya TNI Harjo Susmoro mengadakan pertemuan dengan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) pada Jumat 23 April 2021. (ANTARA/HO-Wantannas)

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sekjen Wantannas) Laksdya TNI Harjo Susmoro mengadakan pertemuan dengan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) pada Jumat 23 April 2021.

Sekjen Wantannas Laksdya TNI Harjo Susmoro dalam rilisnya diterima di Jakarta, Jumat, menyampaikan tujuan kunjungannya untuk mensosialisasikan tugas dan kedudukan Dewan Ketahanan Nasional sebagai lembaga yang mempunyai tugas membantu presiden. Yakni, menyelenggarakan gerakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia dan cita-cita nasional.

Ia menyampaikan persoalan ketahanan nasional sekarang ini bukan hanya dalam ranah militer saja namun sudah menyangkut multidimensional.



Seperti, terkait masalah keamanan nasional meliputi seluruh aspek kehidupan yang berhubungan dengan kelangsungan hidup masyarakat berbangsa, bernegara dan juga masalah kesejahteraan rakyat yang harus diperjuangkan bersama.

Ancaman inilah yang membuat banyak negara dewasa ini telah menguatkan peran lembaga yang dinamakan Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas) yang merupakan lembaga pemerintah dalam pengambilan keputusan terkait masalah keamanan nasional yang bersifat krusial, mendesak, dan strategis.

Hal ini terjadi kata dia bukan hanya di Indonesia, namun juga di Amerika Serikat serta beberapa negara besar lainnya.

Indonesia menurutnya memiliki wadahnya berupa forum Dewan Ketahanan Nasional, hanya saja kurang dioptimalkan.

"Kita sudah melaksanakan studi banding dengan negara-negara lain seperti negara Turki, Rusia, Jepang, Amerika Serikat, Inggris dan minggu lalu dengan negara China, semuanya memiliki lembaga keamanan negara dan berjalan dengan baik serta berada di bawah presiden atau kepala negara," katanya.

Laksdya TNI Harjo Susmoro menambahkan saat ini Sekretariat Jenderal Wantannas sedang menjajaki komunikasi dan sosialisasi dengan lembaga pendidikan seperti universitas yang notabene-nya bebas kepentingan agar semakin banyak pihak-pihak termasuk akademisi yang menyadari bahwa peran lembaga keamanan sangat diperlukan negara ini.

Ketahanan Nasional dalam bidang pendidikan, menurutnya dapat dilakukan dengan pembinaan dan peningkatan aspek sosial budaya serta wawasan kebangsaan.

Hal ini sangat tepat jika ditempuh melalui jalur mahasiswa sebagai generasi muda yang mempunyai ciri khas dominan dan menonjol dalam pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Rektor ITB Prof Reini Wirahadikusumah dalam diskusinya menyampaikan dukungannya untuk pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan dan pendidikan karakter kepada mahasiswa.

Pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan adalah bagian dari pembangunan mental kebangsaan, dan mahasiswa diharapkan mempunyai pemahaman dan sikap bela negara dan wawasan kebangsaan.



Dalam kunjungannya, Sekjen Wantannas didampingi oleh Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan Laksda TNI Dani Achdani dan Staf Ahli Bidang Sosial Budaya Mayjen TNI Ana Supriatna.

<https://www.antaraneews.com/berita/2118610/sesjen-wantannas-audiensi-dengan-rektor-itb>

<https://melanesianinfo.com/sesjen-wantannas-audiensi-dengan-rektor-itb/>



SESJEN WANTANNAS LAKSANAKAN AUDIENSI DENGAN MENTERI PPN/BAPPENAS BAHAS KELANJUTAN REVITALISASI WANTANNAS

Jakarta, 27/04/21



Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.H., M.H., didampingi Deputy Bidang Politik dan Strategi Irjen Pol Drs. Sukma Edi Mulyono, M.H., Deputy Bidang Pengembangan Marsda TNI Dr. Sungkono, S.E., M.Si., dan Plt. Deputy Bidang Sistem Nasional Mayjen TNI Moh. Hatta Usmar Rukka mengadakan audiensi dengan Menteri PPN/Bappenas pada Selasa (27/4/2021).

Sesjen Wantannas beserta tim diterima langsung oleh Menteri PPN/Bappenas Dr. (H.C.) Ir. H. Suharso Monoarfa didampingi Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan DR. Ir. Slamet Soedarsono, MPP, QIA, CRMP, CGAP dan Plt. Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan Dr. Ir. Leonard VH Tampubolon, MA.

Sesjen Wantannas Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro dalam diskusinya menyampaikan progres revitalisasi Wantannas menjadi Wankamnas saat ini sedang menunggu keputusan dari Presiden terkait ijin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Keamanan Nasional dari MenpanRB kepada Presiden melalui Kemensetneg.



Berdasarkan hasil rapat Setjen Wantannas dengan Bappenas pada Kamis, 17 Oktober 2019 lalu disepakati bahwa pembentukan Wankamnas disetujui dimasukkan ke dalam RPJMN 2020-2024 dan diterima sebagai bagian kerangka kelembagaan 2020-2024.

Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro menambahkan bahwa Setjen Wantannas telah mengundang *non state actor* untuk mendapatkan masukan dan usulan pembentukan Wankamnas melalui diskusi dengan para pakar, LSM dan melaksanakan studi banding ke beberapa negara sahabat melalui diskusi dengan Duta Besar perwakilan yang ada di Indonesia.



“Selain itu, saat ini kita juga sedang Menyusun dokumen terkait Strategi Keamanan Nasional dan progresnya sudah hampir 80%, dan kita usahakan akan mengadakan sidang Rapat Pra Sidang Dewan dalam waktu dekat ini,” ucap Sesjen.

Dalam tanggapannya, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas) yang akan dibentuk harus jelas kedudukannya secara payung hukum dan nomenklatur kelembagaan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan komitmennya untuk membantu meneruskan kepada Presiden terkait progress pembentukan Wankamnas.

Diskusi yang berlangsung sekitar 2 jam dan dilaksanakan di Ruang Rapat SG-3, Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jalan Taman Suropati No.2, Jakarta, berjalan dengan lancar.***(np)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>



LEMBAGA KAJIAN NAWACITA DAN APRONUKE ADAKAN AUDIENSI DENGAN SETJEN WANTANNAS BAHAS PENGEMBANGAN BATERAI LISTRIK

Jakarta, 04/05/21



Wantannas.go.id: Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.H., M.H., didampingi para Deputi Setjen Wantannas menerima kunjungan Lembaga Kajian NawaCita (LKN) bersama Perkumpulan Profesi Nuklir Indonesia (APRONUKI), pada Selasa (4/5/2021).

Samsul Hadi mengatakan bahwa Lembaga Kajian Nawacita adalah organisasi yang didirikan untuk membangun SDM unggul dalam rangka menuju Indonesia maju. Di dalam Lembaga Kajian Nawacita terdapat beberapa komite, terbaru adalah Komite Karbon Baru dan Material Maju (KBMM).

“Ini sangat penting sekali adanya terobosan baru, teknologi yang bisa mendorong ke arah industri yang lebih bermanfaat untuk masyarakat,” kata Samsul.

Ketua Perkumpulan Profesi Nuklir Indonesia (APRONUKI) Drs. Besar Winarto menyatakan, pihaknya telah ikut aktif mendorong peran energi nuklir dalam RUU EBT, melalui permintaan Pusat Perancangan Undang-Undang, Sekretariat dan Badan Keahlian DPR.



Menurutnya, sinergi antara energi nuklir dengan energi terbarukan sangatlah dibutuhkan, untuk mendukung kebutuhan energi bersih yang handal, fleksibel dan mampu meningkatkan nilai tambah energi fosil.

Baterai electric vehicle (EV) akan menjadi penentu kualitas kehidupan manusia ke depan. Kabar baiknya, Indonesia adalah negara terbesar penghasil bahan bakunya, yaitu nikel. Porsi cadangan nikel Indonesia mencapai 24% dari total cadangan nikel dunia.

Menurut dia, permintaan baterai listrik di Indonesia pada 2035 diperkirakan mencapai 28 GWh, meningkat dibandingkan tahun 2025 dan 2030 yang masing-masing sebesar 2,8 GWh dan 11,2 GWh. Dari jumlah tersebut, sekitar 60 persen dari kebutuhan baterai berasal dari mobil listrik, disusul sepeda motor, electronic storage dan memenuhi pasar luar negeri.

Indonesia juga unggul dari sisi demand. Potensi kendaraan roda dua mencapai 8,8 juta unit dan 2 juta unit untuk roda empat pada 2025. Competitive advantage dari supply chain yang ada, setidaknya 35% komponen EV dapat bersumber dari dalam negeri.

Salah satu pengembangan yang sedang dilakukan adalah memanfaatkan teknologi *Hidrometalurgi Step Temperature Acid Leach (STAL)* di Indonesia untuk melakukan proses pemurnian berlapis, sehingga menghasilkan limbah padat yang sangat minim, penggunaan air dan energi yang minimal.

Cadangan nikel sebagai penggerak utama bisnis juga melimpah sejak bijih nikel dilarang untuk diekspor oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

Sesjen Wantannas Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.H., M.H., dalam sambutannya menyambut baik dan mendukung apa yang disampaikan oleh para narasumber. Menurutnya, masalah yang dihadapi bangsa terkait masalah energi nuklir disebabkan karena ketidakmampuan sumber daya manusianya untuk mengelola sumber daya alam yang melimpah di Indonesia.

Menurut Sesjen Wantannas, Pembangunan Sumber Daya Manusia dalam program Nawacita Indonesia harus terus dilakukan dengan meletakkan nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan, terlebih utama terksit nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.



Diskusi yang berlangsung di *Situation Room*, Lantai 5 B Kantor Setjen Wantannas berlangsung selama dua jam dan diikuti oleh seluruh pejabat di Lingkungan Setjen Wantannas melalui aplikasi zoom meeting.***(np)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>



BERTEMU REKTOR UGM, SESJEN WANTANNAS DORONG WAWASAN KEBANGSAAN DAN NILAI-NILAI PANCASILA AGAR TETAP DIPERTAHANKAN DALAM MATA PELAJARAN DI SEKOLAH

Yogyakarta, 02/06/21



Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Lakdy Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., melaksanakan audiensi dengan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM). Audiensi dalam rangka Sosialisasi Implementasi Strategi Keamanan Nasional dan Penanaman Nilai-Nilai Pancasila dalam Upaya Bela Negara di Lingkungan Akademisi ini berlangsung di Ruang Rapat Rektor Lantai 2 Kantor Rektor UGM, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu (2/6/2021).

Rektor UGM Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU, ASEAN Eng., di damping oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni Prof. Dr. Paripurna, SH., M.Hum., LL.M menerima secara langsung kunjungan tim Sesjen Wantannas.

Dalam paparannya, Sesjen Wantannas menjabarkan kedudukan dan tugas serta fungsi Dewan Ketahanan Nasional yang terus mengalami degradasi padahal dalam perkembangan sekarang, negara Indonesia membutuhkan sebuah



Lembaga yang mampu menjalankan tugas Dewan Keamanan Nasional seperti negara berkembang lainnya.

“Saat ini Setjen Wantannas sedang menjajaki komunikasi dan sosialisasi dengan lembaga pendidikan seperti universitas yang *notabene*-nya bebas kepentingan agar semakin banyak pihak-pihak termasuk akademisi yang menyadari bahwa peran Lembaga Keamanan sangat diperlukan negara saat ini,” ucap Sesjen Wantannas.

Sesjen Wantannas menambahkan bahwa sebaiknya wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila agar tetap dipertahankan dalam mata pelajaran di sekolah-sekolah agar masyarakat khususnya generasi penerus tidak mengalami degradasi pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Ketahanan Nasional dalam bidang pendidikan, menurutnya dapat dilakukan dengan pembinaan dan peningkatan aspek sosial-budaya serta wawasan kebangsaan. Hal ini sangat tepat jika tempuh melalui jalur pendidikan tingkat Mahasiswa sebagai generasi muda yang mempunyai ciri khas yang dominan dan menonjol dalam pembangunan nasional untuk mencapai Tujuan Nasional.

Sesjen Wantannas Laksdya Dr. Ir. Harjo Susmoro, berharap dapat bekerjasama dan berkontribusi dalam sosialisasi wawasan kebangsaan di lingkungan UGM melalui kuliah-kuliah umum yang akan ditujukan khusus kepada Mahasiswa untuk menyadarkan kembali bahwa sikap bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara termasuk Mahasiswa sebagai penerus bangsa.

Rektor UGM Prof. Ir. Panut Mulyono dalam sambutannya menyampaikan bahwa di lingkungan UGM masih tetap melaksanakan kegiatan pembekalan wawasan kebangsaan kepada mahasiswa baik pada tingkat awal maupun pada mahasiswa tingkat akhir sebelum pelaksanaan wisuda.

Untuk memperkuat pemahaman para mahasiswa, Prof. Ir. Panut Mulyono menyebut baik UGM dan Dikti telah merumuskan regulasi tentang perkuliahan yang sesuai karakter Pancasila.

“Pancasila adalah dasar negara karena itu harus dijadikan sumber utama dan tolak ukur moral bangsa kita. Maka dari itu, harus diketahui, dipahami, diamalkan, diajarkan, dan diaktualisasi agar dapat diserap oleh adik-adik milenial sekarang ini. Kontekstualisasi Ideologi Pancasila harus kita hubungkan dengan kondisi faktual negara kita, termasuk pandemi sekarang ini. Dengan



demikian, Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur itu akan benar-benar tercapai,” pungkasnya.

Diskusi yang berlangsung kurang lebih selama dua jam berjalan dengan lancar. Pejabat Setjen Wantannas yang turut mendampingi dalam audiensi antara lain di dampingi oleh Deputi Bidang Sistem Nasional Mayjen TNI Moh. Hatta Usmar Rukka, dan dihadiri oleh Pelaksana Lanal Yka Letkol Laut (P) Wahyu Widayanto.***np

Source : <https://www.wantannas.go.id/>



SESJEN WANTANNAS HADIRI RAPAT DENGAR PENDAPAT BERSAMA KOMISI-I DPR

Jakarta, 08/06/21



Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wanannas) Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, S.H., M.H., di damping para Deputi, Sahli dan Karo Setjen Wantannas mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (8/6/2021).

Sesjen Wantannas Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro menyampaikan paparan terkait Rencana Kerja dan Anggaran Wantannas Tahun Anggaran 2022, sesuai dengan surat undangan dari Sekjen DPR RI Nomor AG/06354/DPR RI/V/2021, tanggal 11 Mei 2021.

Wakil Ketua Komisi I selaku Pimpinan Rapat dari Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto menyatakan bahwa rapat bersifat terbuka karena pembahasan anggaran sebaiknya dilakukan secara transparan.

Dalam paparannya Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro menyampaikan bahwa dampak yang akan terjadi sehubungan dengan terbatasnya anggaran yang diterima Wantannas antara lain:



1. Anggaran pemeliharaan inventaris, gedung, kendaraan dinas pejabat dan kendaraan operasional pada pagu anggaran tidak sesuai dengan pangajuan pagu awal, sehingga menyebabkan kegiatan pemeliharaan tidak dapat dilaksanakan dengan baik;
2. Anggaran penyusunan rumusan kebijakan sangat terbatas sehingga menyebabkan honorarium narasumber kurang dari SBM. Kondisi ini berakibat pada rumusan kebijakan yang masih belum sesuai harapan; dan
3. Kegiatan pengkajian melalui pengumpulan data, khususnya belanja masalah dan evaluasi dampak pembangunan di daerah sangat terbatas sehingga tupoksi Wantannas tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

“Untuk itu kami mengharapkan dukungan dari Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan Yang Terhormat di Komisi I DPR RI, agar alokasi anggaran Wantannas bisa disesuaikan dengan pengajuan pagu awal sehingga Wantannas dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Keppres 101 Tahun 1999 secara lebih optimal,” ungkap Sesjen Wantannas.***(np)



Source : <https://www.wantannas.go.id/>



KUNJUNGAN KERJA DALAM NEGERI

Setjen Wantannas melaksanakan kunjungan dan kajian kewilayahan dengan mengunjungi obyek-obyek terpilih sesuai dengan topik kajian di dalam negeri dengan tujuan mendapatkan informasi dan data terkini yang berhubungan dengan ketahanan nasional Indonesia.

Hasil dari kunjungan tersebut nantinya akan dijadikan bahan untuk menyusun saran tindak kebijakan kepada Presiden Republik Indonesia.



SESJEN WANTANNAS PIMPIN KAJIDA KE SULAWESI UTARA

Palu, 11/11/20



Wantannas.go.id : Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Laksdya TNI Dr. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., bersama tim Kajian Daerah (Kajida) unit Kedepuitan Politik dan Strategi Setjen Wantannas mengunjungi Sulawesi Utara (Sulut) dalam rangka mengkaji secara langsung upaya Pemerintah Daerah dan Aparat Keamanan dalam menjaga stabilitas keamanan di masa Pandemi Covid-19 menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, dan penanganan tenaga kerja asing.

Tim kajida Kedepuitan Politik dan Strategi (Polstra) melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan diterima langsung oleh Pjs Gubernur Sulawesi Utara Agus Fatoni bersama Forkopimda Sulut dan pejabat di Lingkup Pemprov Sulut, bertempat di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (11/11/2020).

Pjs Gubernur Fatoni mengapresiasi kegiatan Setjen Wantannas dalam rangka memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan. Terlebih juga Sulut memiliki banyak potensi-potensi yang perlu dikembangkan.



Fatoni menjelaskan, Sulut merupakan satu dari delapan provinsi kepulauan di Indonesia. Sulut memiliki sekitar 287 Pulau dan terdiri dari 59 pulau yang berpenghuni dan 228 Pulau yang belum berpenghuni. Ada 12 Pulau terluar, 7 pulau berada di Kabupaten Sangihe, dan 5 pulau di Kabupaten Kepulauan Talaud. 2 pulau di antaranya Miangas dan Marore yang berhadapan langsung dengan Filipina.

"Ada 12 pulau terluar di Sulut yang juga garda terdepan bangsa dan benteng tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Ini merupakan jalur perdagangan dunia dan pusat distribusi barang dan jasa yang juga ditunjang dengan potensi sumber daya alam yang melimpah baik di sektor perikanan kemudian di sektor kelautan energi terbarukan juga pertanian, perkebunan, dan juga pariwisata," paparnya.

Fatoni juga menyampaikan, kehidupan bermasyarakat di Sulut hingga saat ini terus berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis meskipun masyarakatnya sangat majemuk baik dari sisi etnis, religi, budaya dan adat istiadat. Hal ini dapat dilihat dari survei yang dilakukan oleh Kementerian Agama terhadap indeks kerukunan umat beragama, bahwa Sulut berada pada peringkat 4 dari 34 provinsi.

Sesjen Wantannas Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., menjelaskan bahwa Setjen Wantannas sebagai lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah, dan bertanggung jawab kepada Presiden, dengan tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan Ketahanan Nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional.

Tujuan Kajida sendiri adalah untuk memvalidasi dan membutuhkan informasi yang valid sarta melaksanakan kajian-kajian yang berkaitan dengan masalah pembangunan infrastruktur kemaritiman dan hubungan-hubungan dengan masalah pendekatan astagatra dari mulai kewilayahannya, demografinya dan sumber kekayaan yang ada di Sulut dan dihubungkan dengan perkembangan situasi yang berkaitan dengan ideologi politik ekonomi sosial budaya dan pertahanan keamanan di daerah.

Terkait dengan itu, melalui hasil pengidentifikasian, penganalisaan tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan menjadi isu-isu nasional yang berkaitan dengan masalah pariwisata, perikanan, dan ada juga masalah kewarganegaraan dan lainnya.



“Informasi-informasi dan masukan-masukan yang lebih *up to date*, dan realistis yang di perlukan sehingga kita bisa memberikan saran kepada presiden dalam penyusunan rancangan kebijakan nasional secara valid,” kata Sesjen.

“Ini yang nantinya akan kami angkat dan laporkan kepada Pak Presiden untuk bisa merumuskan suatu rancangan kebijakan bagaimana menyelesaikan persoalan ini, dan diharapkan tidak akan sampai mengganggu pada stabilitas keamanan yang lebih luas,” tambahnya.

Kajida Kedeputusan Polstra juga diikuti oleh Staf Ahli Bidang Hukum Irjen Pol Drs. Komarul Zaman, S.H., M.H., Pembantu Deputi Urusan Strategi Nasional Marsma TNI Bayu Roostono, S.H., M.M, Analis Kebijakan Bidang Evaluasi dan Toleransi Resiko Pembangunan Nasional Kolonel Inf Frans Thomas, M.Ikom, Analis Kebijakan Bidang Monitoring dan Evaluasi Politik Nasional Dr. Ulmi Listyaningsih, S.Sos., M.M., serta Analis Kebijakan Bidang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Sedang dan Jangka Pendek Sindu Utomo, S.H., M.M. ***(np)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>





KEDEPUTIAN PENGEMBANGAN KAJI ISU SEKTOR INDUSTRI DI KABUPATEN TEGAL



Jakarta, 17/11/20

Kedeputian Pengembangan Setjen Wantannas melaksanakan Pengkajian Daerah (Kajida) ke wilayah Kabupaten Tegal, yang dipimpin oleh Pembantu Deputi Urusan Sosial Budaya Brigjen TNI Heru Triyanto, Selasa (17/11/2020), dengan salah satu kegiatannya yaitu Bakti Sosial bersama Ikatan Alumni SMAN 1 (IKASMA) Tegal dan dialog interaktif Bela Negara yang di gelar di Aula SMAN 1 Tegal.

Sosialisasi Aksi Nasional Bela Negara di SMAN 1 Tegal dihadiri perwakilan siswa SMAN 1 Tegal, pelaku UMKM Tegal, pengurus IKASMA Tegal dan diikuti secara virtual melalui aplikasi *zoom meeting* dan *live streaming youtube* oleh 200 anggota IKASMA di seluruh Indonesia sebagai puncak dari rangkaian kegiatan Bakti Sosial IKASMA.

Permasalahan yang saat ini masih menjadi isu sentral di Tegal adalah dinamika perdagangan dan perindustrian. Hal ini dilihat dari pengembangan industri di daerah Tegal yang pada umumnya kurang berwawasan lingkungan yang bisa



terlihat dari maraknya kerusakan lingkungan, tanah longsor, banjir, pencemaran sungai, rob dan lain-lain.

Dalam sambutannya, Brigjen TNI Heru Triyanto menjelaskan fungsi dan kedudukan Dewan Ketahanan Nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan gerakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Sementara Setjen Wantannas merupakan *supporting* unit untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Wantannas dengan membantu memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional.

Kajida ini juga diikuti oleh Pembantu Deputi Urusan Hukum dan Perundang-Undangan Abdul Sofa, S.H., M.H., Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Bela Negara Kolonel Inf Judi Paragina Firdaus, M.Sc., Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Mobilisasi dan Demobilisasi Kolonel Lek Ir. Yufie Syafari, Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Perundang-undangan Maulana, S.H., M.H., Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Hukum Kolonel Laut (KH) Dr. Dwi Ari Purwanto, S.Pd., M.Pd. serta Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Penegakan Hukum Abdul Azis, S.H., M.Hum. ***(np)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>



KEBERHASILAN JAWA BARAT DALAM MENANGANI COVID-19 MENJADI PERHATIAN SESJEN WANTANNAS

Bandung, 18/11/20



Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., bersama Kedeputian Pengkajian dan Penginderaan melaksanakan Pengkajian Daerah (Kajida) untuk melihat kesiapan pemerintah daerah terkait program Vaksinasi Covid-19 di Provinsi Jawa Barat, Rabu (18/11/2020).

Tujuan Sesjen Wantannas beserta tim lawatan ke Jawa Barat untuk mendapatkan data terkait Covid-19 secara langsung. Di samping itu, apapun yang terjadi di wilayah Jawa Barat banyak pula yang berdampak terhadap nasional.

"Pertimbangan lainnya karena dalam penanganan Covid-19, Jabar menurut kami cukup berhasil," ujar Sesjen saat mengunjungi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Kota Bandung.

Sesjen Wantannas berharap, setelah memperoleh data dan informasi yang cukup, Wantannas berencana akan menjadikan Jabar sebagai daerah percontohan percepatan penanganan Covid-19 secara nasional.



"Setelah kita mendapatkan validasi dari Jabar terkait bagaimana penanganan Covid-19 bisa sukses, kalau ini bisa ditarik akan bisa jadi model untuk mempercepat penanganan Covid-19 secara nasional," ujarnya lagi.

Lebih lanjut Sesjen mengatakan, Setjen Wantannas bertugas membuat rancangan tentang kebijakan yang selanjutnya akan diserahkan kepada Presiden selaku Ketua Wantannas.

"Kami bertugas membantu Presiden untuk merumuskan penetapan kebijakan strategis, kami datang ke Jabar untuk kajian kewilayahan, tugasnya mengamati, mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi setiap persoalan," terang Sesjen.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan, secara teori seharusnya Jabar menjadi daerah paling terdampak penularan Covid-19 karena penduduknya terbanyak di Indonesia sehingga sangat rentan terhadap penularan. "Secara teori Covid-19 harusnya kami ini paling parah terkena dampak karena jumlah populasinya paling padat, tanpa sebuah upaya maka korban terbesar itu harusnya Jabar," kata Emil.



Strategi dalam melawan Covid-19 yang patut dicontoh dari Provinsi Jawa Barat terangkum dalam lima prinsip yaitu proaktif, transparan, ilmiah, inovatif, dan kolaborasi.***(np)



Source : <https://www.wantannas.go.id/>



GUNA MENDUKUNG “SATU DATA INDONESIA”, KEDEPUTIAN SISNAS SETJEN WANTANNAS KAJI PLTSA DI JAWA TENGAH

Semarang, 18/11/20



Kedeputusan Sistem Nasional Setjen Wantannas melaksanakan Pengkajian Daerah (Kajida) ke Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Deputy Bidang Sistem Nasional Mayjen TNI Made Datrawan, S.IP untuk melihat implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) yang ada di Semarang. Selain itu, juga melakukan audiensi dengan Pemda Jateng dan diterima langsung oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, di Kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan No.9 Semarang, Rabu (18/11/2020).

Tujuan Kajida kali ini adalah guna mengumpulkan data terkait kondisi kelistrikan di Jateng dan DIY, serta membahas mengenai pemanfaatan *renewable energy* untuk pembangkit listrik, dalam hal ini PLTSA Jatibarang Semarang. Dengan latar belakang inilah tim Kajida dengan dipimpin oleh Bandep Urs. Infolahta Laksma TNI Supendi, S.T mengunjungi PLN UID Jateng yang disambut oleh General Manager PLN UID Jateng dan DIY, Feby Joko Priharto beserta jajaran.



Hasil dari kunjungan ke Jateng ini nantinya akan digunakan sebagai bahan laporan “**Satu Data Indonesia**” kepada Presiden.

Feby menyampaikan dalam paparannya perihal kondisi kelistrikan di wilayah provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta yang terkini.

“Pasokan listrik saat ini cukup dengan cadangan 4.566,72 MW dan peningkatan penjualan tenaga listrik di angka rata-rata 2,2 %”, terangnya.

Lalu dilanjutkan dengan paparan tentang Pembangkit Listrik dengan Energi Baru Terbarukan yang didominasi PLTMH dan PLTSa.

“PLN ditugasi pemerintah agar bauran suplai pembangkitan pada tahun 2023, 23% nya adalah bersumber dari Pembangkitan EBT,” imbuh Feby.

Di Jawa Tengah DIY sendiri, EBT didominasi oleh PLTMH yang lokasinya tersebar, untuk PLTSa saat ini yang telah terprogress dan operasional hanya PLTSa Jatibarang 1 Semarang, sedangkan PLTSa Putri Cempo Surakarta masih dalam tahap pembangunan.

Dalam kunjungan ke PLN UID Jateng dan DIY, Bandep Urs. Infolahtha didampingi Anjak Bid. Telematika Kolonel Chb I Gusti Putu Wirejana, S.T., M.M.S.I.

Lokus terakhir yaitu pembangunan sarana hunian pariwisata (Sarhunta) di Borobudur yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat di sepanjang koridor tempat pariwisata sekaligus dapat menjadi homestay bagi wisatawan. Kegiatan kajida direncanakan akan berlangsung sampai Jumat tanggal 20 November 2020.***(np)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>



KEDEPUTIAN PENGEMBANGAN KAJI DAMPAK PANDEMI TERHADAP EKONOMI DI DAERAH JAWA TIMUR

Gresik, 19/11/20



Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) melalui Kedeputian Pengembangan melaksanakan Pengkajian Daerah (Kajida) ke Provinsi Jawa Timur (Jatim) tepatnya ke Kabupaten Gresik, Rabu (19/11/2020).

Tim kajida Setjen Wantannas yang dipimpin oleh Deputi Bidang Pengembangan Marsda TNI Dr. Sungkono, SE, M. Si diterima langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa Bersama jajarannya di kantor Gubernur Jatim.

Kajida dilaksanakan dengan maksud menggali secara langsung bagaimana upaya-upaya Pemda Jatim dalam menekan dampak yang timbul akibat pandemi Covid-19 pada berbagai sektor perekonomian dengan mengambil langkah-langkah guna mempercepat normalisasi kegiatan ekonomi pada berbagai bidang seperti penggiatan UMKM, produksi garam, produksi perikanan, dan lain-lain.

Mengingat kinerja ekonomi Jatim pada Triwulan II tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur menurut sektor lapangan usaha didukung oleh sektor industri, perdagangan dan sektor pertanian. Kontribusi untuk sektor industri sebesar 30,04 persen, sektor perdagangan 17,40 persen dan sektor pertanian 14,11 persen.



Tim kajida Kedeputian Pengembangan direncanakan akan mengunjungi beberapa sektor yang menjadi objek kajian seperti PT. Bumi Menara Internusa Surabaya, Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Sentra Tambak Garam Rakyat, Agro Wisata Batu Malang, dan Sentra UMKM Makanan/Handicraft di Malang.

Pejabat Kedeputian Pengembangan Setjen Wantannas yang turut mengikuti kajida ke Kabupaten Gresik antara lain, Pembantu Deputy Urusan Ekonomi Brigjen Pol Drs. Muhammad Nazli, M.M., Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Keuangan dan Moneter Dr. Abdul Rokhman, A.Pi, M.M., serta Analis Kebijakan Bidang Sektor Riil Kolonel Sus Drs. Agus Suharto, M.Si.***(np)



Source : <https://www.wantannas.go.id/>



TIM KAJIAN DAERAH SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL KUNKER DI BALI, LALU SAMBANGI MAKODAM IX/UDAYANA

Kamis, 26 /11/20



TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Tim Kajian Daerah Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Ketahanan Nasional melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) di Provinsi Bali.

Tim yang dipimpin langsung oleh Sekjen Wantannas Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, SH, MH., itu juga menyambangi Kodam IX/Udayana, Denpasar, Bali, pada Kamis (26/11/2020).

Kedatangan Sekjen Wantannas yang didampingi oleh Laksda TNI Gregorius Agung W.D., M.Tri (Han), Laksma TNI Drs. Eri Khasman, M.Sc., Kol. Laut (P) Jatmiko Hariyono, dan Kolonel Lek M. J Lumbantoran, S.E disambut oleh Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Candra Wijaya di Ruang Tamu Pangdam IX/Udayana.

Sekjen Wantannas Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, SH, MH., menyampaikan, maksud dan tujuan kedatangannya ke Provinsi Bali dan Kodam IX/Udayana adalah selain untuk bersilaturahmi, juga dalam rangka melaksanakan kegiatan Kajian Daerah (Kajida) secara periodik ke daerah-



daerah. "Salah satu daerah yang dipilih untuk Kajida pada periode ini adalah Provinsi Bali," kata Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro.

Sementara itu, Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Candra Wijaya yang didampingi Kapok Sahli Pangdam IX/Udy, Danrem 163/WSA, Asops Kasdam IX/Udy dan Aster Kasdam IX/Udy berharap dan mendukung penuh kegiatan Kunker Tim Kajian Daerah Sekjen Wantannas di Provinsi Bali ini dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana yang telah ditetapkan.

"Pihak Kodam IX/Udayana selalu siap membantu Tim demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan fungsi dan tugas Kodam IX/Udayana," jelasnya. (*)

<https://bali.tribunnews.com/2020/11/26/tim-kajian-daerah-setjen-dewan-ketahanan-nasional-kunker-di-bali-lalu-sambang-makodam-ixudayana>



WAGUB SUMSEL : TEPAT SEKALI KEHADIRAN TIM KAJIDA SETJEN WANTANNAS DATANG KE SUMSEL

Sumsel, 23/02/21



Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) kembali menyelenggarakan Pengkajian Daerah (Kajida) yang dilaksanakan oleh Kedeputusan Bidang Pengembangan pada Selasa sampai Jumat, 23 hingga 26 Februari 2021. Daerah tujuan Kajida adalah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Tujuan Deputy Bidang Pengembangan Marsda TNI Dr. Sungkono SE, M.Si, bersama tim melakukan kunjungan ke daerah tersebut adalah untuk mendorong sektor pertanian dan perkebunan Sumsel untuk memperkuat ketahanan nasional. Hal itu diungkapkannya dalam rencana Kajida yang bertemakan 'Revitalisasi Industri Karet Rakyat dalam rangka Penguatan Ketahanan Ekonomi Daerah di Sumsel'.

Pada saat memberikan sambutan, Marsda TNI Sungkono memaparkan tujuan berdirinya Wantannas adalah untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan gerakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Ia menambahkan, unitnya yaitu Kedeputusan Pengembangan juga bertugas memberikan saran dan masukan untuk mendongkrak perekonomian apalagi di masa pandemi.



"Kita konsen pada sektor pertanian dan perkebunan Sumsel. Yang bisa kita dorong untuk menjadi isu nasional, akan kita dukung sehingga dapat menjadi ketahanan nasional," ujar Deputi.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel Ir. H Mawardi Yahya menyebut, ketahanan pangan sangat penting bahkan sama pentingnya dengan persenjataan sebagai salah satu alat pertahanan negara.

"Ketahanan negara tidak cukup hanya senjata saja. Tetapi urusan pangan ini masalah sangat penting," ungkap Mawardi.

Menurutnya, Pemprov Sumsel terus berupaya dalam mendorong petani agar tetap tangguh di tengah pandemi COVID-19 melalui upaya penguatan ketahanan ekonomi daerah.

"Di masa pandemi ini semua sektor terdampak. Yang masih tangguh di Sumsel ini sektor pertanian. Nah ini perlu kita dorong agar terus bertahan (survive)," ungkapnya lagi.

Dia memaparkan ada sejumlah persoalan yang terjadi utamanya terkait dengan komoditi karet yang luasannya di Sumsel melebihi angka 1 juta hektare.

"Artinya tepat sekali kehadiran dari Tim Kajian Daerah Setjen Dewan Ketahanan Nasional datang ke Sumsel terkait kajian masalah karet ini," tambahnya.

Di kesempatan ini Mawardi juga menyebut selama ini warga Sumsel banyak dirugikan karena tidak memiliki pelabuhan Samudera, sebab komoditi asal Sumsel jika dibawa keluar harus melalui pelabuhan yang ada di Lampung. Akibatnya produk Sumsel tidak dikenal di luar.

"Alhamdulillah, tidak lama lagi akan segera dibangun Pelabuhan Tanjung Carat, kita yakin jika pelabuhan ini sudah selesai akan membawa dampak positif bagi daerah ini. Komoditi kita akan dapat diekspor melalui pelabuhan kita sendiri," tandasnya.

Adapun Pejabat Setjen Wantannas yang turut serta dalam Kajida ini adalah Pembantu Deputi Urusan Ekonomi Brigjen Pol. Drs. Muhammad Nazli, M.M, Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Keuangan Marsma TNI Sophian, Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Keuangan dan Moneter Dr. Abdul Rokhman, A.Pi, M.M, serta Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Sektor Riil Kolonel Sus Drs. Agus Suharto, M.Si. ***(np)



Source : <https://www.wantannas.go.id/>



JALUR MASUK NARKOTIKA MENJADI ATENSI WANTANNAS

Tanjung Selor, 25/03/21



TANJUNG SELOR – Kunjungan kerja (Kunker) Sekretaris Jenderal (Sesjen) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Laksdya TNI Harjo Susmoro ke kantor Gubernur Kaltara, Kamis (25/3) disambut Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang.

Laksdya Harjo Susmoro pun langsung melakukan audiensi dengan Gubernur Zainal, Wagub Yansen TP, serta sejumlah kepala OPD di lingkup Pemprov Kaltara di ruang rapat gubernuran. Pertemuan berlangsung kurang lebih satu jam.

Pembahasan difokuskan seputar pertahanan dan keamanan di Kaltara. Mengingat provinsi termuda ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia.

“Termasuk persoalan yang terjadi di perbatasan. Karena ini memang bagian dari strategi untuk mewujudkan kedaulatan nasional. Dan juga pembangunan di bidang kelautan, diharapkan bisa menjadi prioritas nasional,” ungkap Harjo kepada awak media usai pertemuan.

Tujuan kunjungan pula untuk menggali persoalan daerah dan dicarikan solusi melalui kebijakan tingkat nasional. “Ini yang akan kita bantu, untuk bisa



memberikan dukungan ke Kaltara. Sehingga bisa membangun wilayahnya,” terangnya.

Harjo menggarisbawahi persoalan masuknya narkoba di Tanah Air, salah satunya melalui jalur perbatasan di Kaltara. Menurutnya, hal itu bukan ancaman bagi Kaltara semata, melainkan bagi negara.

“Persoalan di Kaltara salah satunya peredaran narkoba. Kemudian yang kedua masalah alurnya jalan terorisme. Ini yang menjadi atensi. Sementara yang lain-lain sebenarnya tidak menjadi persoalan,” tuturnya.

Adapun persoalan perbatasan, menurut pria berpangkat bintang tiga di pundaknya ini, adalah kewenangan pusat dalam hal diplomasi antar negara.

“Itu persoalan diplomasi antar negara. Tapi tidak menutup kemungkinan persoalan ini masuk dalam persoalan berskala nasional,” tandasnya.

<https://rakyatkaltara.prokal.co/read/news/22841-jalur-masuk-narkoba-atensi-wantannas.html>



KEDEPUTIAN POLSTRA SETJEN WANTANNAS KAJI REALISASI MOU PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA DI KALTARA

Nunukan, 26/03/21



Kedeputian Politik dan Strategi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) melaksanakan Pengkajian Daerah (Kajida) ke Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara selama 4 (empat) hari mulai tanggal 23 sampai 26 Maret 2021.

Kunjungan ke daerah tersebut dilatarbelakangi dari sengketa perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan yang terdapat pada dua titik, di mana titik perbatasan status *quo* tersebut terletak di Sei Sumantipal dan Sei Sinapad, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara).

Perkembangan terakhir menunjukkan Indonesia dan Malaysia bersepakat soal tapal batas kedua negara di dua titik di Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Hal itu disepakati melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) antara Kementerian Dalam Negeri RI dengan Kementerian Air, Tanah, dan Sumber Asli Malaysia yang ditandatangani pada Kamis, 21 November tahun 2019 silam.



Berdasarkan latar belakang tersebut, Kedepuitan Politik dan Strategi bermaksud mencari solusi dari persoalan-persoalan yang terkait dalam mengantisipasi polarisasi sosial politik seperti realisasi MoU untuk membangun wilayah perbatasan di Nunukan-Malaysia masih lemah, masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat perbatasan, dan masih kurangnya upaya penegakan hukum yang berkeadilan.

Tim Kajida yang dipimpin langsung oleh Deputi Politik dan Strategi Irjen Pol Drs. Sukma Edi Mulyono, M.H. bersama tim berangkat ke Provinsi Kaltara pada Selasa, (23/03/2021). Sementara, Sesjen Wantannas Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H juga turut menyambangi wilayah tersebut. Kehadirannya disambut hangat oleh Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH.,M.Hum di ruang VVIP Bandara Internasional Juwata Tarakan pada Rabu,(24/03) siang.



Kedatangan Tim Kajida Setjen Wantannas tidak lain untuk mengetahui secara langsung bagaimana pengelolaan perbatasan Kaltara.

“Sinergi Pemerintah Provinsi Kaltara dengan Wantannas dalam rangka menjaga dan

mengamankan perbatasan negara,” jelasnya.

Sebagaimana sudah dijadwalkan, tim Kajida Setjen Wantannas akan melanjutkan kunjungan ke Lantamal VIII/Tarakan dan Dandim 0911/Nunukan dan Polda Kaltara. Di hari terakhir, Tim Kajida akan berkunjung ke Universitas Borneo Tarakan sebelum kembali ke Jakarta.

Pejabat Kedepuitan Polstra Setjen Wantannas yang hadri dalam kunjungan tersebut adalah Pembantu Deputi Politik Nasional Brigjen Pol Drs. Ismail Bafadal, M.H., Anjak bidang Pulahta Polnas Kolonel Inf M. Affandi, S.IP., M.M., Anjak Musjian Polnas Kolonel POM Djati Santoso S.H., M.H, serta Anjak bidang Monev Polnas Dr. Ulmi Listianingsih, S.Sos., M.M. ***(np)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>



KEDEPUTIAN SISTEM NASIONAL SETJEN WANTANNAS KAJI PEMBANGUNAN DANAU TOBA SEBAGAI DAERAH DESTINASI WISATA SUPER PRIORITAS

Sumut. 29/03/21



Sekretariat Jenderal Dewan ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) melalui Kedeputian Sistem Nasional melaksanakan kegiatan Pengkajian Daerah (Kajida) ke Provinsi Sumatra Utara (Sumut) pada Senin (29/3/2021). Kegiatan ini difokuskan untuk mendapatkan data dan fakta di lapangan terkait pembangunan Daerah Destinasi Wisata Super Prioritas Danau Toba.

Pemerintah Indonesia sejak 2011 telah berupaya untuk mewujudkan Kaldera Toba sebagai *Unesco Global Park* dan berhasil diwujudkan pada Juli 2020. Salah satunya adalah Danau Toba yang merupakan salah satu destinasi wisata super prioritas sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo pada 12 Juli 2019 silam. Kawasan Danau Toba dan sekitarnya telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (RTRN).

Penetapan kawasan Danau Toba sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas adalah hal yang dinilai wajar mengingat keindahan alam Danau Toba



yang terbentang di 7 kabupaten yakni Simalungun, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Karo dan Samosir merupakan potensi besar sebagai destinasi wisata kelas dunia.

Karena itu kawasan objek wisata Danau Toba terus dikembangkan. Pengembangan meliputi pelebaran alur Tano Ponggol dari 25 meter menjadi 80 meter, pembangunan Jembatan Tano Ponggol sepanjang 450 meter yang menghubungkan daratan Sumatera dan Pulau Samosir, dan penataan kawasan tepi danau. Pelebaran alur ini ditujukan untuk membuka akses kapal wisata yang lebih besar agar dapat mengelilingi kawasan Danau Toba.

Dalam proses pengembangan daerah Destinasi Super Prioritas Danau Toba perlu diperhatikan aspek harmonisasi dan hubungan antar kementerian dan lembaga yang terlibat. Langkah percepatan pengembangan antara lain dengan pembentukan Badan Otoritas Pariwisata (BOP).



Dalam kegiatan ini, tim kajida memfokuskan untuk mencari data terkait kendala komprehensif terkait unsur 3A (Atraksi, Amenitas, dan Aksesibilitas) untuk menjadi sumber ekonomi baru dan devisa negara, serta melihat apakah harmonisasi dan sinergitas regulasi dalam pengembangan destinasi super prioritas Danau Toba sudah maksimal atau belum.

Pejabat Setjen Wantannas yang turut serta dalam tim kajida ini yaitu Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Pemerintahan Negara Brigjen TNI Karev Marpaung, S.Sos., M.M, Staf Ahli Bidang Sosial Budaya Mayjen TNI Ana Supriatna, S.IP.,



M.Si., Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal Brigjen TNI Drs. Haris Sarjana, M.M.,M.Tr.(Han), Analis Kebijakan Bidang Kelembagaan Kolonel Tek Bonan D.O. Siagian, S.E., M.Si. (Han) serta Analis Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan dan Sarana Prasarana Kolonel Inf Parawita Agus S., S.Sos., M.Sos. ***(np)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>



SESJEN WANTANNAS KUNJUNGI PT TRINITAN UNTUK MELIHAT TEKNOLOGI STAL KARYA ANAK BANGSA

Jakarta, 21/05/21



Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, S.H., M.H., bersama Pejabat Eselon II di lingkungan Setjen Wantannas melakukan kunjungan ke PT. Trinitan Metals and Minerals Tbk (TMM) di Cicadas, Gunung Putri, Bogor, Kamis (20/5/2021).

Direktur Utama PT. TMM Petrus Tjandra menjelaskan bahwa perusahaan TMM fokus terhadap pengolahan nikel dan kobalt dalam rangka mendukung perkembangan industri baterai mobil listrik nasional.

“TMM memiliki inovasi bernama *STAL Technology*, dan kami yakin terobosan teknologi karya anak bangsa ini dapat dimanfaatkan untuk mengolah sekitar 96 juta metrik ton nikel kadar rendah yang menumpuk di Indonesia,” ucapnya.

STAL Technology merupakan teknologi pengolahan dan pemurnian logam berbasis Hidrometalurgi milik TMM yang mampu mengolah nikel kadar rendah menjadi nikel murni kelas satu dengan biaya investasi dan operasional yang bersaing.



Menurut Direktur Utama TMM, Petrus Tjandra, teknologi STAL mengaplikasikan *zero waste management* dalam pengoperasiannya, dimana limbah olahan yang dihasilkan akan dapat diproses lagi menjadi *by-product* (produk samping), dalam bentuk *iron ore* untuk digunakan oleh industri baja, maupun bentuk batu bata (*brick*) yang dapat digunakan untuk membangun jalan maupun jembatan.

Teknologi STAL ini merupakan hasil karya anak bangsa yang bekerja di bawah perusahaan TMM. Dalam pengelolaan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), STAL Teknologi dipegang oleh *expert* yang merupakan anak bangsa lulusan dari berbagai universitas terbaik di Indonesia.

“Teknologi ini dibuat sebagai kontribusi untuk negara dalam memenuhi kebutuhan nikel kelas 1 yang dikembangkan dan dikelola oleh anak bangsa. Kita mengharapkan teknologi ini dapat dimanfaatkan lebih luas sehingga berkontribusi untuk menciptakan lapangan kerja dengan harapan bisa membantu ketahanan negara,” ucapnya lagi.

Dalam kesempatan yang sama, Sesjen Wantannas Laksdya TNI Harjo Susmoro menyampaikan dukungan dan apresiasi terhadap pengembangan STAL Teknologi dan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 yaitu aman dan sejahtera.

Ia pun menyampaikan kepada para peneliti dan pengembang STAL Teknologi untuk tetap semangat berkarya. “Do the best, let God do the rest,” ucapnya mengakhiri.

Kunjungan ini juga dihadiri oleh Deputi Bidang Sistem Nasional Mayjen TNI Moh. Hatta Usmar Rukka, Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dr. Ir. Hendri Firman Windarto, M.Eng., Staf Ahli Bidang Ekonomi Mayjen TNI Dr. Rizerius Eko H., S.E., S.A.P., M.Si, Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Sosial Ir. Hadian Ananta Wardhana, CES, serta Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal Brigjen TNI Drs. Haris Sarjana, M.M., M.Tr.(Han).***(np).

Source : <https://www.wantannas.go.id/>



DORONG PERCEPATAN HERD IMMUNITY, WANTANNAS RI GELAR GERAKAN VAKSINASI

Bandung, 23/08/21



Wantannas.go.id : Pandemi Covid-19 sudah berjalan hampir dua tahun di Indonesia, namun belum ada tanda-tanda bakal mereda, justru terjadi lonjakan beberapa waktu yang lalu.

Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dan kerja keras menangani pandemi Covid-19 dengan sejumlah kebijakan, antara lain Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pemerintah juga telah menjalankan program vaksinasi dengan target 80 persen dari jumlah penduduk hingga Desember 2021. Hal ini dilakukan agar segera tercapai kekebalan kelompok atau herd immunity guna mengakhiri pandemi.

Namun, hingga saat ini program vaksinasi di seluruh Indonesia baru tercapai sekitar 27 persen. Padahal Presiden RI Joko Widodo menargetkan vaksinasi 80 persen penduduk Indonesia harus diselesaikan di bulan Desember.

Atas dasar itu, Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Wantannas RI) terdorong melakukan upaya percepatan target vaksinasi tersebut dengan menggelar Gerakan Vaksinasi.



Gerakan Vaksinasi Wantannas RI akan dipusatkan di Sentra Vaksinasi area Masjid Al Jabbar Kota Bandung, yang dimulai sejak tanggal 23 hingga 28 Agustus 2021.

"Pemerintah sudah berusaha sekuat tenaga untuk bisa segera menanggulangi pandemi Covid-19 ini namun kelihatannya masih belum optimal karena berbagai hal. Ini perlu terobosan-terobosan untuk segera menciptakan herd immunity, dengan 80 persen warga tervaksin," ujar Sekretaris Jenderal Wantannas RI Laksdya TNI Harjo Susmoro, Jumat (20/8).

Harjo mengatakan, Wantannas RI merasa terpanggil untuk ikut mencari tahu persoalan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan sehingga penanganan pandemi Covid-19, salah satunya vaksinasi, masih belum optimal.

Ia menjelaskan, Wantannas RI sebetulnya bukan lembaga operasional namun lembaga yang membantu presiden untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis.

"Jadi, Wantannas RI ini dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Keanggotaannya adalah semua kementerian, juga stakeholder terkait sebagai anggota tidak tetap. Mereka berasal dari para akademisi, tokoh, dan lain-lain," kata Harjo Susmoro.

Wantannas RI menganggap masalah pandemi Covid-19 sudah mulai mengancam stabilitas keamanan nasional sehingga perlu dibahas dan diselesaikan bersama-sama.

Menurutnya, pandemi Covid-19 perlu diselesaikan secara komprehensif oleh para stakeholder, tidak bisa secara parsial karena ini tidak hanya menyangkut persoalan kesehatan, tapi juga masalah keamanan dan ekonomi.

"Sekarang gairah hidup kita juga mulai menurun, dan itu akhirnya membahayakan keamanan nasional. Di sini Wantannas harus segera mengambil tindakan," ungkapnya.

Banyak yang harus dilakukan Wantannas, lanjut Harjo Susmoro, namun gerakan vaksinasi akan menjadi pintu masuk bagi Wantannas untuk mengetahui sejauh mana masalah di lapangan.



"Harapan kami, vaksinasi segera selesai, herd immunity segera tercipta, ekonomi kembali normal, sehingga semua akan kembali normal, pembangunan juga akan kembali berjalan," kata dia.

Jawa Barat dipilih Wantannas sebagai tempat kegiatan vaksinasi karena provinsi itu merupakan bumper dari ibukota negara, di samping itu Jawa Barat juga merupakan sentra vaksin karena di sana ada Biofarma.



"Harapan kami, kalau bumpernya ini sudah bagus maka otomatis akan menjadi contoh bagi wilayah-wilayah lain di Nusantara," jelas Harjo Susmoro.

Gerakan vaksinasi Wantannas tersebar di lebih dari 2.300 titik di Jawa Barat dengan pusat komando di Masjid Al Jabbar yang terletak di Gedebage Kota Bandung. Di lokasi ini ditargetkan 10.000 orang bisa tervaksin, sementara secara keseluruhan Wantannas menargetkan bisa memvaksin 650.000 orang.

Gerakan Vaksinasi Wantannas didukung penuh oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Forkopimda, dan stakeholder lain seperti BUMN, pihak swasta, dan sebagainya.

"Kita ajak kepedulian mereka untuk membantu masyarakat. Pemerintah secara umum sudah berbuat. Tapi dalam momentum ini kita akan menguji sejauh mana



kebersamaan dan kerja sama kita untuk saling mendukung. Kalau memang ini teruji dengan bagus, berarti sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mampu menyelesaikan pandemi. Ini ancaman kita bersama. Dibutuhkan kepedulian lingkungan dan kepedulian bersama," tandas Harjo Susmoro. (red)***(dfn)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>



TIM SETJEN WANTANNAS RI KUNKER KE PERTAMINA CILACAP

Cilacap. 26/08/21



Tim Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional RI yang dipimpin Deputi Bidang Jiandra Laksda TNI Gregorious Agung W.D., M.Tr (Han) melaksanakan kunjungan kerja di Komplek Pertamina RU IV Cilacap, Kamis (26/8/2021).

Kunjungan ini dalam rangka pengumpulan data dan informasi terkait Akselerasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pembinaan UMKM Untuk Kemandirian Ekonomi Dalam Rangka Keamanan Nasional di wilayah Kabupaten Cilacap.

Rombongan Tim Setjen Wantannas diketuai oleh Bandep Lingstranas Brigjen TNI Syachriyal E. Siregar, S.E, Sekretaris Anjak Bidang Polkamint, Budiyaingsih, S.H, dengan anggota Kolonel Inf Suherlan, Kolonel Sus Drs. H. Nurofik dan Valentinus Sudarjanto Sumito, S.I.P., M.Si.

Kedatangan rombongan disambut oleh General Manager Pertamina RU IV Cilacap Eko Sunarno, Dandim 0703 Cilacap Letkol Inf Andi Afandi, S.I.P, Pasi Intel Lanal Cilacap Mayor Laut (E) Sudianto serta para Staf manajemen Pertamina RU IV Cilacap, di Gedung Patra Graha Convention Hall, Kabupaten Cilacap.



Deputi bidang Jiandra Wantannas Laksda TNI Gregorius Agung W.D., M.Tr(Han) menjelaskan kehadiran Tim Wantanas di Kabupaten Cilacap dalam rangka kunjungan kerja ke Pertamina RU IV Cilacap sebagai sampel dalam rangka kajian Daerah / On The Spot (OTS).

Kami sampaikan disini bahwa sesuai keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekjen Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas adalah Dewan Ketahanan Nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

"Yang mana keanggotaannya terdiri dari 13 Kementerian termasuk TNI dan Polri serta Menko, kedepan ada wacana revitalisasi menjadi Dewan Keamanan Nasional seperti yang ada di luar negeri yaitu Nasional Security," jelasnya.

Tugas Setjen Wantannas adalah membina ketahanan Nasional dan membuat rumusan serta rancangan kebijakan serta strategi nasional.

Untuk itu agar tercapai dalam setiap kegiatan maka bagian kajian dan penginderaan membuat saran kepada presiden melalui Setneg tentang situasi Nasional yang sifatnya Ipoleksosbudhankam, jadi tugasnya bersifat lingkup Nasional.

Kita dalam waktu sebulan sudah membuat kegiatan yang membahas akselerasi dan implementasi, semua produk tujuannya untuk ketahanan nasional dan setelah ini menjadi naskah naskah dari semua Kementerian.

"Maka untuk melengkapi data tersebut kami memilih Kab Purbalingga, Cilacap dan Purwokerto untuk menjadi spot, sejauh mana BUMN dan BUMD dapat memberikan kontribusi kepada Negara dalam bidang Ekonomi, " tambahnya.

Sesuai amanah Kepres 24 tahun 2018 tentang gerakan masyarakat bangga menggunakan produk Indonesia dan itu wajib untuk semua lembaga dan BUMN menggunakan produk dalam negeri dan kita akan melihat apa pertanian menggunakan hal tsb, walaupun ada hambatan nantinya akan kita telaah

"Mudah mudahan Pertamina RU IV Cilacap dapat menjadi model sebagai tindak lanjut saran Presiden agar dapat lebih lagi menggunakan produk dalam negeri, dalam hal ini yang sangat penting adalah keteladanan contoh pimpinan mejadi hal krusial bagi negara untuk menggunakan produk secara bijak," tuturnya.(pendim/dn/kominfo/toeb)



Source : <https://cilacapkab.go.id/v3/tim-setjen-wantannas-ri-kunker-ke-pertamina-cilacap/>

<https://cilacap.news/ngapak/2021/08/27/tim-setjen-wantannas-ri-kunker-ke-pertamina-cilacap/>

<https://www.medianasional.id/tim-setjen-wantannas-ri-kunker-ke-pertamina-cilacap/>

<https://www.limpungnews.asia/2021/08/tim-setjen-wantannas-ri-kunker-ke.html>



WANTANNAS RI MINTA JABAR DIPASOK 15 JUTA DOSIS VAKSIN PER BULAN

Bandung, 28/08/21



BANDUNG - Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Wantannas RI) mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memasok 15 juta dosis vaksin Covid-19 per bulan ke Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Wantannas RI, Laksdya Harjo Susmoro mengatakan, dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jabar membutuhkan lebih banyak pasokan vaksin, agar kekebalan kelompok atau herd immunity yang ditargetkan Desember 2021 dapat tercapai.

"Sehingga, ini perlu kita dorong agar (herd immunity) bisa lebih cepat dalam tanda kutip secara proporsional. Sehingga *herd immunity* bisa terjadi serempak, seimbang di seluruh Indonesia," ujar Harjo dalam Gebyar Vaksinasi COVID-19 Kerja Sama Wantannas RI-Pemprov Jabar di Pelataran Masjid Al-Jabbar, Gedebage, Kota Bandung, Sabtu (28/8/2021).

Menurut Harjo, saat ini, capaian target vaksinasi COVID-19 di seluruh Indonesia sudah mencapai 28 persen. Namun, kata dia, capaian target vaksinasi di Jabar masih di bawah 28 persen.

"Nah ini yang akan kita dorong, agar seirama dengan capaian target nasional," tegasnya.



Harjo juga mengatakan, Wantannas RI telah membuktikan dukungannya kepada Jabar, salah satunya mendorong Kemenkes memasok 650.000 dosis vaksin untuk kebutuhan Gebyar Vaksinasi COVID-19 ini.

"Kita sudah buktikan hari ini kita kebutuhan vaksin sekitar 650.000 (dosis) dan kita dorong ke kementerian dan sudah terhubung 650.000. Saya coba sampaikan ke Jabar, mari kita buktikan Jabar mampu memenuhi target per hari minimal 450.000 untuk memvaksin 37 juta warga sampai Desember nanti," tuturnya.

Terbukti, lanjut Harjo, melalui inisiasi pihaknya mengakselerasi vaksinasi di Jabar, Jabar hari ini mampu meraih capaian vaksinasi hingga 500.000 dosis per hari.

"Hari ini kita buktikan bahwa Jabar mampu, sehingga dengan demikian insya Allah kita akan bantu untuk mendorong pemerintah dalam, hal ini Kemenkes untuk bisa mendistribusikan vaksin ke Jabar sesuai kemampuan (capaian vaksinasi) yang ada," katanya.

Harjo menambahkan, dorongan pihaknya kepada Kemenkes untuk memasok lebih banyak vaksin ke Jabar bukanlah hal yang luar biasa. Pasalnya, sebagai daerah penyangga Ibu Kota, percepatan vaksinasi di Jabar menjadi hal yang krusial.

"(Dorongan) Ini bukan sesuatu yang luar biasa, ini sesuatu yang wajar karena Jabar seharusnya demikian karena sebagai daerah penyangga ibu kota, inilah yang sangat penting," tandasnya.

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil yang hadir secara virtual menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Wantannas RI atas inisiasinya mengakselerasi vaksinasi di Jabar, termasuk kepada semua pihak yang telah bekerja sama demi suksesnya program vaksinasi di Jabar.

"Vaksinasi hari ini berlangsung di 2.000-an titik di Jabar secara serentak. Mari kita semangat karena kita bisa membuktikan 500 ribu dosis per hari. Dengan gotong royong, sabilulungan, kerja bersama, tidak ada yang tidak mungkin," katanya.

Menurut Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu, capaian vaksinasi yang berhasil menembus 500.000 dosis per hari menandakan bahwa sistem vaksinasi di Jabar sudah sangat siap. Selain itu, sudah tidak lagi ada alasan Jabar tidak siap memvaksin 500.000 warganya dalam satu hari.



"Capaian 500.000 dosis per hari ini menandakan sistem di Jabar sudah sangat siap lahir batin, tidak ada lagi alasan bahwa kita tidak mampu," tegas Kang Emil.

Meski begitu, tambah Kang Emil, kesiapan Jabar tersebut tak akan berarti manakala pasokan vaksin dari pemerintah pusat tidak sesuai dengan hasil perhitungan vaksin yang dibutuhkan, yakni 15 juta dosis per bulan.

"Kuncinya hanya satu, mohon doanya, Jabar butuh vaksin 15 juta dosis per bulan agar Desember bisa selesai karena sistem di Jabar sudah didesain untuk di atas 500.000 dosis per hari," kata Kang Emil.

Masih di tempat yang sama, Ketua Divisi Khusus Percepatan Vaksinasi VID-19 Jabar, Dedi Supandi menjelaskan, agar target herd immunity di Jabar dapat tercapai Desember 2021, maka Jabar harus mampu memvaksin 461.000 warganya setiap hari.

"Hari ini, kita mendapatkan pendaftar hingga 512.675 di 905 titik vaksinasi di seluruh Jawa Barat," kata Dedi.

Menurut Dedi, Kabupaten Bogor menjadi sasaran vaksinasi paling tinggi di Jabar karena populasi warganya yang hampir mencapai 5 juta orang, sedangkan sasaran vaksinasi terendah berada di Kota Banjar.

Adapun sentra vaksinasi yang disiapkan Pemprov Jabar dalam kegiatan Gebyar Vaksinasi COVID-19 ini tersebar di puskesmas (439 titik), sentra vaksin (8 titik), sentra Masjid Al Jabbar (1 titik), Industri (12 titik), Pesantren (34 titik), Desa (174 titik), mal/pusat perbelanjaan (5 titik), pokja percepatan vaksinasi di 13 KCD Pendidikan (229 titik), komunitas (3 titik)

"Tapi kita mohon kepada sahabat kami di Wantannas, kita membutuhkan suplai vaksin sampai 126 hari ke depan. Kita membutuhkan suplai vaksin 15 juta dosis vaksin atau 62,1 juta vaksin untuk dua kali penyuntikan dosis, harus ada kesamaan target di kabupaten/kota," katanya.

<https://nasional.okezone.com/read/2021/08/28/337/2462568/wantannas-ri-minta-jabar-dipasok-15-juta-dosis-vaksin-per-bulan?page=1>

<https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-352490362/wantannas-ri-dorong-kemenkes-pasok-15-juta-dosis-vaksin-per-bulan-ke-jabar>

<https://nusantara.tempo.co/nusantara/835/wantannas-ri-dorong-kemenkes-pasok-15-juta-dosis-vaksin-ke-jabar>



<https://www.beritainspiratif.com/read/64136/wantannas-ri-dorong-kemenkes-pasok-15-juta-dosis-vaksin-per-bulan-ke-jabar>



KUNJUNGAN KERJA DAERAH SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL KE PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NTB, 17/09/21



Kamis, 16 September 2021 Bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menerima kunjungan kerja Tim Dewan Ketahanan Nasional ke Provinsi NTB yang dipimpin oleh Sekjen Wantannas Laksda Dr. Ir Harjo Susmoro. Kunjungan kerja Wantannas ke Provinsi NTB adalah untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang upaya penanggulangan bencana terutama penanganan bencana gempabumi tahun 2018 oleh Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kab/Kota terdampak. Sebelum bersilaturahmi dengan Pemerintah Provinsi NTB, Tim Wantannas sudah berkunjung ke Kabupaten Lombok Utara sehari sebelumnya guna menggali informasi secara langsung di salah satu lokasi pusat terjadinya gempa bumi tahun 2018 (on the spot).

Mengawali acara pertemuan, Sekjen Wantannas menyampaikan beberapa hal tentang latar belakang, maksud dan tujuan Tim Wantannas melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2021 ini, Wantannas akan melakukan suatu kajian terhadap faktor-faktor yang



mempengaruhi kondisi ketahanan nasional termasuk penanganan bencana oleh pemerintah daerah. Selain ancaman bencana alam, saat ini kita juga sedang menghadapi suatu kondisi yang apabila tidak dapat ditangani dengan baik maka sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman bagi ketahanan nasional. Kondisi tersebut dibagi menjadi 4 oleh Sekjen yaitu era disrupsi, era post truth, pemilu serentak, dan era pasca kemenangan Taliban. Era disrupsi atau era terjadinya perubahan besar-besaran yang disebabkan oleh adanya inovasi yang mengubah sistem dan tatanan bisnis ke taraf yang lebih baru bisa mengancam ketahanan nasional jika tidak ditangani dengan baik. Pekerjaan yang dahulunya dikerjakan oleh 10 orang, dengan kemajuan teknologi cukup dikerjakan 1 orang saja, maka menjadi persoalan jika 9 orang ini tidak dapat bersaing karena tidak menguasai teknologi. Selanjutnya era post truth, artinya saat ini tidak ada lagi kebenaran. Berita hoax yang bertebaran setiap hari di media sosial mejadi ancaman perpecahan jika kita tidak mampu mengatasinya.

Era pasca kemenangan Taliban juga menjadi ancaman karena oleh sebagian orang yang berpaham radikal dapat menjadi motivasi untuk melakukan tindakan destruktif. Terakhir, sebentar lagi bangsa Indonesia akan melakukan pemilu serentak yang cukup berpotensi menimbulkan perpecahan bila sistem demokrasi lemah. Keempat kondisi tersebut ditambah kondisi penanganan bencana menjadi latar belakang, maksud dan tujuan Wantannas melakukan kunjungan kerja ke Provinsi NTB guna mendapatkan informasi yang mendalam sebagai bahan kajian untuk menyusun suatu formulasi strategis dan kebijakan nasional.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dalam sambutannya menyampaikan bahwa kondisi-kondisi yang dimaksud oleh Sekjen diatas, di Provinsi NTB masih dapat diatasi berkat adanya kerjasama antara pemerintah, TNI-Polri, Forkopimda dan masyarakat. Kerjasama yang baik dapat terwujud juga tidak terlepas dari upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam keterbukaan informasi dimana pada tahun 2020 Provinsi NTB masuk dalam 4 besar setelah Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Dengan memanfaatkan teknologi, Pemerintah Provinsi NTB berupaya membangun komunikasi 2 arah yang artinya bahwa informasi tidak hanya dari pemerintah saja melainkan juga masyarakat dapat memberikan informasi kepada pemerintah melalui Aplikasi NTB Care. Melalui aplikasi ini, berita-berita hoax yang dapat menjadi ancaman dapat diatasi. Selain NTB Care sebagai wadah



komunikasi, juga dibuat program “Jumpa Bang Zul-Rohmi” dimana masyarakat dapat berjumpa dan berkomunikasi langsung dengan pemimpinnya.

Dalam hal penanggulangan bencana, Ibu Wagub menyampaikan bahwa salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi NTB adalah Desa Tangguh Bencana. Diharapkan hingga tahun 2023, setengah atau 50 persen desa-desa yang ada di NTB adalah tangguh bencana. Selanjutnya edukasi bencana kepada masyarakat terus dilakukan dengan menjadikan isu-isu kebencanaan menjadi materi yang penting disampaikan dalam berbagai kegiatan seperti posyandu dan sebagainya. Selain itu, Aplikasi SIAGA berbasis android yang dapat di download oleh masyarakat diharapkan menjadi sarana informasi yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Diakhir acara, Sekjen Wantannas menyampaikan bahwa pada dasarnya semua jenis bencana dapat dicegah dengan mengutip QS. Surat Al-A’raf ayat 168 :

وَقَطَّعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَّمًا مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَّوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Dan Kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan; di antaranya ada orang-orang yang saleh dan ada yang tidak demikian. Dan Kami uji mereka dengan (nikmat) yang baik-baik dan (bencana) yang buruk-buruk, agar mereka kembali (kepada kebenaran).

Source : <https://bpbd.ntbprov.go.id/detailpost/kunjungan-kerja-daerah-setjen-dewan-ketahanan-nasional-ke-provinsi-nusa-tenggara-barat>



WAKIL PRESIDEN KUNJUNGI SENTRA VAKSINASI MESJID AL-JABAR YANG DISELENGGARAKAN WANTANNAS RI

Bandung, 29/09/21



Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/09/2021).

Wapres yang didampingi oleh Wakil Gubernur Jawa Barat bersama rombongan menuju Masjid Al-Jabbar, Jl. Cimincrang No.14, Kecamatan Gedebage, untuk meninjau sentra vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan oleh Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dan Tim Kolaborasi Vaksinasi. Gerakan Vaksinasi Nasional dosis kedua berlangsung sejak 23 September lalu.

Sesjen Wantannas Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr.(Opsla) dalam keterangan pers-nya menyebutkan bahwa pelaksanaan vaksinasi dosis kedua di Sentra Vaksinasi Mesjdi Al Jabbar di hari ke-enam sudah mencapai 82% dari target 10.409 peserta dan akan berakhir hari ini.

Berdasarkan data dari vaksin.kemkes.go.id, target vaksin nasional adalah sebanyak 208.265.720. Data *dashboard* per-tanggal 28 September 2021 menunjukkan persentase vaksin dosis pertama sebesar 42,83% secara nasional, namun pencapaian akumulatif tersebut tidak merata di seluruh provinsi. Daerah dengan pencapaian diatas 42,83% hanya dicapai oleh 5 provinsi sedangkan 29 provinsi lainnya dibawah target.



Untuk Provinsi Jawa Barat pelaksanaan vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 40,88% dan dosis ke-dua berada di angka 21.03%, hal ini masih berada di bawah pencapaian nasional.

Dalam laporannya kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat melaksanakan kunjungan kerja ke Sentra Vaksinasi Masjid Al Jabbar pada Rabu (29/9/021), Sesjen Wantannas Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro menyampaikan bahwa ada perbedaan data entry pada aplikasi *Pcare* (KPCPEN) dan *Smile* perbedaan data ketersediaan vaksin dan pemakaiannya sehingga menyebabkan keterlambatan ketersediaan stok vaksin. Untuk itu, Sesjen Wantannas menyarankan penggunaan satu aplikasi dalam pendataan dan validasi data sehingga pendistribusian vaksin secara proposional berdasarkan jumlah penduduk sebagai target.***(np)



Source : <https://geraijenderal.id/2021/09/29/wakil-presiden-kunjungi-sentra-vaksinasi-mesjid-al-jabar-yang-diselenggarakan-wantannas-ri/>

<https://setkab.go.id/kunjungan-kerja-ke-bandung-wapres-tinjau-sentra-vaksinasi-wantannas/>



<https://www.beritainspiratif.com/read/64425/wapres-tinjau-sentra-vaksinasi-wantannas-di-masjid-al-jabbar-bandung>

**KUNJUNGI KOTA KEDIRI, WANTANNAS BEBER
KESIAPAN PEMILU DAN PILKADA 2024**

Kediri, 26/10/21



Pemerintah Kota Kediri melalui Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menerima kunjungan dari Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) RI. Bertempat di Ruang Joyoboyo, kunjungan tersebut terselenggara untuk memotret persiapan Pemilu dan Pilkada serentak di Kota Kediri tahun 2024.

Menghadapi Pemilu dan Pilkada, KPU Kota Kediri telah mempersiapkan sejumlah aspek, baik secara kelembagaan maupun SDM yang dimilikinya.

Pusporini Endah Palupi, Komisioner KPU Kota Kediri menjelaskan, menghadapi Pemilu dan Pilkada yang akan datang, tentunya akan menimbulkan kerawanan-kerawanan. Oleh karena itu, KPU bersama Bawaslu telah mempersiapkan langkah preventif guna mencegah kerawanan yang memungkinkan terjadi.

“Kami sudah sering berkoordinasi dengan stakeholder untuk meminta feedback terkait rencana Pemilu. Selain berkoordinasi, hal lain yang telah kita persiapkan yakni membekali semua personel KPU dengan informasi, berita, kebijakan terkini supaya kalau ada pihak yang membutuhkan informasi bisa langsung terjawab. Jadi tidak melulu melalui komisioner,” jelas Puspo.

Dalam mewujudkan pesta demokrasi tahun 2024, diperlukan sinergitas berbagai lembaga, bukan hanya KPU dan Bawaslu. Salah satunya ialah pihak pemerintah. Pemerintah Kota Kediri melalui Kesbangpol menjelaskan perannya dalam menyambut pesta demokrasi mendatang yakni sebagai fasilitator yang membantu KPU dan Bawaslu Kota Kediri dalam menyukseskan hajat politik.



“Yang kami lakukan sebagai fasilitator adalah menyediakan sarana dan prasarana, baik fisik maupun non fisik, serta nanti menangani hibah kepada KPU dan Bawaslu terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2024,” papar Bagus Himawan, Kepala Kesbangpol Kota Kediri.



Berdasarkan pemaparan data oleh KPU, Bawaslu, serta Pemkot Kediri, Wantannas menilai KPU dan Bawaslu Kota Kediri telah mempersiapkan diri melalui sumber daya yang dimiliki dengan baik.

“Secara khusus, KPU dan Bawaslu telah mempersiapkan perkiraan dan keadaan, serta antisipasi dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024. Kami dari Dewan Ketahanan Nasional berusaha menggali dan mendorong kesiapan itu. Perkiraan dan antisipasi yang telah disusun persis dengan yang kita rencanakan,” terang Brigjen Pol. Ismail Bafadal, Pembantu Deputi Bidang Politik Nasional Dewan Ketahanan Nasional RI.

Selanjutnya, Wantannas akan mencatat kondisi-kondisi di Kota Kediri untuk kemudian dihimpun menjadi bahan yang akan disampaikan kepada Presiden RI selaku Ketua Wantannas sebagai materi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.



“Kita harap Kota Kediri dan Indonesia pada umumnya bisa melaksanakan Pemilu dan Pemilukada tahun 2024 berjalan aman dan baik. Selain itu kita berharap agar pandemi ini tidak berlanjut, sehingga kesiapan kita bisa lebih maksimal,” tutup Brigjen Pol Ismail. **[nm/suf]**

Source : <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/kunjungi-kota-kediri-wantannas-beber-kesiapan-pemilu-dan-pilkada-2024/>

<https://bangsaonline.com/berita/97350/kunjungi-kota-kediri-wantannas-tinjau->

https://www.satukanegeri.co.id/post/142353/kunjungi_kota_kediri_wantannas_ungkap_kesiapan_pemilu_dan_pilkada_2024



DEWAN KETAHANAN NASIONAL TEMUI WALI NANGGROE DI GEDUNG PUTIH

Banda Aceh, 15/11/21



Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Republik Indonesia (RI) melakukan pertemuan dengan Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Al Haythar untuk membahas sejumlah persoalan MoU Helsinki yang sampai saat ini belum terimplementasi dengan baik.

Pada pertemuan yang berlangsung Senin 15 November 2021 di Meuligoe Wali Nanggroe, hadir langsung Sekjend Wantannas Laksda TNI Harjo Susmoro didampingi Deputi Pengembangan Wantannas Marsma TNI Maman Suherman dan Pembantu Deputi Maulana, S.H, M.H. Sementara Wali Nanggroe didampingi unsur Komisi VI DPRA Tgk. Mawardi, Staf Khusus H. Kamaruddin Abu Bakar (Abu Razak), DR. M Raviq, dan DR. H. Rustam Efendi.

Kemudian unsur Tuha Peut Wali Nanggroe Sulaiman Abda dan Prof. Dr. Syahrizal Abbas, serta Katibul Wali Nanggroe Azwardi AP M.Si. “Masih ada beberapa poin dari perjanjian MoU Helsinki yang belum terimplementasi dengan baik,” kata Wali Nanggroe dalam pertemuan tersebut.

Perlu diketahui, pertemuan antara Wantannas dengan Wali Nanggroe kali ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya pada 21 September lalu di tempat yang sama. Sekjend Wantannas Laksda TNI Harjo Susmoro usai



pertemuan mengatakan, kehadiran pihaknya menemui Wali Nanggroe untuk mencari solusi dari persoalan-persoalan implementasi MoU Helsinki yang belum terselesaikan.

Salah satu usulan Laksda TNI Harjo dari hasil pertemuan tersebut adalah, perlunya dibentuk Desk Aceh. “Nanti akan dibahas lebih lanjut untuk dicarikan jalan keluar. Seharusnya semuanya bisa diselesaikan dengan baik,” kata Sekjend Wantannas.

Source : <https://www.acehportal.com/>



KODAM XVII/CENDERAWASIH TERIMA KUNJUNGAN SEKJEN WANTANNAS

Jayapura, 25/11/21



progresifjaya.id, JAYAPURA – Kasdam XVII/Cenderawasih, Brigjen TNI Bambang Trisnohadi yang mewakili Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, M.A menerima kunjungan Sekjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, S.H, M.H., M.Tr. Opsla, di Ruang Cycloop, Makodam XVII/Cenderawasih, Jayapura, Kamis (25/11/2021).

Dalam kunjungan tersebut, Sekjen Wantannas menjelaskan, bahwa Wantannas merupakan lembaga yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Adapun maksud kedatangannya bersama rombongan adalah untuk melihat kondisi dan perkembangan situasi di wilayah Papua serta mempelajari permasalahan yang terjadi.

Hal tersebut sejalan dengan tugas dari Wantannas yaitu memberikan saran dan masukan dalam merancang dan menyusun kebijakan strategis kepada Presiden RI.



Lebih lanjut disampaikan terkait kunjungan ke Kodam XVII/Cenderawasih adalah bertujuan untuk berdiskusi mengenai perkembangan situasi Papua ditinjau dari perspektif keamanan.

Pada kesempatan tersebut, Kasdam XVII/Cenderawasih menjelaskan bahwa Kodam XVII/Cenderawasih baru saja menerima kunjungan kerja Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman S.E., M.M.

Selanjutnya disampaikan bahwa di masa mendatang pola operasi satuan penugasan di Provinsi Papua akan lebih mengedepankan pembinaan teritorial, sehingga hal tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan permasalahan di Papua.

Turut hadir Irdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Wachid Apriliyanto, Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Deki Zulkarnaen dan Asops Kasdam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Verianto Napitupulu, S. Sos.

<https://progresifjaya.id/kodam-xvii-cenderawasih-terima-kunjungan-sekjen-wantannas/>

<https://kodam17cenderawasih-tniad.mil.id/kodam-xvii-cenderawasih-terima-kunjungan-sekjen-dewan-ketahanan-nasional/>

<https://tni.mil.id/view-206728-kodam-xvii-cenderawasih-terima-kunjungan-sekjen-dewan-ketahanan-nasional.html>

<https://geraijenderal.id/2021/11/26/kodam-xvii-cenderawasih-terima-kunjungan-sekjen-wantannas/>

<https://warnasulsel.com/kodam-xvii-cenderawasih/>



WANTANNAS KUNJUNGI KOTA CIREBON TERKAIT MANAJEMEN PENGELOLAAN SAMPAH DAN LINGKUNGAN HIDUP

Cirebon, 25/11/21



Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis menerima Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Republik Indonesia (RI) di ruang Kanigaran, Balai Kota Cirebon, Rabu (24/11). Dalam pertemuan tersebut, Azis menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon telah melakukan berbagai upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

“Kunjungan dewan ketahanan nasional yang dipimpin oleh Mayjen TNI Hatta ini berkah buat kita. Dengan kunjungan ini Pemda Kota Cirebon bisa mendapatkan banyak masukan untuk penanggulangan perubahan iklim,” ujar Azis.

Menurut Azis, dengan kunjungan ini, permasalahan yang terjadi di Kota Cirebon bisa didengar langsung oleh mereka. Sehingga bisa langsung disampaikan kepada pemerintah pusat.

Pada kesempatan itu Wali Kota juga menjelaskan sudah banyak yang dilakukan Pemda Kota Cirebon dalam bidang lingkungan hidup, sampah hingga perubahan



iklim. Saat ini, penerimaan hibah pengolahan sampah dari pemerintah Jerman juga tengah berproses.

Sementara itu, Mayjen TNI Moh Hatta Usmar Rukka, Deputy Bidang sistem Nasional Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) menjelaskan kunjungan kerja mereka menyisir 3 daerah di pantura. Masing-masing Kota Cirebon, Pekalongan dan Demak. Tujuannya untuk mendapatkan data dan fakta di lapangan.

“Tujuan dari kegiatan ini untuk mendapatkan data dan fakta di lapangan. Kami melakukan kunjungan di tiga daerah di wilayah Pantura, Cirebon, Pekalongan dan Demak,” ujarnya.

Dari data tersebut, lanjut Hatta, akan dibahas dalam sidang untuk merancang strategi nasional. Fenomena lingkungan hidup saat ini luar biasa. Bahkan bisa menjadi ancaman faktual terhadap keamanan nasional.

“Jika tidak segera ditanggulangi maka berdampak pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu turun ke lapangan selama dua hari untuk membuktikan kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat,” tuturnya.

Kedatangan mereka diantaranya untuk melihat manajemen pengolahan sampah dan penanggulangan lingkungan hidup yang sudah dilakukan di Kota Cirebon. Kota Cirebon memiliki visi Sehat kita wujudkan Kota Cirebon sebagai kota kreatif berbasis budaya dan sejarah.

Pembangunan di bidang lingkungan hidup masuk pada misi ketiga yaitu meningkatkan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana umum berwawasan lingkungan. Misi ini diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Adapun upaya terkait pengendalian dampak perubahan iklim dan sampah yang dilakukan di antaranya program kampung iklim (proklim) yang sudah dilakukan di 14 RW. Proklim ini juga sudah diarahkan ke semua RW di Kota Cirebon. Melalui program dari Kementerian Lingkungan Hidup ini RW 08 Merbabu Asih, Kelurahan Larangan menjadi satu-satunya daerah yang mendapatkan tropi proklim lestari pada 2018 lalu.

Untuk program pelayanan persampahan dan kebersihan, Kota Cirebon di antaranya memiliki tempat pembuangan akhir (TPA) Kopiluhur dengan luas 4,2 hektar, tempat pembuangan sampah sementara yang aktif sebanyak 17 unit serta TPS mobile sebanyak 2 unit. Untuk mengurangi volume sampah langsung dari



sumbernya, Kota Cirebon sudah memiliki 25 unit bank sampah serta pusat daur ulang di Dukuh Semar dengan kapasitas 5 ton perhari.

Sedangkan aksi adaptasi perubahan iklim penanganan longsor dan banjir telah dibuatkan lubang biopori sebanyak 310 titik dan sumur resapan di 27 titik. Penampungan air hujan (PAH) juga telah dibuat beberapa warga lengkap dengan sumur penampungnya. Di kawasan pesisir telah dilakukan penanaman mangrove hingga memisahkan sampah organik dan non organik di kawasan pesisir Kota Cirebon. (AC212)

Source : <https://aboutcirebon.id/wantannas-kunjungi-kota-cirebon-terkait-manajemen-pengelolaan-sampah-dan-lingkungan-hidup/>





SESJEN WANTANNAS KUNJUNGI YAHUKIMO, PAPUA

Yahukimo, 26/11/21



Perhatian pemerintah pusat terhadap Papua terus dilakukan, salah satunya melalui kunjungan kerja *on the spot* Dewan Ketahanan Nasional. Dalam kunjungannya di Jayapura, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, S.H, M.H., M.Tr. Opsla dan jajarannya bertemu dengan Forkompimda Papua/Provinsi Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, M.A yang diwakili Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Bambang Trisnohadi, Kabinda Papua dan akademisi.

Selanjutnya jajaran Wantannas RI melaksanakan Kunker di daerah pegunungan Papua, Kabupaten Yahukimo.

Kunjungan ke Yahukimo dilakukan berdasarkan hasil diskusi dan pertimbangan beberapa aspek oleh Sesjen Wantannas RI dan Staf Khusus Sesjen Wantannas RI Bidang Penguatan Dan Antar Lembaga, Taviota Bay.

Kunjungan ke Dekai Ibu Kota Kabupaten Yahukimo selanjutnya dilakukan pada, Jumat (26/11/2021).

Kunjungan itu dapat dikatakan nekat. Bagaimana tidak, kunker ke Yahukimo dilakukan hanya beberapa hari setelah adanya penyerangan Koramil Suru-Suru dan pembakaran kios-kios di Distrik Suru -suru, Kabupaten Yahukimo.



Selain Sesjen Harjo Susmoro dan Staf khusus Wantannas, hadir juga Deputy Politik dan Strategi (Polstra) Irjen Pol. Sukma Edi dan Bantuan Deputy (Bandep) Limpemneg Brigjen TNI Affandi.

Wantannas RI yang merupakan lembaga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden itu merasa perlu mengunjungi Papua.

Menariknya, rombongan Sesjen Wantannas disambut hangat oleh warga Yahukimo begitu tiba di Kota Dekai. Mereka bahkan disambut dengan tarian adat oleh beberapa kepala suku di wilayah itu.

Kepada Wartawan di Jayapura, Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro mengatakan, kunker tersebut dilaksanakan dalam rangka menyusun rancangan kebijakan strategis Wantannas RI yang nantinya diusulkan kepada Presiden RI.

“Kita mencoba datang ke Papua untuk menyusun rancangan strategis, nantinya diusulkan ke Presiden Jokowi. Ini penting untuk bagaimana penyelesaian konflik di daerah,” ujar Sesjen Wantannas, Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, Sabtu (27/11/2021).

Sehari berada di Yahukimo, jajaran Wantannas melakukan pertemuan dengan Forkompimda Yahukimo di Kodim dan Polres Yahukimo. Pertemuan dilaksanakan termasuk para kepala suku, bahkan mantan anggota Organisasi Papua Merdeka.

Dalam pertemuan itu, Sesjen Wantannas RI meminta sarana dan prasarana TNI/Polri diperhatikan. Termasuk sarana dan prasarana Kodim 1715 Yahukimo, terutama hunian atau rumah tinggal prajurit yang bertugas. “Kami Wantannas RI mencoba datang langsung ke lokasi rawan ini, untuk melihat situasi sesungguhnya seperti apa. “Selama kunjungan, keadaan situasi Yahukimo aman dan kondusif. Namun, tak menutup kemungkinan keadaan bisa berbalik setelah kami berkunjung, harapannya bisa terus aman,” katanya.

Ia berpendapat, konflik di Papua didominasi persoalan internal di Papua. Untuk itu, ia menyarankan adanya pendekatan persuasif atau pun pendekatan kesejahteraan bagi Papua.

Ia juga menyoroti pengelolaan Dana Otsus di daerah yang perlu diperhatikan. “Karena rakyat merasa tidak mendapatkan hasil yang signifikan,” ungkapnya.



Dalam pertemuan dengan beberapa tokoh adat, Sesjen Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro juga mendengar curahan hati para kepala suku.

Dikatakan, warga asli daerah itu ingin Yahukimo aman dan damai. Hanya saja, beberapa kelompok luar dan bukan warga asli, selalu mengganggu keamanan di Yahukimo.

“Mereka yang mengacau itu bukan warga asli Yahukimo, tapi dari daerah lain, dari wilayah lain yang datang melakukan tindakan kekerasan,” ungkapnya lagi.

**



Source : <https://papuainside.com/pasca-memas-wantannas-ri-malah-kunjungi-yahukimo/>

<https://papuainside.com/pasca-memas-wantannas-ri-malah-kunjungi-yahukimo/>

<https://beritapapua.id/sesjen-wantannas-ri-melakukan-kunjungan-kerja-ke-jayapura/>



SESJEN WANTANNAS : MASALAH KEAMANAN NASIONAL ITU SANGAT KOMPLEKS, HARUS DITANGANI SECARA KOMPREHENSIF DAN HOLISTIK

Poso, 13/12/21



Wantannas.go.id : Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, SH, MH, M.Tr Opls melaksanakan kunjungan kerja ke Poso, Sulawesi Tengah, Senin hingga Rabu 13-15 Desember 2021.

Dalam kunjungannya tersebut, Sesjen Wantannas memaparkan tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Nasional sebagai lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas Wantannas diantaranya adalah memberi saran dan masukan kepada Presiden terkait kebijakan – kebijakan pada sektor Ipoleksosbudhankam. Wantannas juga memiliki kewenangan tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

“Masalah keamanan nasional itu sangat kompleks, jadi harus ditangani secara komprehensif dan holistik. Perkembangan lingkungan strategis yang berkembang senantiasa membawa perubahan terhadap spektrum ancaman yang juga semakin kompleks dan berimplikasi terhadap terancamnya eksistensi negara”, ujar Sesjen.



Selain itu, Sesjen Wantannas juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan dan kesatuan bangsa.

“Terima kasih, pemerintah daerah (Sulawesi Tengah) sudah berbuat yang signifikan untuk menjaganya,” tuturnya.

Kunjungan kerja Sesjen Wantannas ke Poso tidak lain adalah untuk mencari informasi terkait konflik yang terjadi di Poso serta kemungkinan penyelesaian secara permanen di daerah sasaran, baik dari pejabat daerah, TNI maupun Polri.

Adapun wilayah-wilayah yang menjadi target untuk disanbangi diantaranya adalah kantor Gubernur dan Polda Sulawesi Tengah.

Dalam kunjungan tersebut, Sesjen Wantannas didampingi oleh Bandep Urs. Sosbud Kedepuasan Pengembangan Brigjen TNI Yudha Fitri.***(dfn)



Source : <https://www.wantannas.go.id/>



KUNJUNGI POSKOTIS, SATGAS MADAGO RAYA DAPAT SUNTIKAN SEMANGAT DARI SETJEN WANTANNAS RI

Poso, 14/12/21



POSO, Dalam rangkaian kunjungannya di Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Wantannas RI) berkesempatan mengunjungi Pos Komando Taktis (Poskotis) Operasi Madagao Raya di Tokorondo Kabupaten Poso, Selasa (14/12/2021).

Dipimpin langsung Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr.Opsla. selaku Sekreatis Jenderal (Setjen) Wantannas RI dan didampingi Brigjen TNI Farid Makruf selaku Wakil PJKO Madago Raya diterima oleh KBP Joko Sulisty, SIK selaku Kasatgas Tindak Ops Madago Raya serta beberapa pejabat operasi Madago Raya.

Kunjungan Setjen Wantannas RI ke Poskotis Operasi Madago Raya merupakan rangkaian kunjungannya di Kabupaten Poso setelah sebelumnya bertemu dengan Pemerintah daerah Poso dan bertatap muka dengan tokoh agama serta mantan Napiter Poso, Jelas AKBP Bronto Budiyono selaku Wakasatgas Humas Ops Madago Raya di Poso, Rabu (15/12/2021).

Kunjungan Setjen Wantannas RI di Poskotis Ops Madago Raya selain untuk melihat dari dekat kondisi personil dan mendengar langsung perkembangan operasi, sekaligus guna memberikan support kepada seluruh pelaksana operasi Madago Raya, ungkap Bronto.



Untuk diketahui Wantannas RI mempunyai fungsi melakukan perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan, kesatuan, kelangsungan hidup bangsa dan negara, jelasnya.

Sehingga perkembangan situasi dan kondisi Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Poso yang memiliki sejarah konflik Agama tahun 1998 turut menjadi prioritas dan perhatian Wantannas RI, tutup Wakasatgas Humas ini.

<https://tribatanews.kedirikota.jatim.polri.go.id/15/12/2021/kunjungi-poskotis-satgas-madago-roya-dapat-suntikan-semangat-dari-setjen-wantannas-ri/>



NARASUMBER

Sesjen Wantannas banyak diberi kepercayaan menjadi narasumber atau pembicara dalam banyak acara atau seminar baik skala kecil maupun besar dan memberikan materi seputar ketahanan dan keamanan nasional, mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama mendukung program pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, serta mengajak masyarakat Indonesia dalam gerakan bela negara hingga seminar kepemimpinan nasional dan masih banyak lagi.



SESJEN WANTANNAS KEPADA PELAJAR : BELA NEGARA ITU TIDAK IKUT DEMO

Tegal, 20/11/20



Tegal, Gatra.com- Bela negara selama ini dianggap terkait dengan masalah pertahanan dan keamanan. Padahal bela negara juga meliputi seluruh aspek kehidupan sehingga perlu ditanamkan kepada semua kalangan masyarakat.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Laksdya TNI Harjo Susmoro usai mengisi seminar aksi bela negara yang digelar Ikatan Alumni SMAN 1 Tegal (Ikasma) di SMAN 1 Tegal, Jawa Tengah, Kamis (19/11).

"Bela negara dalam konteks kekinian menyangkut seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dari masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Jadi tidak melulu sifatnya tempur," kata Harjo.

Menurut Harjo, selama ini bela negara dianggap berkaitan dengan masalah pertahanan karena pada awalnya memang diarahkan kepada kemungkinan lepasnya daerah karena ancaman separatisme maupun ancaman lainnya. Namun saat ini, kesadaran bela negara perlu ditanamkan dalam setiap aktivitas sehari-hari masyarakat karena meliputi seluruh aspek kehidupan.



"Misalnya siswa bela negara itu belajar dengan baik, serius, tidak ikut demo. Bagaimana tukang ojek, tukang becak bela negara, yaitu jadilah tukang becak, tukang ojek yang baik, layani dengan baik jangan nipu. Bagaimana petani yang bela negara, bekerjalah dengan baik untuk menghasilkan yang baik," ujarnya.

Harjo mengatakan, pembinaan bela negara yang dilakukan pihaknya di SMAN 1 Tegal juga sebagai salah satu upaya untuk menghindari disintegrasi bangsa. "Kesadaran bela negara ini perlu dimiliki semua masyarakat," ujar dia.

Sementara itu, Ketua Ikasma, Tafakurrozak mengatakan, seminar bela negara yang bekerjasama dengan Wantannas digelar untuk menumbuhkan cinta tanah air. "Pesertanya ada 30 orang dari berbagai profesi. Ada pedagang, guru, nelayan, petani dan siswa. Karena bela negara ini bukan terkait perang saja, tapi juga meliputi sosial, ekonomi, dan budaya," ujarnya.

Tafakurrozak menambahkan, seminar bela negara merupakan rangkaian kegiatan bakti sosial yang digelar Ikasma mulai 17 November hingga 28 Desember mendatang.

<https://www.gatra.com/news-495918-gaya-hidup-pelajar-bela-negara-itu-tidak-ikut-demo.html>



ANJAK BID. PENGEMBANGAN BELNEG DITUNJUK SEBAGAI NARASUMBER PEMBEKALAN RAKYAT TERLATIH

Jakarta, 10/11/20



Analisis Kebijakan Bidang Pengembangan Bela Negara Kedepan Pengembangan Setjen Wantannas Kolonel Inf. Judi Paragina Firdaus, M.Sc. menjadi Narasumber dalam acara Pembekalan Kader Rakyat Terlatih Dalam Rangka Membantu Penanganan dan Pencegahan Pandemi Covid-19 TA 2020 yang dilaksanakan oleh Markas Besar TNI Angkatan Darat dengan tema “Aku

Pahlawan Masa Kini”. Kegiatan berlangsung di Pusat Pendidikan Zeni TNI – AD, Jalan Jendral Sudirman No.35, Bogor, Selasa (10/11/2020). Kegiatan dijadwalkan dilaksanakan selama dua hari, 11 hingga 12 November 2020 dengan jumlah total peserta sebanyak 200 orang Pelajar Sekolah Menengah Atas/Mahasiswa yang memiliki sertifikat Kader Bela Negara (KBN), Pramuka dan Resimen Mahasiswa (Menwa).

Tujuan diselenggarakannya acara ini adalah untuk membantu penanganan dan pencegahan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 agar dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Dalam kesempatan tersebut, Kolonel Inf Judi Paragina Firdaus, M.Sc. membawakan materi terkait bela negara.

Sasaran yang diharapkan dapat dicapai dari kegiatan ini adalah terwujudnya masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kesadaran dalam bela negara serta terwujudnya masyarakat yang memiliki jiwa nasionalisme, patriotism, peduli dan cinta tanah air.



Turut hadir juga sebagai narasumber lainnya yaitu Kepala Unit Forensik RSPAD Letkol Ckm (K) drg. Tiwi Ambarwati, Sp.Of.,MM, dan Kabagkesprom dan Dalkit Subditbinyankes Puskesad Letkol Ckm dr. Seno Rusmaji. ***(np)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>





SESJEN WANTANNAS : KITA MELAKSANAKAN BELA NEGARA UNTUK MENJAMIN KELANGSUNGAN HIDUP BERBANGSA DAN BERNEGARA

Bandung, 25/11/20



Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H. menjadi narasumber pada Kuliah Umum Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan yang diselenggarakan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Rabu (25/11/2020).

Kegiatan yang berlangsung secara tatap muka dan *virtual zoom* ini mengambil tema “Sinergitas Antar Elemen Bangsa dalam Membentuk Jati Diri Indonesia”, UPI mengundang secara khusus Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H beserta beberapa tokoh penting lainnya seperti Penulis Buku Wawacan Pancasila Prof. Yudi Latif, M.A., PH.D, Wakil Rektor UPI Bidang Perencanaan, Organisasi dan Sistem Informasi Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.PD., M.A.

Sesjen Wantannas memaparkan tema Aksi Bela Negara untuk Ketahanan Nasional Melalui Sinergi Lintas Sektoral. Dihadapan audiensi, Sesjen menjelaskan alasan mengapa kita sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk membela negara.



Kondisi geografis Indonesia yang 3/4 luasnya adalah lautan, sehingga membuat Indonesia menjadi negara kepulauan yang terbesar di dunia. Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis yaitu berada diantara dua benua dan dua samudra yang menjadi persilangan komunikasi dan perdagangan.

Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah dan memiliki jumlah penduduk yang besar, sehingga posisi ini menempatkan Indonesia di posisi yang banyak menjadi incaran negara-negara lain untuk menguasai potensi dan kekayaan alam yang ada di Indonesia.

“Ini tantangan buat anak-anak muda, kalau tidak dikelola dengan baik akan membuat kita hanya sebagai pasar tempat orang jualan. Kita harus mampu memanfaatkan sumber kekayaan alam yang ada, jangan sampai orang lain yang menikmati. Karena kondisi sekarang orang pintar banyak tapi orang cerdas jumlahnya sedikit, orang-orang pintar tadi tidak menggunakan kependaiannya itu untuk kepentingan orang banyak untuk mengelola keberagaman yang ada di Indonesia,” papar Sesjen.

Indonesia negara yang besar dan tentu akan ada ancaman yang harus dihadapi seperti konflik perbatasan, separatisme, terorisme, radikalisme, bencana alam, dan kejahatan lintas negara. Tidak hanya itu, ada pula tantangan bagi Indonesia seperti menegakkan kedaulatan dan hukum, stabilitas keamanan, pengelolaan sumber daya alam untuk mencapai *prosperity*, konektivitas dengan menjamin keutuhan NKRI, dan tercapainya tujuan dan kepentingan nasional.

Laksdya TNI Harjo Susmoro juga menjelaskan bahwa setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban untuk bela negara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Upaya bela negara tertuang pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 bahwa setiap warga negara memiliki sikap dan perilaku yang dijiwai dengan kecintaan kepada NKRI untuk menjamin kelangsungan hidup serta pengabdian bagi bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban.

“Kita melaksanakan bela negara untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dan upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar warga negara, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran membela negara. Termasuk mahasiswa juga memiliki



peran penting dalam melaksanakan aksi bela negara dengan porsinya masing-masing dan melaksanakannya dengan sebaik mungkin,” ucap Sesjen.

Sesjen Wantannas menambahkan, kampus berperan sebagai Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan cara melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian masyarakat untuk membentuk jiwa pengabdian dan peduli yang sesuai dengan bidang pendidikannya masing-masing.

“Kita mengharapkan kampus dapat melaksanakan banyak penelitian yang nantinya menjadi bahan ajar untuk bisa dikembangkan, di mana ini menjadi pengabdian kepada masyarakat. Membangun kehidupan yang baik generasi suatu bangsa salah satunya adalah dari pendidikan keluarga,” ucapnya lagi.

Tujuan membela negara adalah agar negara memiliki kedaulatan yang mempunyai cita-cita nasional yaitu merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, serta tujuan nasional yang melindungi dan mensejahterakan rakyat serta menjaga perdamaian dunia. Demikian disampaikan Sesjen Wantannas sebagai penutup paparan.***(np)

Source : <https://mascipol.id/headline/sesjen-wantannas-kita-melaksanakan-bela-negara-untuk-menjamin-kelangsungan-hidup-berbangsa-dan-bernegara>





DEPUTI BID. PENGEMBANGAN : PEMAHAMAN DASAR NILAI BELA NEGARA HARUS DITANAMKAN SEDINI MUNGKIN SEBAGAI NUTRISI DALAM MEMBELA NEGARA

Jakarta, 25/11/20



Deputi Bidang Pengembangan Setjen Wantannas Marsda TNI Dr. Sungkono, SE, M.Si hadir sebagai Pembicara dalam Seminar *Online* (Webinar) bertemakan Bela Negara untuk Kemakmuran Rakyat yang diselenggarakan oleh komunitas Relawan Bela Negara Indonesia (RBNI), bertempat di Kantor Setjen Wantannas Ruang Rapat *Situation Room* Lantai V Gedung B, Rabu (25/11/2020).

Acara yang dimoderatori oleh Wisesa Utama Bela Negara, Dr. Ade Iva Murty, M.Psi, juga menghadirkan pembicara lain diantaranya Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan Kemeko Bidang Perekonomian Chairul Saleh.

Marsda TNI Dr. Sungkono, SE, M.Si selaku Deputi Bidang Pengembangan Setjen Wantannas mengusung materi **Konsep Bela Negara untuk Kemakmuran Rakyat**.

“Mengapa negara harus dibela? Karena Indonesia adalah negara besar yang bahkan hampir menyamai luas negara Amerika Serikat, dengan segala



kelebihannya yang bisa dilihat dari sisi geografis, ekonomi, bahkan kimiawi,” ujar Deputy mengawali paparannya.

“Negara dibentuk dengan cita-cita merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, juga dengan tujuan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah serta memajukan kesejahteraan umum. Dengan alasan itulah kenapa negara harus dibela,” ujarnya lagi.

Lebih dalam Deputy mengatakan, pemahaman dasar nilai bela negara perlu ditanamkan sedini mungkin sebagai nutrisi dalam membela negara.



Dalam hal kemakmuran rakyat, perlu diciptakan sinergitas antara pihak-pihak yang terkait dan berperan langsung. Oleh karenanya, harus ada “kunci” yang mampu menyatukan seluruh unsur. “Kunci” tersebut selama ini kita kenal dengan sebutan *smart power* atau sinergi pentahelix yang efektif dalam mengkolaborasikan lima unsur yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat dan media, yang mana kelima unsur ini saling bersinergi dengan segala keahlian yang dimiliki masing-masing.

Namun, untuk bisa menyatukan kelima unsur tersebut, diperlukan *mindset*, hati dan niat yang sama demi tercapainya semua tujuan.



Agar tujuan bela negara dapat tercapai, harus ada rekomendasi yang mampu membangun generasi muda yang unggul dengan penguatan karakter moral, kinerja dan karakter interpreneur, melalui penguatan talenta dan kompetensi, literasi ilmu pengetahuan dan teknologi, literasi kemanusiaan, big data serta literasi lainnya.

Pada acara yang sama, Chairul Saleh, Pembicara dari Kemenko Bid. Ekon menjelaskan keterkaitan Sumber Daya Alam (SDA) yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

“SDA dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dalam konteks bela negara. Sedangkan dalam konteks pemerintah, program dan strategis dibutuhkan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi rakyat,” jelas Chairul Saleh.

Seminar Online juga dihadiri Pejabat Setjen Wantannas seperti Deputy Bid. Sisnas Mayjen TNI Made Datrawan, S.IP, Sahli Bid. Ekonomi Mayjen TNI Moh. Hatta Usmar Rukka, Bandep Urs. Ekonomi Brigjen Pol. Drs. Muhammad Nazli, MM, Bandep Urs. Sosbud Brigjen TNI Heru Triyanto, S.Sos, juga dari PT. I Love My Country Indonesia (ILMCI).***(dfn)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>



ANJAK BANG BELNEG KOLONEL INF. JUDI PARAGINA FIRDAUS, M.SC KEMBALI MENJADI NARASUMBER UNTUK PEMBEKALAN KADER RATIH

Jakarta, 11/12/20



Kolonel Inf. Judi Paragina Firdaus, M.Sc Pejabat Eselon II yang memangku jabatan sebagai Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Bela Negara (Anjak Bang Belneg) Kedeputian Pengembangan Setjen Wantannas kembali dipercaya sebagai Narasumber dalam kegiatan Pembekalan Kader Rakyat Terlatih (Ratih) Dalam Rangka Membantu Penanganan dan Pencegahan Pandemi Covid-19 yang dilaksanakan oleh Mabes TNI AD pada Kamis dan Jumat, 10-11 Desember 2020, bertempat di Pusat Pendidikan Teritorial (Pusterad), Jl. Raya Gadobangkong No. 146 Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Adapun kegiatan sebelumnya dilaksanakan di Pusat Pendidikan Zeni TNI – AD, Jalan Jendral Sudirman No.35, Bogor, November silam.

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19 Tahun 2020 agar dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar.

Dalam kegiatan tersebut, Kolonel Inf. Judi Paragina Firdaus, M.Sc. membawakan materi terkait bela negara selama dua hari, 10 hingga 11 Desember 2020. Sasaran yang diharapkan dapat dicapai dari kegiatan ini yaitu terwujudnya masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kesadaran dalam bela negara serta terwujudnya masyarakat yang memiliki jiwa nasionalisme, patriotism, peduli dan cinta tanah air.***(np)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>



LAKSDYA TNI DR. IR. HARJO SUSMORO : MOHON PANCASILA BENAR-BENAR KITA JADIKAN SEBAGAI PANDANGAN HIDUP ATAU *WAY OF LIFE*

Jakarta, 27/02/21



Ketua Umum *Goju Ryu Karate – Do Association Indonesia* (Goju Ass) yang juga menjabat sebagai Sesjen Wantannas Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, S.H., M.H mengadakan acara Silaturrahi Keluarga Besar Goju Ryu Ass Karate – Do Indonesia secara virtual dan tatap muka terbatas, Sabtu (27/2/2021) yang dihadiri oleh anggota Goju Ass yang berasal dari Pengurus Daerah (Pengda) dan Pengurus Cabang (Pencab) seluruh Indonesia,

Dalam sambutannya, Ketum Goju Ass mengingatkan agar masing-masing Pengda dan Pencab meningkatkan kembali jiwa-jiwa sosial untuk membangun dan memajukan Perguruan Goju Ass. Sebagai organisasi sosial, Goju Ass memiliki dasar pondasi dalam kegiatan yang dilaksanakan yaitu bagaimana menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup masing-masing anggota.

“Dalam hal ini mohon Pancasila benar-benar kita jadikan sebagai pandangan hidup atau *way of life*, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita hidup, apapun yang kita perbuat harus berlandaskan nilai-nilai yang dikandung oleh Pancasila,” ujarnya.

Ketum Goju Ass mengajak seluruh Pengda dan Pencab di seluruh Indonesia untuk bersatu dan bergerak bersama untuk menjangkau tujuan-tujuan organisasi



Goju Ass sehingga nama perguruan Goju Ass baik di pusat maupun di daerah memiliki dampak terhadap kemajuan kehidupan sosial bangsa dan negara.

Dalam kesempatan tersebut, kepada Pengda dan Pengcab perwakilan masing-masing daerah seperti Papua, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan dan daerah lainnya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi selama masa pandemi. Diharapkan melalui diskusi yang berlangsung, permasalahan-permasalahan yang ada di daerah dapat diselesaikan.

Di akhir acara, Ketum Goju Ass Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, SH, MH mengharapkan agar seluruh Pengda dan Pengcab di seluruh Indonesia menjaga kekompakan organisasi Goju Ass.***(np)



Source : <https://www.wantannas.go.id/>



RAPAT KELOMPOK KHUSUS SETJEN WANTANNAS BAHAS KONSEP STRATEGI KEAMANAN NASIONAL

Jakarta, 08/03/21



Rapat Kelompok Kerja Khusus (Pokjasus) kembali digelar oleh Unit Kedepuitan Setjen Wanannas, Senin (8/3/2021). Pada Pokjasus yang diselenggarakan di Kantor Setjen Wantannas ini, masing-masing kelompok kedepuitan berfokus untuk membahas konsep Strategi Keamanan Nasional.

Perkembangan lingkungan strategis pada tataran global, regional, dan nasional yang semakin dinamis dan kompleks, telah memunculkan ancaman, khususnya ancaman nonmilitar. Perkembangan teknologi informasi juga berpotensi memunculkan disinformasi di masyarakat dan harus mampu diantisipasi oleh sistem pertahanan dan keamanan negara.

Dalam konteks Indonesia, saat ini ancaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara kita berasal dari dalam dan luar negeri. Ancaman itu berbentuk militer, ekonomi, ideologi, narkoba, radikalisme, terorisme, separatisme, pandemi, biologi, bencana alam, siber, korupsi, kejahatan transnasional, illegal mining, illegal logging, human trafficking.

Untuk saat ini ancaman nyata yang sangat berbahaya bagi kita adalah munculnya bibit-bibit perpecahan berdasarkan identitas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).



Guna menghadapi ancaman seperti di atas, maka diperlukan konsep yang komprehensif yaitu konsep keamanan nasional yang akan diimplementasikan dalam bentuk Strategi Keamanan Nasional.

Pelaksanaan Rapat Pokjasus Ramusmat diikuti oleh empat kedeputian Setjen Wantannas dengan membahas lima tema yang kesemuanya bersumber dari konsep Strategi Keamanan Nasional yang disusun oleh Setjen Wantnans.***(np)



Source : <https://www.wantannas.go.id/>



KUNJUNGI UGM, WANTANNAS SIAP BANGKITKAN WAWASAN KEBANGSAAN MAHASISWA

Yogyakarta, 02/06/21



Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengunjungi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta untuk menyosialisasikan peran dan tugas Wantannas dalam membantu tugas presiden. Wantannas juga siap membantu kampus dalam membangkitkan wawasan kebangsaan kepada mahasiswa. “Kami ingin menyosialisasikan tugas pokok Wantannas adalah memberikan masukan kepada presiden dalam pengambilan kebijakan,” kata Sekjend Wantannas Laksdya TNI Harjo Susmoro, Rabu (2/6/2021). **BACA JUGA:** BMKG Prediksi Gelombang Tinggi di Selatan Jawa sampai Agustus Harjo mengatakan, Wantannas memiliki peran dalam melakukan pembinaan ketahanan nasional untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasional. Tidak hanya pas permasalahan fisik, namun juga dalam asepek kehidupan, baik ketahanan terhadap ancaman sosial, politik, ekonomi, dan lainnya. “Meskipun Indonesia sudah merdeka, tetapi ancaman keamanan dalam berbagai aspek kehidupan masih saja menghadang dalam upaya mewujudkan kedaulatan negara, kelangsungan hidup masyarakat, serta kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.



Peran Wantannas sangat diperlukan untuk memberikan masukan kepada presiden dalam pengambilan keputusan berhubungan keamanan nasional. Kunjungan ke perguruan tinggi terus dilakukan untuk menyadarkan akan pentingnya peran Wantannas dalam pembinaan ketahanan nasional. “Kami siap untuk membantu kampus dalam membangkitkan wawasan kebangsaan, termasuk bela negara melalui kuliah-kuliah umum,” katanya. BACA JUGA: Update Covid-19 DIY 2 Juni: Positif Tambah 268 Jadi 45.233 Kasus Sementara Rektor UGM, Panut Mulyono menyambut, baik tawaran kerja sama dalam upaya penguatan wawasan kebangsaan kepada mahasiswa. Ia berharap nantinya kerja sama dapat diwujudkan dalam pelaksanaan kuliah umum menghadirkan



Wantannas guna memberikan pembekalan kepada mahasiswa UGM.

Source : <https://yogya.inews.id/berita/kunjungi-ugm-wantannas-siap-bangkitkan-wawasan-kebangsaan-mahasiswa/all>



SESJEN WANTANNAS KUNJUNGI POLINEMA



Malang, 2/07/21

ADADIMALANG – Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional RI, (Wantannas) Laksamana Madya TNI Dr. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., melakukan kunjungan kerja ke kampus Polinema hari ini, Jumat (02/07/2021).

Dalam kunjungan tersebut Sesjen Wantannas didampingi oleh Deputy Bidang Pengembangan, Marsda TNI Dr. Sungkono, SE., M.Si dan Kepala Biro Umum Setjen Wantannas, Laksma TNI Supendi, S.T.

Direktur Polinema beserta jajaran Pembantu Direktur, Dosen Luar Biasa Polinema dan Kepala UPT Humas menerima kunjungan Wantannas tersebut di Ruang Rapat Pimpinan Polinema.

Kepada rombongan Wantannas, Direktur Polinema Drs. Awan Setiawan, M.MT., M.M. memberikan presentasi tentang profil Politeknik Negeri Malang.

Perlu diketahui, kunjungan Sesjen Wantannas ke Polinema untuk melakukan audiensi terkait optimalisasi tugas pokok dan fungsi Setjen Wantannas dalam pemberian saran tindak berbagai telaahan strategis kepada Presiden RI.



“Dalam pelaksanaan tupoksinya Wantannas memberikan masukan kepada Presiden RI. Wantannas membahas situasi kedaruratan khususnya berkaitan dengan masalah daya tahan negara terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di dalam delapan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Laksamana Madya TNI Dr. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H..

Sesjen Wantannas berharap dalam kaitan dengan nasionalisme, mata kuliah yang diajarkan di Polinema tidak hanya profesionalisme individu, namun juga yang bisa diaplikasikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara.

<https://adadimalang.com/26001/sesjen-wantannas-kunjungi-polinema.html>





SESJEN WANTANNAS JENDRAL HARJO SUSMORO BERI KULIAH UMUM DI UNRAM

Mataram, 20/09/21



Mataram, Universitas Mataram – Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Republik Indonesia, Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr.(Opsla) memberikan kuliah umum di Universitas Mataram (Unram) di Gedung Dome Unram pada Kamis (16/9) lalu.

Kuliah umum yang mengusung tema Strategi Keamanan Nasional dalam Rangka Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dilaksanakan secara daring dan luring yang diikuti dan dihadiri oleh pejabat di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional, pimpinan Unram, serta dosen mahasiswa di lingkungan Unram.

Rektor Unram, Prof. Dr. H. Lalu Husni, S.H., M.Hum., dalam sambutannya menyampaikan, kuliah umum dari Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) menjadi relevan dan penting mengingat Indonesia terdiri dari berbagai macam ras, suku, bahasa, budaya dan adat-istiadat berbeda-beda yang merupakan aset yang perlu kita jaga dengan sebaik-baiknya demi keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

“Karena itu mari kita sama-sama dengarkan dan mengikuti kuliah umum ini untuk menambah wawasan kita tentang Ketahanan Nasional,” ajaknya.

Sesjen Wantannas, Laksdya TNI Harjo Susmoro dalam pemaparannya mengatakan, Indonesia sebagai negara maritim. Juga merupakan negara



kepulauan terbesar di dunia. Memiliki berbagai keuntungan, antara lain posisi geografis yang diapit dua benua dan dua samudra, yang merupakan perlintasan jalur perdagangan. Di samping itu memiliki sumber daya alam melimpah.

Ia juga menjelaskan, tantangan yang dihadapi yaitu tegaknya kedaulatan dan hukum untuk menjaga kepentingan nasional. Serta menjaga stabilitas keamanan, pengelolaan sumber daya alam, konektivitas untuk menjamin keutuhan NKRI, sehingga tercapainya tujuan nasional dan kepentingan nasional. Salah satu tantangan lainnya yaitu era globalisasi saat ini.

“Salah satu ancaman nyata yaitu disintegrasi, jauh dari nilai-nilai Pancasila, rendahnya pendidikan dan kurangnya literasi,” ujarnya.

Harjo menegaskan, diperlukan stabilitas keamanan yang tinggi sebagai syarat terwujudnya kepentingan nasional. Oleh karena itu dibutuhkan peningkatan wawasan kebangsaan, cara yang bisa dilakukan dengan memahami dan mengimplementasikan empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggalika.

Di samping itu, perguruan tinggi juga memiliki peran melalui tri dharma perguruan tinggi melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Prof. Husni dalam kesempatan itu juga menyampaikan bahwa tahun ini Unram akan memperingati hari jadinya yang ke-59.

“Saat ini UNRAM memiliki 9 fakultas dan Program Pascasarjana. Jumlah program studi sebanyak 63 mulai dari Program Vokasi sampai Program S3. Jumlah mahasiswa (student body) 34.380 berasal dari 33 Provinsi di Indonesia dan lima Negara; Korea Selatan, Palestina, Turki dan Tomor Leste dan Ukraina”, tuturnya.

Ia juga menjelaskan posisi Unram pada level nasional berada pada klaster ke-2 dari 5 klaster yang diklasterisasi oleh Kemendikbud pada tahun 2020 yang diikuti oleh 2.136 PTN/PTS non-vokasi di se-Indonesia. Sedangkan pada level internasional, posisi Unram berdasarkan perankingan Scimago Institution Ranking tahun 2021 menempati posisi ke-30 di Indonesia. Scimago Institutions Rankings adalah lembaga pemeringkatan internasional yang berpusat di Spanyol yang menggabungkan tiga indikator yakni penelitian, inovasi dan dampak sosial (masing-masing mempunyai bobot: 50,30 dan 20%).



<https://unram.ac.id/sesjen-wantannas-jendral-harjo-susmoro-beri-kuliah-umum-di-unram/>



DENGAN SEMANGAT ERA SOCIETY 5.0, SESJEN WANTANNAS RI RESMI BUKA WORKSHOP PEMBINAAN BELA NEGARA

Jakarta, 17/12/21



Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, SH, MH, M.Tr Opsla hadir sebagai pembuka acara *Workshop* Pembinaan Bela Negara yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Integral Nusantara, Jumat (17/12/2021).

Acara yang berlangsung di Hotel Novotel Gajah Mada, Jakarta Barat dengan membahas tema “Implementasi Bela Negara Era Society 5.0”. Sesjen Wantannas hadir didampingi oleh Deputi Bid. Pengembangan Setjen Wantannas Marsda TNI Maman Suherman, M.A.P, M.Han. Saat membuka *Workshop*, dikatakan olehnya betapa pentingnya pembekalan implementasi bela negara dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

“Di era society 5.0 ini, kita semua wajib memiliki peluang dan tantangan tersendiri yang didasari oleh sikap dan nilai-nilai bela negara”, ucap Jenderal berbintang tiga ini.

Sesjen juga menegaskan, narasumber pada *workshop* ini merupakan referensi dari Wantannas yang secara kapasitas dan kemampuan dalam penyiapan materi tidak diragukan lagi.



“Para narasumber yang hadir di sini punya kapasitas dan kemampuan yang mumpuni karena mereka telah lama bekerja sama dan mendukung program-program pembinaan bela negara yang diselenggarakan oleh Wantannas”, tegas Sesjen.

Ketua Pusat Studi Integral Nusantara (Pusdira) yang diwakili oleh Direktur Eksekutif Sutanto Utomo, SE, SH, MH mengatakan bahwa peserta Workshop Bela Negara kali ini diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, anggota dan staf dari DPRD Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jembrana.

Pembahasan materi Workshop Bela Negara yang bekerja sama dengan Wantannas, rencana akan dilaksanakan dalam dua hari kedepan yaitu Jumat hingga Sabtu, 17 - 18 Desember 2021.

Narasumber Wantannas yang juga hadir yaitu Bandep Urs. Hankam Kedepatian Pengembangan Laksma TNI Ir. Rusmana, M.T., M.Tr (Han).***(dfn)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>



WANKAMNAS

Bentuk dan sifat ancaman yang ada di dunia saat ini dan ke depan semakin bersifat multidimensional meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan Keamanan negara, geografi, sumber kekayaan alam dan demografi.

Perubahan geopolitik dan geostrategik dunia ini membuat banyak negara kemudian merivisi paradigma Keamanan nasional maupun struktur organisasi yang terkait pertahanan dan Keamanan atau yang bersifat multidimensi dan sudah bersifat lintas sektor tersebut, beberapa negara kemudian melakukan penguatan peran lembaga Keamanan nasional yang dinamakan Dewan Keamanan Nasional/Wankamnas (*National Security Council/NSC*).

Dalam konteks Indonesia, penanganan Keamanan nasional masih terfragmentasi dalam beberapa kementerian dan lembaga pemerintah. Kondisi ini melemahkan bangsa dan negara kita dalam menghadapi ancaman yang sudah bersifat krusial, strategis dan mendesak serta bersifat multidimensi.

Adanya perubahan Wantannas menjadi Wankamnas ini merupakan transformasi nama melalui validasi dan revitalisasi lembaga yang sudah ada karena adanya tuntutan dinamika perkembangan ancaman Keamanan nasional yang semakin kompleks untuk dapat direspon dengan cepat dan tepat untuk menjamin jalannya roda pembangunan nasional.



DIHADAPAN PARA AKADEMISI, SESJEN WANTANNAS JELASKAN URGENSI PEMBENTUKAN DEWAN KEAMANAN NASIONAL

Jakarta, 10/11/20



Sebagaimana kita ketahui bersama, perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis, telah membawa perubahan terhadap spektrum ancaman yang semakin kompleks dan berimplikasi terhadap terancamnya eksistensi negara. Bentuk dan sifat ancaman yang dikategorikan berbahaya dan berpotensi menghancurkan sebuah negara berubah menjadi multidimensional.

Ancaman inilah yang membuat banyak negara merevisi sistem keamanan nasional maupun struktur organisasi yang menyangkut keamanan di negara mereka masing-masing. Oleh sebab itu, beberapa negara dewasa ini telah menguatkan peran lembaga yang dinamakan Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas) yang merupakan lembaga pemerintah dalam pengambilan keputusan terkait masalah Kamnas yang bersifat krusial, mendesak, dan strategis. Hal ini terjadi bukan hanya di Indonesia saja, namun juga di Amerika Serikat serta beberapa negara besar lainnya, melakukan hal yang sama.

Demikian dikatakan Sesjen Wantannas Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, SH, MH dalam sambutannya pada acara *Focus Group Discussion* (FGD),



Kamis dan Jumat (10-11/12/2020), di ruang *Situation Room* Lantai 5 Gedung B, Kantor Setjen Wantannas.

Keberadaan Wankamnas sangat membantu Presiden dalam mengelola dan menjamin stabilitas Kamnas yang sangat dibutuhkan untuk terlaksananya proses pembangunan nasional guna terwujudnya tujuan dan kepentingan nasional yaitu terciptanya rasa aman dan sejahtera.

Di hadapan para akademisi dan Ormas serta K/L terkait, Sesjen Wantannas menegaskan bahwa Indonesia hakekatnya telah memiliki lembaga tersebut sejak tahun 1946, yang dalam perjalannya mengalami perubahan nama disesuaikan dengan perkembangan situasi politik negara saat itu hingga pada tahun 1999 berdasarkan Kepres No. 101 lembaga tersebut berubah dengan nama Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas). Untuk menjawab tantangan perkembangan lingkungan strategis yang semakin kompleks dan dinamis, Wantannas sesuai Tugas dan fungsinya dirasa kurang mampu menjawab persoalan yang ada sehingga pemerintah merasa perlu melaksanakan penataan kelembagaan Wantannas menjadi Lembaga Kamnas secara terintegrasi, yaitu dengan mentransformasikan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) menjadi Wankamnas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024.

“Seharusnya penataan ini sudah selesai di 2019, namun karena satu dan lain hal, maka pelaksanaan transformasi revitalisasi dan validasi organisasi ini belum dapat diwujudkan, sehingga rencana penataan diprogramkan kembali dalam RPJMN 2020-2024 sehingga kita akan lakukan percepatan, karena kebutuhan akan lembaga yang kredibel untuk menyelesaikan persoalan-persoalan krisis yang krusial serta semakin meningkatnya ancaman multidimensional yang tidak bisa diselesaikan secara sektoral, menjadi amat penting,” jelas Sesjen.

“Persoalan-persoalan negara harus diselesaikan secara komprehensif. Yang harus dilakukan adalah seluruh kelembagaan duduk bersama secara holistik dan integral,” jelasnya lagi. Lembaga yang tepat untuk menangani semua persoalan tersebut adalah Wankamnas sebagai bentuk transformasi melalui revitalisasi dan validasi Wantannas.

Urgensi mengapa kita perlu mentransformasi Wantannas menjadi Wankamnas adalah karena sampai saat ini belum ada lembaga yang menyusun strategi Kamnas secara utuh. Namun, bukan berarti Indonesia tidak punya. Strategi



Kamnas yang sekarang ada, baru disusun secara parsial dan belum melibatkan seluruh *stakeholder*. Padahal Kamnas meliputi semua bidang.

Kondisi yang sama dialami negara lain yang juga belum memiliki lembaga khusus untuk menangani permasalahan yang bersifat krusial, mendesak dan strategis termasuk di dalam merumuskan serta menentukan status kedaruratan. Sementara undang-undang kedaruratan pun belum bisa diimplementasikan secara sempurna.

Faktor lain yang turut berkontribusi dalam pembentukan Wankamnas di Indonesia yaitu belum ada lembaga khusus yang menjadi penasihat Kamnas bagi Presiden RI sebagaimana yang telah ada dalam negara-negara demokratis lainnya. “selama ini, untuk permasalahan Kamnas dilakukan secara sektoral oleh kementerian tertentu, tetapi perspektif keamanan dalam konteks yang komprehensif sehingga mampu memberi gambaran kepada Presiden untuk mengambil kebijakan secara total belum dilaksanakan dengan baik secara *day by daynya*,” ucap Jenderal yang memperoleh penghargaan Satya Lancana Adhi Makayasa tersebut.

Sesjen Wantannas secara tegas mengatakan kepada semua peserta, agar menancapkan dalam *mindset*, manakala menyebut Wankamnas atau yang sekarang ini Wantannas, jangan dibayangkan bahwa Wantannas ini hanya sebatas kesekretariatannya saja. Pemimpin Wantannas adalah Presiden selaku Kepala Negara, sedangkan Setjen Wantannas hanya kelengkapan dari Wantannas. Apabila nanti berubah menjadi Setjen Wankamnas, itu pun hanya kelengkapan dari Wankamnas.

“Sebuah kekeliruan besar, dengan berasumsi bahwa Wantannas adalah cerminan dari Setjen Wantannas. Setjen Wantannas hanya sebagai bagian dari Wantannas. Setjen Wantannas tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dibebankan sesuai dengan tugas dan fungsinya, hanya oleh lingkungannya sendiri. Perlu keterpaduan seluruh kementerian untuk mendukung Presiden RI selaku Ketua Wantannas dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul khususnya dalam menyusun rancangan kebijakan strategis nasional,” tegas Sesjen.

Untuk itu, perlu diketahui bahwa keaggotaan Wantannas atau Wankamnas adalah seluruh *stake holder* (kementerian), yang diketuai langsung oleh Presiden. Sehingga diharapkan persoalan-persoalan negara dapat diselesaikan secara



komprehensif, tidak secara parsial, dan masalah-masalah krusial serta kedaruratan dapat diselesaikan melalui proses pengambilan keputusan untuk merumuskan kebijakan strategis nasional yang juga bersifat menyeluruh.

Penyelenggaraan FGD dengan para akademisi dan Ormas serta K/L terkait mempunyai maksud untuk mendapatkan saran dan masukan terkait dengan rencana revitalisasi dan validasi Wantanmas menjadi Wankamnas. Tujuannya sendiri adalah agar lembaga hasil revitalisasi dan validasi ini menjadi lembaga yang betul-betul dapat menjawab kebutuhan bangsa dan negara saat ini dan ke depannya serta mampu bekerja sama dengan semua stake holder secara harmonis, efektif dan efisien.

FGD ini selain dihadiri oleh seluruh Deputi, Staf Ahli dan Kepala Biro di lingkungan Setjen Wantannas, juga diikuti secara virtual oleh akademisi yang membidangi Pusat Kajian Kamnas dari sepuluh universitas diantaranya Universitas Indonesia, Universitas Pertahanan, Universitas Padjadjaran dan Universitas Gadjah Mada, PBNU, PP Muhammadiyah, PGI, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik. ***(dfn)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>



SESJEN WANTANNAS LAKSANAKAN STUDY BANDING DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DEWAN KEAMANAN NASIONAL BERSAMA DUBES NEGARA SAHABAT

Jakarta, 17/02/21



Wantannas.go.id : Guna menindaklanjuti rencana Revitalisasi Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Keamanan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) melaksanakan studi banding dalam rangka memantapkan pelaksanaan Revitalisasi dan Validasi Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Keamanan Nasional bersama beberapa negara sahabat diantaranya Amerika Serikat, Turki, Jepang, Rusia, Inggris dan China.

Namun dengan kondisi pandemi Covid-19, pelaksanaan studi banding dilaksanakan hanya dengan menggelar diskusi bersama Dubes Negara Sahabat baik secara tatap muka terbatas maupun melalui *teleconference* (zoom meeting). Direncanakan Diskusi akan berlangsung selama tiga hari terhitung mulai Rabu, Kamis dan Senin, 17, 18 dan 22 Februari 2021 dengan mematuhi protokol kesehatan.



Pada hari pertama, Rabu (18/02/2021), bertempat di Ruang *Situation Room* Lantai V Gedung B, Diskusi dilaksanakan bersama Dubes Republik Turki untuk Indonesia dan Perwakilan Dubes Amerika Serikat.

Dalam sambutannya, Sesjen Wantannas Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., menjelaskan, tujuan diskusi adalah untuk memperoleh informasi dan masukan tentang Dewan Keamanan Nasional dari beberapa negara serta bagaimana sebuah isu menjadi ancaman nasional untuk dibahas dalam suatu dewan tertinggi yang dipimpin oleh Presiden.

“Apalagi tantangan keamanan yang dihadapi dunia termasuk Indonesia semakin kompleks yang memerlukan penyesuaian. Ancaman terhadap keamanan negara tidak lagi menyangkut politik dan ideologi atau terorisme semata, tetapi juga ketahanan ekonomi, energi, lingkungan hidup, dan yang terakhir ini terkait kesehatan dengan adanya pandemi covid-19,” ujar Sesjen Wantannas.

Ia juga berharap diskusi ini bisa memberikan pemahaman dan pandangan dalam hal pembuatan konsep sistem keamanan nasional yang sangat berguna dalam menghadapi ancaman multi dimensi.

“Dalam hal ini kami bermaksud mendapatkan gambaran terkait dengan fungsi dan peran Dewan Keamanan Nasional AS dan Turki, termasuk peran penasehat keamanan nasional yang nantinya akan kami jadikan sebagai bahan masukan dalam membentuk lembaga yang sama di Indonesia,” ujarnya lagi.

Perwakilan Duta Besar Amerika Serikat, *Director Office of East Asian and Pacific Affairs* Julie Turner, menjelaskan bahwa *The National Security Council* (NSC) atau Dewan Keamanan yang dipimpin oleh Presiden, dalam strukturnya memiliki 15 departemen dan 9 departemen lainnya.

Dewan Keamanan Nasional di AS diatur dalam Undang-Undang tahun 1947 yang disahkan oleh Kongres. Namun, secara administrasinya Presiden berhak mengubah tatanan struktural melalui *National Security Memorandum*.

NSC adalah dewan tertinggi dari cabang eksekutif Presiden. Tatanan struktural wajib yang tercantum dalam UU 1947 adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri ESDM, susunan lainnya berkembang sesuai dengan kebutuhan.



Dalam penjelasannya, NSC juga berfungsi dalam urusan staf seperti *briefing* keamanan bilateral dan multilateral, sedangkan untuk pertemuan tingkat tinggi, *National Security Adviser* (NSA) yang melaksanakan.

NSC tidak memiliki hak untuk mengimplementasi kebijakan, namun hanya merekomendasi kerangka kebijakannya saja. Staf NSC menyiapkan aktivitas Presiden serta memberikan rekomendasi kepada Presiden tentang *update* isu-isu yang mungkin dapat berpengaruh kepada AS.

Julie Turner menambahkan bahwa NSC memiliki *situation room* yang beroperasi selama 24 jam untuk mengontrol keamanan AS dan warga negaranya serta menerima informasi dari berbagai *agency* termasuk dari Kedutaan Besar AS di Luar Negeri.



Sementara itu, Duta Besar Turki untuk Indonesia, Prof. Dr. Mahmut Erol Kiliç menjelaskan sejarah Turki yang sudah memiliki Dewan Keamanan Nasional sejak 1933. Pada tahun 1949 berubah menjadi Dewan Pertahanan Nasional, dan pada 1962 berformasi kembali menjadi *National Defence Council* (DKN).

Dubes Turki Prof. Dr. Mahmut Erol Kiliç menjelaskan bahwa DKN Turki saat ini hanya bertugas sebagai badan konsultatif. DKN dipimpin oleh Presiden dan memiliki kantor Sekretariat Jenderal yang terdiri dari berbagai Deputi. Struktur dari DKN saat ini hanya fokus pada isu dan ancaman eksternal dari Turki. DKN



merupakan badan hukum tertinggi yang memberikan rekomendasi terhadap keamanan dan bahaya serta rekomendasi lain yang dibutuhkan Presiden.

Prof. Dr. Mahmut Erol Kiliç menambahkan apabila ada isu yang krusial, DKN Turki hanya memberikan rekomendasi kepada Presiden, dan Presiden yang memiliki otoritas untuk memerintah kementerian dan lembaga lainnya. DKN juga mengkoordinir semua laporan dan memberikannya kepada Presiden dalam satu laporan akhir.

Diskusi yang berlangsung juga membahas sejumlah topik strategis antara lain ketahanan ekonomi, energi, lingkungan hidup, dan masalah kesehatan yang terkait dengan pandemi Covid-19.

Di hari kedua, Sesjen Wantannas melaksanakan diskusi bersama Wakil Dubes Jepang Masami Tamura dan Konselor Bidang Politik Jepang MS. Kumukura Aya secara tatap muka. Demikian pula dengan Dubes Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva.

Dalam acara tersebut, Sesjen Wantannas didampingi para Deputi, Sahli dan Karo serta Tim Pokja Pembentukan Dewan Keamanan Nasional. ***(np)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>



KUNJUNGI UI, SESJEN WANTANNAS SAMPAIKAN URGENSI DEWAN KEAMANAN NASIONAL

Depok, 09/04/21



BEJI, Kota Depok | Kini, persoalan ketahanan nasional bukan hanya di ranah militer, tapi multidimensional. Misalnya, persoalan nyawa dan kelangsungan hidup masyarakat bernegara.

Ancaman ini membuat banyak negara lebih menguatkan peran lembaga Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas) untuk pengambilan keputusan terkait masalah Kamnas yang bersifat krusial, mendesak, dan strategis. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Amerika Serikat serta beberapa negara besar lainnya.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas), Laksdya TNI Harjo Susmoro saat bertemu dengan Pimpinan Tinggi Universitas Indonesia, Jumat (9/4/2021).

“Indonesia punya Dewan Ketahanan Nasional. Peran dan fungsinya ternyata mengalami degradasi dan kurang dioptimalkan. Kita sudah melaksanakan studi banding dengan negara-negara lain, seperti negara Turki, Rusia, Jepang, Amerika Serikat, dan China. Semuanya memiliki Lembaga Dewan Keamanan



Nasional dan berjalan dengan baik serta berada di bawah Presiden atau Perdana Menteri,” ujar Sesjen Wantannas.

Tujuan kunjungan tidak lain untuk mensosialisasikan tugas dan kedudukan Wantannas sebagai lembaga yang memiliki tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan gerakan pembinaan ketahanan nasional, demi tercapainya tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

“Persoalan keamanan nasional bukan lagi hanya persoalan militer, namun persoalan yang harus dihadapi secara komprehensif, holistik, dan integral oleh seluruh bangsa,” terang Laksdya Harjo.

Ia menjelaskan, Indonesia memiliki lembaga yang mengurus masalah keamanan nasional sejak tahun 1946 dengan nama Dewan Pertahanan Negara. Pada tahun 1954 berubah menjadi Dewan Keamanan. Selanjutnya, menjadi Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, dan berubah lagi sesuai dinamika politik, hingga pada tahun 1999 disebut dengan Dewan Ketahanan Nasional.

“Saat ini, Setjen Wantannas sedang menjajaki komunikasi dan sosialisasi dengan lembaga pendidikan seperti universitas yang notabene-nya bebas kepentingan agar semakin banyak pihak-pihak, termasuk akademisi yang menyadari bahwa peran Lembaga Keamanan Nasional sangat diperlukan negara ini,” kata mantan Kapushidrosal tersebut.

Ketahanan nasional dalam bidang pendidikan, sambungnya, dapat dilakukan dengan melakukan pembinaan dan peningkatan aspek sosial-budaya serta wawasan kebangsaan. Hal ini sangat tepat jika ditempuh melalui jalur akademis.

“Generasi muda diharapkan mempunyai ciri khas yang dominan dan menonjol dalam pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional,” tutupnya.

Strategi Keamanan Nasional

Sebulan sebelumnya, Senin (8/3/2021), dalam Rapat Kelompok Kerja Khusus (Pokjasus) Wantannas, dibahas konsep keamanan nasional yang akan diimplementasikan dalam bentuk Strategi Keamanan Nasional.

Perkembangan lingkungan strategis pada tataran global, regional, dan nasional yang semakin dinamis dan kompleks, telah memunculkan ancaman, khususnya ancaman non-militer. Perkembangan teknologi informasi juga berpotensi



memunculkan disinformasi dan harus mampu diantisipasi oleh sistem pertahanan dan keamanan negara.

Dalam konteks Indonesia, saat ini ancaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara berasal dari dalam dan luar negeri. Ancaman itu berbentuk militer, ekonomi, ideologi, narkoba, radikalisme, terorisme, separatisme, pandemi, biologi, bencana alam, siber, korupsi, kejahatan transnasional, illegal mining, illegal logging, human trafficking.

Ancaman nyata yang sangat berbahaya bagi Indonesia adalah munculnya bibit-bibit perpecahan berdasarkan identitas Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA).

<https://jakarta-daily.com/2021/04/kunjungi-ui-sesjen-wantannas-sampaikan-urgensi-dewan-keamanan-nasional/>



SETJEN WANTANNAS LAKSANAKAN STUDI BANDING DENGAN DUBES CHINA TERKAIT TRANSFORMASI WANTANNAS

Jakarta, 13/04/21



Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.H., M.H dengan didampingi para Deputi dan Staf Ahli Setjen Wantannas mengadakan audiensi virtual dengan Duta Besar Republik Rakyat Cina (RRC), Selasa (13/4/2021).

Audiensi ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi dan masukan tentang Dewan Keamanan Nasional dari beberapa negara sahabat. Sebelumnya Setjen Wantannas sudah melakukan studi banding dengan beberapa negara sahabat melalui Duta Besar perwakilan yang ada di Indonesia seperti negara Amerika serikat, Turki, Jepang, dan Rusia di bulan Februari yang lalu.

Dalam sambutannya, Sesjen Wantannas selain menyampaikan tugas, fungsi dan kedudukan Setjen Wantannas, Sesjen juga membahas hubungan kedua negara yaitu Indonesia dan RRC yang sudah terjalin sejak lama.

“Kita ketahui bersama bahwa kerjasama antara Indonesia dan RRC berlangsung erat, penuh persaudaraan dan merupakan hubungan yang telah berlangsung lama



(*a long-standing relationship*), di mana antara kedua rakyat sudah terjalin hubungan sejak era kerajaan. Di masa sekarang, hubungan antara kedua negara diperkuat melalui kemitraan strategis,” ujar Sesjen.

Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro menambahkan, bahkan di tengah pandemi ini hubungan kedua negara tetap berkembang pesat. Hal ini terlihat dengan dicapainya kerjasama vaksin, pengaturan koridor perjalanan, dan kerjasama dalam rangka pemulihan ekonomi. Investasi China di Indonesia yang kedua terbesar dengan angka US\$3,5 miliar, dan perdagangan sebesar US\$31,78 tahun 2020. Indonesia menargetkan ekspor ke Tiongkok dalam 3 tahun ke depan menjadi US\$100 miliar tahun 2024.

Dubes RRC untuk Indonesia Xiao Qian, dalam paparannya menjelaskan bahwa *National Security Council* di Tiongkok dikenal dengan *National Security Commission of the Chinese Communist Party* (CNSC) merupakan ide keamanan yang komprehensif. CNSC bila dibandingkan dengan Indonesia masih sangat baru, terbentuk 8 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2013.

CNSC bertujuan untuk mengatasi perkembangan dan tugas baru dengan baik dalam ranah keamanan nasional, serta membangun sistem keamanan nasional yang terpusat, terintegrasi, sangat efektif dan berkuasa.

Dengan demikian hampir sebagian besar negara maju dan termasuk Indonesia memandang penting adanya lembaga dewan keamanan nasional atau yg sejenisnya untuk merencanakan bagaimana strategi keamanan nasional bisa diwujudkan guna menjamin keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan warga negara, masyarakat, dan bangsa, terlindunginya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta keberlangsungan pembangunan nasional dari segala ancaman,

Dubes RRC untuk Indonesia Xiao Qian berharap komunikasi dan diskusi ini dapat berlanjut sampai Dewan Keamanan Nasional Indonesia terbentuk.***(np)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>



SEKJEN WANTANNAS JELASKAN PENTINGNYA DEWAN KEAMANAN NASIONAL BAGI PRESIDEN

Jakarta, 29/04/21



Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Laksdya TNI Harjo Susmoro menjelaskan pentingnya peranan lembaga Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas) dalam membantu Presiden terutama saat menyusun kebijakan strategis.

"Sekaligus untuk menjamin terwujudnya stabilitas keamanan nasional dan berjalannya roda pemerintahan dengan baik dan lancar," kata Harjo saat beraudiensi dengan Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (28/4).

Hal tersebut mengingat dimensi keamanan sudah semakin kompleks, bukan hanya pada keamanan wilayah dari serangan musuh namun juga menyangkut keamanan manusia baik secara individu, kelompok masyarakat dan keamanan dalam negeri secara umumnya.

Wantannas yang selama ini memegang peran dan fungsi tersebut perlu dilaksanakan revitalisasi dan validasi, mengingat dasar pembentukannya sudah tidak valid lagi.

Saat ini progres revitalisasi dan validasi organisasi Wantannas menjadi Wankamnas sedang menunggu keputusan Presiden terkait izin prakarsa penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Keamanan Nasional



dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

Berdasarkan hasil rapat Sekretaris Jenderal Wantannas dengan Bappenas pada Kamis (17/10) disepakati pembentukan Wankamnas dan disetujui dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan diterima sebagai bagian kerangka kelembagaan 2020-2024.

Harjo mengatakan Wantannas telah mengundang kementerian dan lembaga untuk mendapatkan masukan serta usulan pembentukan Wankamnas melalui diskusi dengan para pakar, lembaga swadaya masyarakat serta melaksanakan studi banding ke beberapa negara sahabat melalui diskusi dengan Duta Besar perwakilan yang ada di Indonesia.

"Selain itu, saat ini kita sedang menyusun dokumen terkait strategi keamanan nasional dan progresnya sudah hampir 80 persen," ujar dia.

Sementara itu, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan pengalamannya saat bertugas di Wantannas tentang pentingnya lembaga tersebut dalam membantu Presiden serta pengambilan kebijakan strategis nasional guna mendukung terselenggaranya proses pembangunan nasional.

Politisi PPP tersebut mengatakan untuk melaksanakan tugas, peran dan fungsinya dengan baik, Wankamnas nantinya harus jelas kedudukannya secara payung hukum dan nomenklatur kelembagaan serta proses mekanisme hubungan kerja antarkelembagaan.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/sekjen-wantannas-jelaskan-pentingnya-dewan-keamanan-nasional-bagi-presiden.html>

<https://koran-jakarta.com/wantannas-jelaskan-pentingnya-dewan-keamanan-nasional-bagi-presiden>

<https://m.caping.co.id/news/detailmi/8307262>
<https://cdnml.caping.co.id/news/detail/8307262>



WANTANNAS SEPAKAT STRATEGI KEAMANAN NASIONAL PERLU DIPERBAIKI

Jakarta, 1/10/21



Merdeka.com - Perwakilan anggota Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) RI di Jakarta sepakat draf Dokumen Strategis Keamanan Nasional perlu diperbaiki. Perbaikan penting dilakukan sebelum diserahkan ke Presiden RI Joko Widodo.

"Dokumen ini tetap lanjut, tetapi isinya perlu disempurnakan dan diperbaiki. Mohon masukan-masukan (yang disampaikan) diberikan secara tertulis atas nama lembaga agar bisa dimasukkan ke dalam dokumen," kata Sekretaris Jenderal (Sesjen) Wantannas RI, Laksdya TNI Harjo Susmor, o saat memimpin Prasadang Penyempurnaan Dokumen Strategi Keamanan Nasional di Jakarta. Demikian dikutip dari Antara, Kamis (30/9).

Dalam prasadang, Sesjen Wantannas memaparkan secara umum isi draf Dokumen Strategi Keamanan Nasional yang kemudian ditanggapi oleh perwakilan anggota Wantannas RI.

Beberapa masukan dari anggota, antara lain terkait penyesuaian redaksional dan kebijakan pada masing-masing anggota.

"Kami tunggu satu minggu ke depan (untuk penyerahan masukan secara tertulis), dan akan kami koreksi untuk dibawa kepada Presiden," kata Sesjen Wantannas.



Jika Presiden sebagai Ketua Wantannas menganggap Strategi Keamanan Nasional perlu ditetapkan sebagai dokumen resmi, maka Setjen Wantannas akan mengatur pertemuan lanjutan.

Pertemuan lanjutan itu berupa sidang antara Ketua Wantannas RI dan anggota-anggotanya, yang terdiri atas kementerian dan lembaga.

Dewan Ketahanan Nasional merupakan lembaga yang berada di bawah kendali Presiden RI Joko Widodo. Lembaga itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dikelola oleh Sekretariat Jenderal Wantannas RI yang dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal.

Anggota tetap Wantannas RI, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; Kementerian Sekretariat Negara; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Kementerian Pertahanan; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Hukum dan HAM; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kepolisian RI; Badan Intelijen Negara; Kementerian PPN/Bappenas; dan Kementerian Keuangan.

Sementara itu, anggota tidak tetap Wantannas, antara lain Kantor Staf Presiden, Badan Siber dan Sandi Negara, BNPT, Kejaksaan Agung, Dewan Pertimbangan Presiden, BNN, BNPB, BMKG, Lemhannas, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Setjen Wantannas, yang saat ini dipimpin oleh, Laksdya TNI Harjo Susmoro, sejak Februari 2021 menyusun draf Dokumen Strategi Keamanan Nasional.

Harjo menyampaikan dokumen itu perlu ada karena itu akan menjadi panduan kebijakan dan program seluruh kementerian/lembaga dalam menjalankan tugasnya.

"Sampai saat ini belum ada dokumen resmi Strategi Keamanan Nasional, yang harusnya dibuat tiap pergantian pimpinan, karena (dokumen) itu dibuat sesuai visi misi pimpinan," ujar Harjo.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/wantannas-sepakat-strategi-keamanan-nasional-perlu-diperbaiki.html>



<https://manado.antaranews.com/berita/151349/wantannas-sepakat-strategi-keamanan-nasional-perlu-diperbaiki-sebelum-diserahkan#:~:text=Manado%20%28ANTARA%29%20-%20Perwakilan%20anggota%20Dewan%20Ketahanan%20Nasional,tetap%20anjut%2C%20tet>
<https://m.caping.co.id/news/detail/9067543api%20isinya%20perlu%20disempurnakan%20dan%20diperbaiki>.

RAKERTAS, POKJASUS & RAMUSMAT



Setjen Wantannas melaksanakan serangkaian kegiatan rapat untuk menghasilkan produk kajian yang bersifat siklis maupun dinamis. Pelaksanaan rapat meliputi Rapat Kerja Terbatas (Rakertas), Kelompok kerja Khusus (Pokjasus), dan Rapat Perumusan Materi (Ramusmat). Dalam pelaksanaannya, rapat tersebut melibatkan narasumber dari berbagai jalur untuk mendapatkan masukan pemikiran untuk menghasilkan kajian yang berkualitas dan komprehensif. Pertama, jalur aspiratif, yakni masyarakat luas yang meliputi pemerhati masalah sosial, tokoh masyarakat, organisasi politik, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, untuk menggali aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat. Kedua, jalur akademik, meliputi ilmuwan, cendekiawan, dan peneliti, bertujuan untuk menguji aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan, ditinjau dari sudut pandang akademik. Ketiga jalur empiric, terdiri dari lembaga-lembaga pemerintah, kementerian dan non-kementerian dengan tujuan mengembangkan pemecahan persoalan.



SESJEN WANTANNAS LAKSDA TNI DR. IR. HARJO SUSMORO, S.SOS, S.H., M.H PIMPIN RAPAT KERJA TERBATAS

Jakarta, 15/10/20



Sekretariat Jenderal Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) kembali mengadakan Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) selama tiga hari mulai 13 hingga 15 Oktober 2020, bertempat di Kantor Setjen Wantannas Jalan Medan Merdeka Barat No. 15 dan Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat. Rakertas diselenggarakan secara virtual dan tatap muka dengan menghadirkan narasumber kepakaran pada delapan tema yang diusung Setjen Wantannas.

Sesjen Wantannas Laksda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, S.H., M.H memimpin pleno penutupan sekaligus Penerima Paparan Rakertas. sedangkan yang bertindak selaku Moderator adalah Deputi Bidang Sistem Nasional.

Pada Pleno Penutupan, Kamis (15/10/2020), Sesjen Wantannas menyampaikan apresiasi atas kesungguhan para peserta rakertas dalam menyelesaikan naskah akademik masing-masing pokja.

“Saya selaku Sesjen Wantannas memberikan apresiasi kepada peserta khususnya kepada para narasumber yang telah memberikan sumbangan pemikirannya untuk kesempurnaan produk yang sudah dikerjakan, karena produk ini akan menjadi rekomendasi kepada presiden setelah diperdalam melalui Rapat Kelompok Kerja



Khusus dan Rapat Perumusan Materi yang akan datang. Harapan saya semoga buah karya kita dapat menjadi kontribusi yang positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan menjadi amal ibadah kita masing-masing,” ungkap Sesjen.

Rakertas kali ini merupakan rapat yang keempat kalinya dan rapat terakhir di sepanjang tahun anggaran 2020. Adapun tema-tema krusial yang dibahas adalah ancaman legalisasi gerakan LGBT, penanganan pandemi Covid-19, optimalisasi integrasi big data, serta pengembangan Sektor Kemaritiman. ***(np)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>





SETJEN WANTANNAS BAHAS BIO-CNG DALAM RANGKA KETAHANAN ENERGI NASIONAL

Jakarta, 09/02/21



Sekretariat Jenderal Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) kembali mengadakan Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) selama tiga hari yang dimulai sejak Selasa (9/2/2021) dan akan berakhir pada Kamis (11/2/2021). Mekanisme Rakertas sendiri dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan serta memanfaatkan media virtual zoom yang saat ini sedang trending penggunaannya.

Salah satu tema menarik yang dibahas dalam Rakertas yaitu pengembangan Biomethane Compressed Gas (Bio-CNG) untuk ketahanan energi nasional yang merupakan tema dari Kedeputian Sistem Nasional.

Bio-CNG adalah penyempurnaan biogas yang telah dibersihkan atau dikompresi menjadi gas metana murni (>95%). Bio-CNG adalah bagian dari energi baru dan terbarukan yang dapat dijadikan sebagai energi alternatif. Hal tersebut sangat strategis untuk dikembangkan, mengingat sampai saat ini kebutuhan gas domestik (khususnya elpiji) cenderung meningkat setiap tahun, sementara produksinya terus menurun.

Dr. Sri Wahyuni MP dari PT. Swen Inovasi Transfer menyampaikan bahwa percepatan pengembangan Bio-Gas dan Bio-CNG yang ramah lingkungan sangat dibutuhkan untuk kebutuhan energi nasional.



“Permasalahan yang mendasar saat ini kita tahu bahwa sumber energi masih sangat terbatas hanya pada penggunaan LPG, padahal saat ini jumlah produksinya menurun dan kita ketergantungan pada impor. Di sisi lain pemerintah mengeluarkan dana yang sangat besar untuk subsidi LPG. Nah, Bio-Gas dan Bio-CNG sangat strategis dikembangkan karena bahan bakunya cukup melimpah di Indonesia. Sehingga pemerintah kita bisa menghemat subsidi dan devisa karena impor, jadi anggarannya dapat dialihkan untuk mendukung pembangunan nasional di sektor yang lain,” ucapnya.

Tema yang tidak kalah menarik lainnya yaitu isu terjadinya Polarisasi Politik saat pemilu maupun pilkada di tanah air. Pemilu 2014, Pilgub DKI 2017 dan Pemilu 2019 telah memunculkan fenomena polarisasi politik yaitu suatu keadaan yang menunjukkan terjadinya keterbelahan masyarakat secara politik dan sosial akibat adanya dua kutub politik yang saling berseberangan yang menggunakan isu agama, politik identitas, ideologi, dan primordialisme.

Berbagai hal ini dapat memicu perdebatan di media sosial dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat membawa eksekutif terjadinya berbagai aksi pro-kontra yang tajam terhadap kandidat Kepala Daerah dan Capres pada masing-masing Pemilu tersebut, yang dalam beberapa peristiwa disertai dengan aksi-aksi kekerasan simbolik dan non simbolik. Jika polarisasi politik ini dibiarkan dikhawatirkan akan berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa, sehingga perlu dilakukan pencegahan.***(np)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>



SESJEN WANTANNAS LAKSDA TNI DR. IR. HARJO SUSMORO, S.SOS, S.H., M.H PIMPIN RAPAT KERJA TERBATAS

Jakarta, 15/10/20



Sekretariat Jenderal Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) kembali mengadakan Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) selama tiga hari mulai 13 hingga 15 Oktober 2020, bertempat di Kantor Setjen Wantannas Jalan Medan Merdeka Barat No. 15 dan Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat. Rakertas diselenggarakan secara virtual dan tatap muka dengan menghadirkan narasumber kepakaran pada delapan tema yang diusung Setjen Wantannas.

Sesjen Wantannas Laksda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, S.H., M.H memimpin pleno penutupan sekaligus Penerima Paparan Rakertas. sedangkan yang bertindak selaku Moderator adalah Deputi Bidang Sistem Nasional.

Pada Pleno Penutupan, Kamis (15/10/2020), Sesjen Wantannas menyampaikan apresiasi atas kesungguhan para peserta rakertas dalam menyelesaikan naskah akademik masing-masing pokja.

“Saya selaku Sesjen Wantannas memberikan apresiasi kepada peserta khususnya kepada para narasumber yang telah memberikan sumbangan pemikirannya untuk kesempurnaan produk yang sudah dikerjakan, karena produk ini akan menjadi rekomendasi kepada presiden setelah diperdalam melalui Rapat Kelompok Kerja Khusus dan Rapat Perumusan Materi yang akan datang. Harapan saya semoga



buah karya kita dapat menjadi kontribusi yang positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan menjadi amal ibadah kita masing-masing,” ungkap Sesjen.

Rakertas kali ini merupakan rapat yang keempat kalinya dan rapat terakhir di sepanjang tahun anggaran 2020. Adapun tema-tema krusial yang dibahas adalah ancaman legalisasi gerakan LGBT, penanganan pandemi Covid-19, optimalisasi integrasi big data, serta pengembangan Sektor Kemaritiman. ***(np)



Source : <https://www.wantannas.go.id/>



SESJEN WANTANNAS JELASKAN TENTANG KEMARITIMAN INDONESIA SAAT PIMPIN RAPAT HARMONISASI HASIL POKJASUS - RAMUSMAT

Jakarta, 15/03/21



Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, S.H, M.H., pimpin rapat Harmonisasi Hasil Pokjasus - Ramusmat melalui zoom. Acara terlaksana di Ruang Rapat NKRI Lantai 5A, Kantor Setjen Wantannas, Senin (15/3/2021).

Rapat yang berlangsung secara tatap muka terbatas ini membahas seputar perlu adanya harmonisasi dari empat unit ke deputian di lingkungan Setjen Wantannas agar naskah yang nantinya menjadi bahan pra sidang, bermuara pada kekuatan maritim.

Sesjen Wantannas mengatakan ada enam elemen penting untuk menjadikan sebuah negara yang kuat di bidang maritim yaitu posisi geografis, bentuk fisik, luasnya wilayah, jumlah penduduk, karakter bangsa, dan karakter pemerintah.

Sesjen menambahkan, bahwa sejak zaman pemerintahan Presiden Soekarno hingga Jokowi orientasi negara Indonesia masih pada wawasan negara maritim dengan tujuh Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia yaitu membangun kembali budaya maritim, menjaga dan mengelola sumber daya laut, prioritas pada



pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan kewajiban untuk membangun kekuatan maritim.

Sedangkan untuk Strategi Maritim Nasional, Indonesia memiliki tiga unsur yaitu *Ends*-nya adalah terselenggaranya proses pembangunan nasional guna mewujudkan kepentingan nasional demi tercapainya tujuan nasional, *Means* adalah seluruh sumber daya nasional, dan *Ways* adalah bagaimana menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasional dengan merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan proses pembangunan nasional.

Harmonisasi Hasil Pokjasus – Ramusmat diikuti seluruh pejabat dan pegawai lain yang berkepentingan.***(np)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>





WANTANNAS BAHAS RESTORASI SOSIAL INDONESIA MENYONGSONG PERUBAHAN PERADABAN SOCIETY

5.0

Jakarta, 29/07/21



Rangkaian kegiatan Pokjasus dan Ramusmat yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) secara resmi ditutup pada Kamis (29/7/2021). Agenda penutupan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.H., M.H., yang berlaku sebagai Penerima Paparan dan Staf Ahli Ekonomi Mayjen TNI Dr. Rizerius Eko Hadisancoko, S.E., S.A.P., M.Si bertindak sebagai Moderator.

Dalam pleno ini, masing-masing kelompok diberikan kesempatan untuk memaparkan tema-tema yang dibahas terkait Strategi Ketahanan Negara, salah satunya terkait bagaimana tatanan sosial Indonesia dalam menyongsong perubahan peradaban *society* 5.0. Era masyarakat 5.0 atau *super smart society* (*society* 5.0) diperkenalkan Pemerintah Jepang pada 2019, yang dibuat sebagai solusi dan tanggapan dari revolusi industri 4.0 dan dianggap akan menimbulkan degradasi manusia. Setelah memasuki era revolusi industri, Indonesia akan memasuki era *society* 5.0.

Society 5.0 dapat dimaknai sebagai masyarakat super pintar dalam memanfaatkan aplikasi teknologi *big data*, *Internet of Things* (IoT), *Artificial Intelligence* (AI), dan *robotic*, yang menyatu ke dalam setiap sistem atau industri



di semua segmen kehidupan sosial. Kondisi inilah yang menuntut masyarakat Indonesia untuk mampu beradaptasi dengan peradaban *society* 5.0.

Pembantu Deputi Urusan Sosial Budaya Kedeputian Pengembangan Setjen Wantannas Brigjen TNI Heru Triyanto, S.Sos dalam paparannya menyebutkan bahwa komponen utama *society* 5.0 adalah manusia yang diharapkan dapat memberi nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Di sisi lain, kemajuan teknologi tersebut dapat membawa dampak negatif terhadap sistem nilai bangsa Indonesia yang berpotensi mengancam kondusifitas keamanan nasional. Menurutnya, perlu dilakukan restorasi sosial Indonesia melalui pembinaan mentalitas bangsa Indonesia untuk beradaptasi dengan revolusi industri 4.0; penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; pemanfaatan media sosial yang terkendali dan bertanggungjawab; dan penguatan regulasi dalam menyongsong perubahan peradaban *society* 5.0

Untuk mengatasi hal tersebut, Brigjen TNI Heru Triyanto dalam paparannya menyarankan bahwa perlunya ada gerakan nasional pengembangan inovasi ekosistem dan implementasi sistem nilai Pancasila yang bisa dikomandoi oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK) serta penyusunan peta jalan dan rancangan inpres tentang restorasi sosial menyongsong peradaban *society* 5.0. Dan juga mengharapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dapat memperkuat riset dan inovasi ekosistem, serta sistem pendidikan nasional yang adaptif terhadap revolusi industri 4.0 sehingga kaula muda dapat beradaptasi menyongsong *society* 5.0. ***(np)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>



SESJEN WANTANNAS RI SOROTI ANCAMAN PERANG SIBER

Jakarta, 14/09/21



Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Sesjen Wantannas RI) menyoroti ancaman perang siber (*Cyber Warfare*) yang dinilainya dapat mengancam keamanan nasional. Menurut Sesjen Wantannas RI, saat ini ancaman tersebut sudah bersifat multidemensi, baik terhadap sipil maupun militer.

Hal ini di sampaikan dalam kegiatan Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) Wantannas RI TA 2021 kepada Kedeputusan Pengembangan (Debang) dalam mengidentifikasi sejumlah permasalahan pada pembahasan kajian analisis ancaman perang siber (*Cyber Warfare*) yang kemungkinan dapat terjadi di Indonesia.

Permasalahan itu antara lain meliputi perkembangan lingkungan strategis yang didominasi pengaruh revolusi industri 4.0; belum siapnya sumber daya manusia dalam merefleksikan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta kekuatan *cyberspace* yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi, terutama terkait layanan dasar terhadap masyarakat.

Dalam Rakertas Debang Wantannas RI, Selasa (14/9/2021), diungkapkan bahwa negara kewajiban mewujudkan tujuan nasional yaitu untuk melindungi segenap



bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, sebagaimana amanat UUD 1945.

Dalam pembahasan kajian tersebut, kehadiran komputer dan internet banyak membawa manfaat bagi manusia termasuk penggunaannya. Namun perkembangan dan penguasaan teknologi tidak hanya menimbulkan pergeseran konsep sosial dalam masyarakat, tapi juga menimbulkan pergeseran perang konvensional yang bersifat kinetik yang berada pada domain darat, laut dan udara.



Dalam rapat kerja terbatas bertema “Analisis Ancaman *Cyber Warfare* Guna Melindungi Kepentingan Negara dalam Rangka Menjaga Keamanan Nasional”, tersebut disampaikan bahwa *cyber warfare* dapat diartikan sebagai perang di dalam *cyberspace* yang

berbeda dengan perang konvensional atau perang fisik. Media utama yang digunakan adalah komputer dan internet.

Sementara, objek yang diserang dalam *cyber warfare* adalah objek dalam *cyberspace* yang dikuasai oleh suatu negara dengan tujuan menyebabkan kerusakan atau disfungsi tertentu, dengan memiliki maksud politik tertentu atau keamanan nasional tanpa perlu melintas batas suatu negara.

Selain itu, Sesjen Wantannas RI juga memberikan penekanan tentang pentingnya pengelolaan *big data* untuk mengantisipasi ancaman perang siber tersebut. Peretasan yang marak terjadi belakangan ini, baik akibat kelalaian maupun aktifitas *social engineering*, sudah semakin mengkhawatirkan, terutama bagi keamanan nasional, seperti yang terjadi beberapa kali di Indonesia, data pejabat penting sekalipun bisa bocor dan diakses oleh masyarakat luas.

Sesjen Wantannas RI menilai hal tersebut terjadi karena masih belum adanya *leading sector* yang benar-benar mengelola data secara nasional. Demikian juga



dengan platform *big data* nasional yang secara hukum belum ditentukan oleh pemerintah sehingga masalah data tidak tertangani secara optimal.(psp)

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa tata kelola data pemerintah harus menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah, melalui Pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Merujuk Perpres tersebut, harus ada salah satu unit kerja di lingkungan kementerian sebagai data integrator untuk dapat mengelola data dan sebagai *leading sector* penanggung jawab pengelolaan data, serta perlu adanya ketentuan lebih lanjut terkait penyimpanan data serta penanggung jawab terhadap migrasi data dan penanggung jawab terhadap keamanan *big data*.

Menurut Sesjen Wantannas RI, hingga saat ini masih belum ada organisasi yang mengelola data nasional secara terpusat, juga belum ada ketentuan platform *big data* nasional, padahal data nasional sangat diperlukan dan sudah banyak terjadi kebocoran data. ***(dfn)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>



PENGHARGAAN



ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK : SETJEN WANTANNAS MASUK KATEGORI BADAN PUBLIK CUKUP INFORMATIF

Jakarta, 25/11/20



Wantannas.go.id ; Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal (Karo PSP) Setjen Wantannas Brigjen TNI Drs. Haris Sarjana, M.M.,M.Tr.(Han) selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Setjen Wantannas mengikuti kegiatan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 secara virtual, Rabu, (25/11/2020).

Sebagaimana disampaikan Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Gede Narayana dalam sambutannya, hasil dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan Badan Publik didapati bahwa masih banyak Badan Publik yang belum patuh terhadap pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, juga belum maksimalnya kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi yang sudah wajib untuk dilaksanakan sejak 2010 lalu.

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik akan diberikan kepada Badan Publik yang memenuhi Kualifikasi Informatif.

"Penganugerahan ini diberikan oleh KI Pusat setiap tahunnya kepada Badan Publik yang menerapkan dan menjalankan Undang Undang Nomor 14 Tahun



2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat," kata Gede Narayana.

Dari hasil monev tahun 2020, tercatat sebanyak 348 Badan Publik yang dimonitoring, 254 diantaranya masih sangat rendah kepatuhannya dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya jumlah Badan Publik yang masuk dalam kategori informatif (hanya 17,43 persen atau 60 Badan Publik).

“Besarnya prosentase Badan Publik yang masih masuk kategori Cukup Informatif, Kurang Informatif bahkan Tidak Informatif masih memprihatinkan, maka harus digarisbawahi bahwa Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia masih jauh dari tujuan yang diamanatkan oleh UU KIP,” tegas Gede menjelaskan. Kondisi yang memprihatinkan ini harus menjadi tugas bersama antara Pemerintah, Badan Publik dan KI.

Ia menambahkan, masih diperlukan dorongan yang lebih besar untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

“Komisi Informasi akan lebih menggelorakan budaya keterbukaan informasi publik melalui komitmen dan dukungan yang kuat dari pemerintah,” tegasnya lagi.

Menurutnya, meski masih ada Badan Publik yang Tidak Informatif, namun tidak sedikit Badan Publik yang telah berupaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publiknya.

“Seperti peningkatan secara signifikan jumlah badan publik kategori Informatif tahun ini, jika pada tahun lalu hanya 34 yang Informatif, maka sekarang meningkat tajam menjadi 60 badan publik Informatif, sehingga upaya badan publik untuk berbenah diri secara sungguh-sungguh, patut diberikan apresiasi yang tinggi,” katanya.

Pelaksanaan monev untuk mengukur kepatuhan Badan Publik oleh KI Pusat tahun 2020 ini penuh dinamika di tengah pandemic Covid-19. Untuk itu, Gede Narayana menyatakan seluruh tahapan monev mulai dari sosialisasi, penyampaian Self-Assessment Questionnaire (SAQ) untuk diisi Badan Publik, verifikasi SAQ hingga tahap presentasi sampai puncak penganugerahan dilaksanakan secara protocol kesehatan.



Dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik tahun ini, penilaian berdasarkan kategori : pertama Badan Publik Informatif, kedua Badan Publik Menuju Informatif, ketiga Badan Publik Cukup Informatif, keempat Badan Publik Kurang Informatif, dan kelima Badan Publik Tidak Informatif.

Setjen Wantannas yang termasuk dalam Lembaga Non-Struktural berada pada peringkat Cukup Informatif. Karo PSP Setjen Wantannas menghimbau kepada personel yang terlibat dalam penanganan keterbukaan informasi agar meningkatkan lagi upaya-upaya dalam melaksanakan keterbukaan informasi. Himbauan yang sama juga diberikan kepada personel yang menangani langsung pelaksanaan monev keterbukaan informasi.***(np)



Source : <https://www.wantannas.go.id/>



WANTANNAS RI RAIH KATEGORI OPINI WTP 10 KALI BERTURUT-TURUT DALAM RAKERNAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH TAHUN 2021

Jakarta, 14/09/21



Kementerian Keuangan mengadakan kegiatan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021 pada Selasa, 14 September 2021. Dalam sambutannya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah pusat maupun daerah akan terus menjaga akuntabilitas keuangan negara dalam rangka penanganan pandemik COVID-19 dengan melibatkan para penegak hukum.

“Pemerintah bekerja keras menggunakan instrument APBN untuk meringankan dan memulihkan ekeonomi. Kita menggunakan *resources* ini harus dipertanggungjawabkan,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah tahun 2021 di Jakarta, Selasa (14/9/2021).

Dalam kesempatan yang sama, BPK RI memberikan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun



2020 ke 84 Laporan Keuangan K/L atau 97.7 persen atau satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) beropini WTP.

Dewan Ketahanan Nasional merupakan salah satu Lembaga Non Struktural yang mendapat opini WTP kategori WTP 10 kali berturut-turut. Untuk diketahui, Wantannas RI kembali meraih opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020. Peraihan Opini WTP Tahun Anggaran 2020 ini mencapai yang ke-14 kali, secara berturut-turut diraih Setjen Wantannas sejak tahun 2007 lalu.

Sri Mulyani menyebutkan Lembaga penegak hukum yang bersinergi dengan pemerintah dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara ini meliputi Polri, Kejaksaan Agung, KPK, BPK RI, BPKP dan LKPP.

Ia menegaskan pelibatan Lembaga-lembaga penegak hukum dilakukan dalam rangka menghindari potensi terjadinya risiko penyelewengan terhadap uang negara yang pada akhirnya mengurangi efektivitas program pemerintah mengurangi efektivitas program pemerintah.

Ia tak memungkiri bahwa mengatur keuangan nefara di tengah krisis sangat tidak mudah mengingat banyak Kementerian/Lembaga (K/L) yang secara tiba-tiba harus refocusing terhadap anggarannya.

Terlebih lagi, beberapa K/L juga mendadak mendapat anggaran sangat besar karena harus menjadi garda terdepan dalam menghadapi pandemik seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kemenko UKM, dan BNPB.

Meski demikian, Sri Mulyani menyatakan K/L dan pemerintah daerah telah mampu melewati tantangan dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara pada tahun lalu.

Source : <https://www.antaranews.com/berita/2392097/setjen-wantannas-menerima-penghargaan-wtp-10-kali-berturut-turut>



PRASIDANG DEWAN

Setjen Wantannas sebagai badan fasilitas staf bagi Sidang Dewan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun bahan Sidang Dewan yang berkaitan dengan bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan Keamanan, agar dinamika kehidupan nasional tersebut tetap terselenggarakan sesuai arah yang telah ditetapkan. Bahan Sidang Dewan merupakan produk kajian yang dihasilkan dari kegiatan rapat dan diskusi yang sudah disebutkan di atas, kemudian bahan sidang diproses lebih lanjut dalam forum Pra Sidang Dewan yang melibatkan pejabat setingkat Eselon I KL tersebut. Bahan yang disetujui di forum Pra Sidang akan digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan Sidang Dewan.



SESJEN WANTANNAS BERSAMA 14 K/L BAHAS REVITALISASI DAN VALIDASI WANTANNAS MENJADI WANKAMNAS

Jakarta, 16/11/20



Dewan Ketahanan Nasional sesuai Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional merupakan lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Sedangkan Tugas yang diemban Setjen Wantannas salah satunya adalah melaksanakan Sidang Dewan.

Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, S.H, M.H., membuka secara resmi pelaksanaan Pra Sidang Dewan yang diadakan di Ruang Rapat Nakula, Lantai VI Setjen Wantannas, Jalan Medan Merdeka Barat No.15 pada Senin (16/11/2020).



Pra Sidang Dewan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebelum mengadakan Sidang Dewan. Pra sidang diselenggarakan dengan mengundang Pejabat Eselon I dari 14 Kementerian/Lembaga anggota tetap Wantannas.

Perkembangan lingkungan strategis yang berkembang senantiasa membawa perubahan terhadap spektrum ancaman yang semakin kompleks dan berimplikasi terhadap terancamnya eksistensi negara. Bentuk dan sifat ancaman yang dikategorikan berbahaya dan bisa menghancurkan sebuah negara berubah menjadi multidimensional. Misalnya saja yang terjadi akhir-akhir ini seperti anarkisme, pandemi covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Ancaman yang bersifat multidimensi tersebut, membuat banyak negara merevisi sistem keamanan nasional maupun struktur organisasi yang menyangkut keamanan di negaranya. Beberapa negara dewasa ini lebih menguatkan peran lembaga yang dinamakan Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas).

Sesjen Wantannas dalam sambutannya menyampaikan bahwa urgensi revitalisasi dan validasi Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Keamanan Nasional sangat dibutuhkan karena hingga saat ini belum ada lembaga yang menyusun strategi keamanan nasional sebagaimana di negara-negara lain. Juga belum ada lembaga yang menangani permasalahan yang bersifat krusial, mendesak dan strategis termasuk di dalam merumuskan dan menentukan status kedaruratan. Serta di negara kita belum ada sebuah lembaga yang khusus menjadi





penasihat keamanan nasional bagi presiden RI sebagaimana yang ada dalam negara-negara demokratis lainnya.

Senada dengan Sesjen Wantannas, Deputy Bidang Pengembangan Marsda TNI Dr. Sungkono, S.E., M.Si menambahkan, urgensi terhadap rencana revitalisasi dan validasi Wantannas menjadi Wankamnas bukan karena kebutuhan organisasi tetapi merupakan kebutuhan negara, seperti yang terjadi saat ini, di Indonesia belum ada lembaga yang menyusun *National Security Strategy* serta tidak berfungsinya forum koordinasi tertinggi untuk menangani permasalahan yang sudah eskalasi tinggi, krusial, mendesak dan strategis.

Sesuai konsep yang disusun oleh tim Kelompok Kerja Setjen Wantannas, Wankamnas nantinya akan menjadi Lembaga yang melekat dengan Istana Kepresidenan dalam mendukung tugas-tugas Presiden di bidang keamanan nasional, dimana Setjen Wankamnas akan menangani Pusat Krisis Center yang merupakan wadah Presiden untuk mengambil kebijakan strategis dalam menangani masalah yang krusial, mendesak dan krisis.

Dalam forum yang sama, Kepala Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) RI Budi Purwanto menyampaikan bahwa reformasi dari Wantannas ke Wankamnas didukung penuh oleh Kemenko Marves RI. Hal ini dikarenakan, tujuh pilar atau program maritim dunia sejalan dengan reformasi Wantannas menjadi Wankamnas serta memiliki visi yang sama dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Budi Purwanto juga menyarankan untuk menambah satu narasi terkait dasar dari tujuh pilar sebagai referensi.

Hal yang sama juga disampaikan Direktur Pertahanan dan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas) RI RM Dewo Broto Joko P., SH, LL.M. Pada dasarnya Kemen PPN sangat mendukung revitalisasi ini. Hal ini terbukti dengan mencantumkan rencana revitalisasi tersebut dalam RPJMN, namun belum berhasil dibentuk, sedangkan proses pembentukannya sendiri dapat dikaitkan dalam RUU Kamnas. Menurut Dewo Broto, peran Wantannas sangat penting. Namun, penugasan belum dilaksanakan secara optimal, sebagai contoh, Rapat Dewan belum pernah dilaksanakan sampai hari ini, sedangkan *Output* Sidang Dewan dinilai sangat penting untuk *me-supply* permasalahan yang *real time*, karena informasi *real time* sangat diperlukan oleh Presiden.



Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemen PAN-RB Rini Widyantini, SH., MPM menjelaskan bahwa dalam revitalisasi ini, hal yang harus diperhatikan adalah desain struktur Wankamnas, *outcome* dan *scope* pekerjaan Wankamnas. Menurutnya, Dewan nantinya akan menjadi satu unit organisasi yang memberikan masukan kepada Presiden. Presiden sebagai Ketua Dewan tidak memiliki wewenang untuk memutuskan. Secara fungsi organisasi, Dewan hanya membantu Presiden (*Assist President*), bukan sebagai pembinaan namun sebagai lembaga sinkronisasi terkait keamanan pertahanan nasional. Setelah diketahui *scope* dan lingkup pekerjaannya, maka yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah mekanisme kerja dan struktur organisasi.

Dalam sesi diskusi dan tanggapan, Kementerian dan Lembaga anggota tetap Wantannas memberikan saran dan masukan serta pandangan terkait susunan organisasi Dewan Keamanan Nasional. Pra Sidang Dewan diakhiri dengan foto bersama dan ramah tamah. ***(np)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>



SIAPKAN RANCANGAN STRATEGI KEAMANAN NEGARA, WANTANNAS BAKAL GELAR SIDANG

Jakarta, 20/09/21



IDXChannel - Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Laksdya Harjo Susmoro saat ditemui di Kantor Pusat Watannas, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (20/9/2021).

Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) akan menggelar pra sidang untuk membahas rancangan strategi keamanan nasional. Rencananya, sidang ini akan digelar di Jakarta pada tanggal 30 September 2021 mendatang.

Sejak negara ini merdeka, kata dia, Indonesia belum mempunyai strategi keamanan nasional yang menjadi panduan (Guidance) bagi pemerintah dalam mengelola bangsa ini. Oleh karena itu, keberadaan hal tersebut sangat penting sebagai panduan (Guidance) dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam rangka melindungi tumpah darah bangsa Indonesia, mensejahterakan dan mencerdaskan bangsa, dan ikut andil dalam perdamaian dunia.

"Ini butuh strategi nasional yang dijabarkan strategi-strategi sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan semuanya arahnya harus kesini. Gak boleh terus kemudian punya visi sendiri," ujarnya.



Harjo menyampaikan strategi nasional ini juga sudah lama diterapkan oleh pemerintahan Amerika Serikat (AS). Dimana, hal yang paling pertama dilakukan adalah menentukan strategi nasional untuk jangka panjangnya akan seperti apa. Dengan begitu, kementerian/lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya bisa berpatokan dengan strategi nasional tersebut.

Dalam hal rancangannya sendiri, dia menyampaikan bahwa draf tersebut telah dikirimkan kepada semua kementerian dan lembaga. Bahkan, sebagian besar juga sudah memberikan masukan serta tanggapan atas rancangan tersebut.

Source : <https://www.idxchannel.com/foto-1/foto/siapkan-rancangan-strategi-keamanan-negara-wantannas-bakal-gelar-sidang>



WANTANNAS RI GELAR PRA SIDANG PENYEMPURNAAN DOKUMEN STRATEGI KEAMANAN NASIONAL

Jakarta, 30/09/21



Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Wantannas RI) menggelar kegiatan pra sidang untuk menyempurnakan naskah rancangan dokumen Strategi Keamanan Nasional (SKN) bersama anggota tetap dan tidak Wantannas, Rabu (30/9/2021).

Helatan itu diharapkan dapat menampung masukan dari anggota tetap dan anggota tidak tetap Dewan Ketahanan Nasional mengenai isi draf dokumen Strategi Keamanan Nasional, yang disusun oleh Tim Perumus Setjen Wantannas sejak Februari 2021.

“Hingga saat ini belum ada dokumen resmi Strategi Keamanan Nasional, yang harusnya dibuat tiap pergantian pimpinan, karena (dokumen) itu dibuat sesuai visi misi pimpinan,” kata Sesjen Wantannas Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr.(Opsla) saat membuka acara pra sidang di Jakarta.

Oleh karena itu, lanjutnya, dia berinisiatif menyusun dokumen itu dan berharap naskah rancangan dokumen itu dapat lanjut dibahas Presiden Joko Widodo bersama anggota Dewan Ketahanan Nasional, yaitu para menteri dan pimpinan lembaga.



"Lalu setelah itu presiden diharapkan menyetujui dan mengesahkan naskah rancangan itu jadi dokumen resmi Strategi Keamanan Nasional," lanjut Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro.

Dokumen Strategi Keamanan Nasional diharapkan akan menjadi panduan bagi kementerian dan lembaga mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional apabila sudah di tandatangani ketua Wantannas, yaitu Presiden dalam hal ini Joko Widodo.

"Cita-cita nasional adalah Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur, sementara tujuan nasional bagaimana negara dapat melindungi rakyatnya, wilayahnya, mencerdaskan kehidupan rakyat, dan menyejahterakan rakyat," papar Harjo Susmoro.

Cita-cita dan tujuan itu, ia melanjutkan, bermuara ke satu kepentingan nasional, yaitu menjadikan Indonesia aman dan sejahtera.

Source : <https://www.wantannas.go.id/>





KEGIATAN INTERNAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL 2020-2021



PATI TNI, POLRI DAN PERWAKILAN ASN SETJEN WANTANNAS MENGIKUTI UPACARA HUT TNI KE-75 YANG DIGELAR SECARA VIRTUAL

Jakarta, 05/10/20



Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Laksda TNI Dr. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., S.Pi., M.H., bersama Pati TNI dan perwakilan ASN Setjen Wantannas mengikuti Upacara HUT TNI Ke-75 secara virtual dari Istana Negara, bertempat di Ruang Rapat 5107 Lantai V Gedung A Setjen Wantannas, Jalan Medan Merdeka Barat No 15, Jakarta, Senin (05/10/2020).

Upacara HUT TNI ke-75 dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), sebagai inspektur upacara. Upacara diawali dengan mengheningkan cipta dan pembacaan Sapta Marga. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi memberikan apresiasi atas peran TNI selama ini, khususnya selama masa pandemi Covid-19.

"Seluruh dunia, termasuk kita di Indonesia, kini berkubang dalam perang melawan Covid-19, musuh tak kasat mata yang memarak-morandakan hampir semua tatanan kehidupan," kata Jokowi.

Jokowi lantas mengapresiasi peran TNI selama ini dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dari membantu mendisiplinkan warga untuk mematuhi protokol



kesehatan hingga ikut menegakkan aturan di daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Di tengah suasana itu, kita patut memberi apresiasi yang tinggi kepada Tentara Nasional Indonesia atas berbagai perannya, dari membantu mendisiplinkan masyarakat mematuhi protokol kesehatan, ikut menegakkan aturan di daerah-daerah yang menerapkan PSBB, sampai menjalankan operasi kemanusiaan dalam upaya menghentikan penyebaran virus Covid-19," tuturnya.

Jokowi pun berharap agar TNI selalu bersikap profesional selalu menjadi kebanggaan rakyat Indonesia.

"Dirgahayu TNI. Teruslah menjadi tentara profesional dan menjadi kebanggaan rakyat," kata Jokowi.



Source : <https://www.wantannas.go.id/>



SETJEN WANTANNAS LAKUKAN EVALUASI PEMETAAN ANALISIS JABATAN PEGAWAI

Jakarta, 05/10/20



Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) mengadakan pemetaan terhadap Penyusunan Evaluasi Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Manajemen Risiko kepada seluruh pegawai Setjen Wantannas, Senin (05/10/2020).

Acara dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan Marsma TNI Adm Shopian. Dijelaskannya, untuk penyusunan Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (Enjab) merupakan bagian dari rencana aksi yang harus dilaksanakan oleh Setjen Wantannas sesuai kebutuhan Organisasi.

Kegiatan yang berlangsung virtual ini menghadirkan Kasubdit Bangprof Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) Letkol Laut (KH) Dr.Kukuh SW., S.Pd., MT, sebagai narasumber. Dalam paparannya, Letkol Laut (KH) Dr.Kukuh menjelaskan bahwa tujuan analisis beban kerja dilaksanakan untuk menentukan berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan menentukan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang dapat dilimpahkan kepada seorang pegawai.

Lebih lanjut, Kasubdit Bangprof Pushidrosal menambahkan bahwa ABK dalam menilai dan menghitung beban kerja memiliki beberapa manfaat antara lain



sebagai media penyempurnaan organisasi, sebagai perencanaan SDM organisasi, Penilaian Kinerja Pegawai, sebagai bahan untuk penyempurnaan SOP, kemudian alat penyusunan standar kinerja ideal setiap jabatan, lalu menjadi Program promosi dan mutasi pegawai, dan terakhir menjadi acuan penyempurnaan program pendidikan dan pelatihan.

Analisis Kepegawaian Ahli Muda Sub. Koordinator Kelompok Disiplin dan Pengembangan Pegawai, Reno Ardiansyah, S.Kom menyampaikan bahwa Kelompok Kepegawaian dan Hukum Biro Umum akan melaksanakan pendampingan kepada seluruh pegawai Setjen Wantannas untuk melakukan breakdown setiap pekerjaan untuk mengukur beban kerja masing-masing pegawai sesuai analisis jabatan yang ada. Hal ini agar masing-masing Unit Kerja memperoleh kesamaan pengertian, bahasa, dan penafsiran sehingga dalam melaksanakan analisis jabatan dapat lebih efektif dan efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang berlaku, dan juga untuk membantu Unit Kerja dalam melakukan penataan kepegawaian yang sekaligus memberikan umpan balik bagi penyempurnaan organisasi dan tata laksana. ***(np)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>



SESJEN WANTANNAS BERPESAN PEGANG TEGUH INTEGRITAS, KOMITMEN DAN RASA TANGGUNG JAWAB SAAT MELANTIK SEJUMLAH PEJABAT

Jakarta, 16/10/20



Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Laksda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, S.H., M.H untuk pertama kalinya melantik dan mengambil Sumpah Jabatan terhadap 1 orang Pejabat Eselon I, 6 orang Eselon II dan 1 orang Eselon III di Lingkungan Setjen Wantannas, bertempat di Ruang 5107, Lantai V Gedung A Setjen Wantannas, Jumat (16/10/2020).

Dihadapan para pejabat yang baru dilantik, Sesjen menjelaskan kedudukan Wantannas sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.

“Saya berharap saudara sekalian selalu memegang teguh integritas, komitmen dan rasa tanggung jawab yang tinggi, serta berinovasi demi kemajuan organisasi Setjen Wantannas. Pada kesempatan kali ini, sekaligus saya ingin mengingatkan



kita semua bahwa tantangan ketahanan nasional kita, sangat berat, dan kini ditambah lagi dengan terjadinya pandemi Covid-19, hal ini tentu memberikan tantangan tersendiri. Kita harus berpikir dan bertindak secara kreatif dan inovatif dalam rangka membentuk ketahanan nasional Indonesia,” ujar Sesjen dalam sambutannya.

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan selain dihadiri secara tatap muka, juga disiarkan melalui aplikasi zoom. Adapun pejabat yang bertindak sebagai saksi yaitu Deputy Bidang Politik dan Strategi Irjen Pol. Drs. Sukma Edi Mulyono, M.H serta Deputy Bidang Sistem Nasional Mayjen TNI Made Datrawan, S.IP. ***(np)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>





PENTINGNYA PUSDALOPS DALAM MENANGANI BENCANA DISAMPAIKAN OLEH KARO PSP SETJEN WANTANNAS DALAM ACARA FGD PUSDALOPS BNPB

Jakarta, 20/11/20



Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal (Karo PSP) Setjen Wantannas Brigjen TNI Drs. Haris Sarjana, M.M., M.Tr.(Han) hadir dalam kegiatan virtual *Focus Group Discussion* (FGD) Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga diikuti oleh kementerian dan lembaga lainnya, Jumat (20/11/2020).

Yos Malole Satgas Covid-19 BNPB menyampaikan, tujuan utama dari penyelenggaraan FGD adalah untuk mengidentifikasi persepsi dan ekspektasi para pemangku kepentingan dan mendiskusikan hal-hal yang sudah baik serta hal-hal yang dapat ditingkatkan lagi oleh Pusdalops.

“Melalui forum ini kita ingin melihat interaksi apa yang pernah dilakukan bersama Pusdalops-PB BNPB, apa saja yang sudah berjalan dengan baik dan apa saja yang dapat ditingkatkan baik di level nasional maupun daerah, apakah peran lainnya yang Pusdalops BNPB perlu lakukan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L dalam penanganan bencana,” ucapnya.



Tugas dan fungsi Pusdalops sendiri tertuang dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB).

Brigjen TNI Drs. Haris Sarjana, M.M., M.Tr. (Han) menyampaikan pentingnya Pusdalops dalam menangani bencana. Karo PSP Setjen Wantannas bercerita berdasarkan pengalamannya, di lokasi bencana yang pernah ditangani selama bertugas menjadi TNI, banyak korban yang masih hidup namun karena tidak segera ditangani sehingga banyak yang meninggal.



Brigjen TNI Haris Sarjana berharap informasi di lapangan dapat diakses oleh pusat sesegera mungkin sehingga tahu siapa dan apa berbuat apa sehingga proses

evakuasi korban dapat dilaksanakan sesegera mungkin.

“Kita tahu teknologi sudah maju, kita berharap data kependudukan yang sifatnya vital dapat diintegrasikan, dapat dengan menggunakan sidik jari bisa segera diadopsi untuk mendapatkan identitas korban. Pentingnya Pusdalops dalam menangani bencana akan efektif apabila sumber daya manusia dan sistem IT nya memadai, sehingga setiap penanganan dapat dikelola dengan baik. Dalam hal ini *big data* sangat diperlukan sehingga ada link untuk setiap K/L yang ada kaitannya dengan bencana, dapat diakses karena kedepan akan membutuhkan kecepatan,” ujar Karo PSP.

Dalam FGD virtual tersebut, hadir pula perwakilan dari berbagai K/L seperti Polri, KLHK, BMKG, Kemenlu, TNI, Kemenkes, Kemenkeu, Kemen PUPR dan beberapa K/L lainnya.***(np)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>



SESJEN WANTANNAS LAKSDYA TNI DR. IR. HARJO SUSMORO, S.SOS, SH, MH LANTIK PEJABAT ESELON II DAN III

Jakarta, 22/12/20



Selasa (22/12/2020), bertempat di Ruang serbaguna 5107 Lantai 5 Gedung A Kantor Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas), Sesjen Wantannas Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, SH, MH melantik dan mengambil Sumpah Jabatan terhadap dua orang Pejabat Eselon II dan satu orang Pejabat Eselon I di lingkungannya.

Adapun ketiga orang tersebut adalah :

1. Bandep Urs. Lingstrareg Kedeputian Jiandra, Marsma TNI Suyitno.
2. Bandep Urs. Kumdang Kedeputian Pengembangan, Maulana, SH, MH.
3. Kabag Sisfo Biro PSP, Kolonel Laut (P) Imam Hidayat, SE, MM.

Walaupun tanpa virtual, pelantikan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yaitu memakai masker, menjaga jarak, hanya dihadiri oleh sedikit personel serta dilaksanakan dengan waktu yang singkat.



Pejabat yang bertindak sebagai Saksi Pelantikan yaitu Deputy Bidang Pengembangan Marsda TNI Dr. Sungkono, SE, M.Si dan Deputy Bidang Pengkajian dan Penginderaan Laksda TNI Dr. Dani Achdani, S.Sos, M.AP.***(dfn)



Source : <https://www.wantannas.go.id/>



SETJEN WANTANNAS UNDANG KPK DALAM SOSIALISASI BENTURAN KEPENTINGAN

Jakarta, 19/01/21



Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan bersih dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) menyelenggarakan Sosialisasi Penanganan Gratifikasi, Benturan Kepentingan, *Whistleblowing System* (WBS), dan Pengaduan Masyarakat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual pada Selasa, (19/1/2021).

Acara di buka oleh Deputi Pengembangan Marsda TNI Dr. Sungkono, S.E., M.Si. dan dihadiri oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Setjen Wantannas melalui aplikasi *zoom meeting*.

Dalam sambutannya, Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik Syarif Hidayat, S.H menyampaikan bahwa sistem kerja KPK saat ini mengedepankan aspek pencegahan korupsi sebagai salah satu strategi besar pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Selama ini mungkin bapak/ibu melihat tahun-tahun sebelumnya KPK banyak melakukan operasi tangkap tangan, sebagai informasi bagi bapak ibu KPK sekarang memfokuskan kegiatannya kedalam 3 hal, yaitu pertama dengan penindakan supaya takut untuk korupsi, kedua melakukan pencegahan untuk



tidak terjadi korupsi dan ketiga melakukan pendidikan dan peran serta masyarakat supaya sadar tidak mau korupsi, ucapnya.

Ia pun menegaskan target KPK saat ini adalah mengembalikan kerugian keuangan negara dengan efektif dan efisien.

Selanjutnya, *Group head* Pengendalian Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Sugiarto menyampaikan tentang dasar hukum dan hal-hal teknis terkait gratifikasi, hingga tata cara pelaporannya. Dalam pemaparannya, Ia menjelaskan bahwa subjek yang terkena gratifikasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang disebut sebagai Penyelenggara Pemerintah, baik itu TNI/POLRI, BUMD serta Penyelenggara Pemerintah lainnya.

"Gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan yakni diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon atau rabat, voucher, point, reward dan yang berlaku secara umum di luar kedinasan, selain itu apapun yang diperoleh berkaitan dengan pelayanan, pemberian, tupoksi atau kedinasan disebut gratifikasi," ujar Sugiarto.

Sugiarto juga menegaskan bahwa tidak semua tindakan gratifikasi bisa dipidanakan, hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam pasal yang disebutkan yakni pasal 12B UU ayat (1) Pemberantasan tindak pidana korupsi saja yang bertentangan dengan hukum.

Gratifikasi dibagi menjadi dua yakni Gratifikasi ilegal dan non legal dianggap suap atau ilegal yang berhubungan dengan jabatan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya sementara itu gratifikasi non legal hadiah yang diberikan diluar kedinasan dan tidak ada unsur jabatan.

Dalam sosialisasi ini KPK mengingatkan bahwa gratifikasi yang diberikan kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri merupakan akar dari tindak pidana korupsi. "Karenanya, hal ini harus menjadi kesadaran bagi para penyelenggara negara yang akan menerima sesuatu, maupun bagi pihak swasta yang ingin memberikan sesuatu kepada penyelenggara negara," tegas Sugiarto.

Selanjutnya, Sugiarto menjelaskan tentang benturan kepentingan yang didefinisikan sebagai "suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas".



Untuk diketahui, dalam mencegah terjadinya benturan kepentingan di lingkungan Setjen Wantannas, maka telah diterbitkan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Melalui peraturan ini diharapkan dapat menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat memahami, mencegah, dan menangani benturan kepentingan yaitu situasi dimana pegawai memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas, profesionalitas, dan kualitas keputusan atau tindakan.

Untuk melaporkan konflik kepentingan dan dugaan pelanggaran lainnya, telah disediakan saluran/media dalam bentuk pengaduan masyarakat dan WBS. Saluran tersebut dapat digunakan pihak internal maupun eksternal.***(np)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>



SETJEN WANTANNAS TARGETKAN PENGEMBANGAN GRAND DESIGN SISTEM INFORMASI TAHUN 2021

Jakarta, 26/01/21



Pengelolaan system informasi di Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) merupakan salah satu fungsi pemerintah dalam rangka menyajikan informasi terkait keamanan nasional kepada pengambil

kebijakan nasional tertinggi di Indonesia yakni Presiden Republik Indonesia (RI). Pengelolaan Info Kamnas merupakan implementasi dari amanah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang dikeluarkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Untuk itu, pimpinan Setjen Wantannas mengadakan rapat Bersama vendor Maxima untuk membahas pengembangan Grand design sisfokamnas, bertempat di Situation Room, Kantor Setjen Wantannas, Selasa (26/01).

Dalam sambutannya, Sesjen Wantannas Laksdya TNI Dr. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., menyampaikan bahwa dalam proses reformasi menjadi Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas) membutuhkan grand design sistem informasi 4.0 untuk mendukung fungsi dan tugas Wankamnas.

Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal Brigjen TNI Drs. Haris Sarjana, M.M.,M.Tr.(Han) menyampaikan sistem informasi Setjen Wantannas masa depan diharapkan memiliki kemampuan untuk mengelola data primer, data sekunder terverifikasi dan data sekunder yang kemudian diolah sebagai landasan pembuatan rekomendasi kepada Presiden RI.



Brigjen TNI Drs. Haris Sarjana, M.M.,M.Tr.(Han) memaparkan *roadmap* pengembangan Sistem Informasi Setjen Wantannas tahun 2020 hingga 2024. *Roadmap* tersebut dilaksanakan dengan fokus pada 4 (empat) aspek penting yaitu sistem, teknologi, sumberdaya manusia, keamanan informasi dan terkait manajemennya.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi sisfokamnas adalah terkait masalah mengumpulkan data primer dan data sekunder dalam data base, bagaimana menyajikan data base sesuai klasifikasi dan melaksanakan interoperability data dengan kementerian/Lembaga lainnya.

Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Setjen Wantannas dan hasil yang diharapkan dari *Grand Design* Sistem Informasi tahun 2020-2024 dapat dilaksanakan secepatnya untuk mendukung fungsi dan tugas Wankamnas. ***(np)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>





RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN DPR RI MEMBAHAS EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA DAN REALISASI T.A 2020

Jakarta, 27/01/21



Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wanannas) Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, S.H., M.H., di damping para Deputi Setjen Wantannas mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (27/1/2021).

Sesjen Wantannas menyampaikan paparan terkait Evaluasi Pencapaian Kinerja dan Realisasi Anggaran T.A. 2020, Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan APBN Tahun 2021, serta isu-isu Aktual Wantannas, sesuai dengan surat undangan dari Sekjen DPR RI Nomor PW/01008/DPR RI/I/2021 tanggal 22 Januari 2021.

Dalam paparannya, Sesjen menyampaikan bahwa dalam pencapaian output kinerja tahun 2020, Setjen Wantannas telah melaksanakan kajian siklis sebanyak 3 naskah dan terealisasi 3 naskah, kajian dinamis sebanyak 27 naskah terealisasi 27 naskah, kajian kirpat sebanyak 44 naskah terealisasi 48 naskah dan kajian bela negara sebanyak 1 aksi terealisasi 100%, oleh karena itu jumlah output yang dicapai sebanyak 78 naskah dan 1 aksi. Pada



Rapat Koordinasi Nasional Keuangan tanggal 22 September 2020, Setjen Wantannas mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan atas predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 10 kali berturut-turut dari tahun 2009 sampai dengan 2019.



Dalam paparannya, Sesjen Wantannas Dr. Ir. Harjo Susmoro juga menyampaikan urgensi pembentukan Dewan Keamanan Nasional bagi Indonesia merupakan hal yang sangat mendesak mengingat perkembangan lingkungan strategis yang semakin kompleks dan dinamis dimana ancaman nasional terhadap keamanan nasional juga semakin kompleks, tidak lagi dapat diselesaikan secara parsial oleh kelembagaan tertentu saja, namun harus dihadapi dan diselesaikan secara komprehensif, holistik dan integral. Demikian juga dimensi keamanan bukan lagi hanya terkait dengan perlindungan terhadap negara dalam konteks kedaulatan saja namun sudah berkembang pada aspek keamanan manusia, Keamanan dan ketertiban Masyarakat, Keamanan dalam negeri dan Pertahanan itu sendiri.

Dalam kesempatan yang sama, turut hadir Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI) Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo Bersama jajarannya. RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komis I Drs. Utut Adianto dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan dihadiri anggota dewan secara fisik dan virtual melalui aplikasi zoom.

Pimpinan Setjen Wantannas yang turut mendampingi antara lain, Deputy Bidang Politik dan Strategi Irjen Pol Drs. Sukma Edi Mulyono, M.H., Deputy Bidang Pengembangan Marsda TNI Dr. Sungkono, S.E., M.Si., Deputy Bidang Pengkajian dan Penginderaan Laksda TNI Dr. Dani Achdani, S.Sos., S.E., M.AP., Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan Marsma TNI Adm Shopian, serta Kepala Biro Umum Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah, S.E.***(np)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>



SESJEN WANTANNAS : ROTASI DAN MUTASI MERUPAKAN HAL BIASA DALAM SETIAP ORGANISASI

Jakarta, 05/02/21



Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, SH, MH melantik dan mengambil Sumpah Jabatan terhadap 4 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 2 orang Pejabat Administrator dan 1 orang Pejabat Pengawas di lingkungan Setjen Wantannas. Pelantikan berlangsung di ruang serbaguna 5107 Lantai 5 Gedung A Kantor Setjen Wantannas, Jumat (5/2/2021).

Adapun formasi-formasi jabatan yang diisi dan disesuaikan dalam pelantikan tersebut sebagai berikut :

1. Analis Kebijakan Bidang Rencana Kontinjensi Ekonomi Kedeputian Politik dan Strategi;
2. Analis Kebijakan Bidang Rencana Kontinjensi Politik dan Keamanan Kedeputian Politik dan Strategi;
3. Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Mobilisasi dan Demobilisasi Kedeputian Pengembangan;



4. Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kedeputian Pengembangan;
5. Analis Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan dan Sarana Prasarana Kedeputian Sistem Nasional;
6. Kepala Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa Biro Umum;
7. Kepala Sub Bagian Protokol dan TU Pimpinan Biro Umum.

Dalam sambutannya, Sesjen Wantannas mengatakan bahwa rotasi dan mutasi merupakan hal biasa dalam setiap organisasi. Pelaksanaan mutasi dan rotasi ini telah melalui tahapan dan penilaian kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagi yang mendapat promosi agar terus meng*update* diri untuk *performance* kinerja yang lebih baik.

Sesjen Wantannas menaruh harapan besar kepada para pejabat yang baru saja dilantik untuk bisa melakukan pengabdian yang terbaik serta membantu terwujudnya pembentukan Dewan Keamanan Nasional melalui tugas dan fungsi jabatan masing-masing.***(np)



Source : <https://www.wantannas.go.id/>



PATI TNI SETJEN WANTANNAS HADIR SECARA VIRTUAL DALAM RAPIM TNI 2021

Jakarta, 16/02/21



Pati TNI khususnya Jenderal bintang tiga dan bintang dua di lingkungan Setjen Wantannas turut hadir dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun. Namun, di 2021 ini, pelaksanaan Rapim berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan situasi di tengah pandemi Covid-19 yang masih terus melanda di Indonesia bahkan dunia.

Rapim TNI kali ini dipimpin oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan disaksikan secara virtual oleh tiga orang Pati TNI Setjen Wantannas yaitu Deputy Bidang Pengembangan Marsda TNI Dr. Sungkono, S.E., M.Si, Deputy Bidang Sistem Nasional Mayjen TNI Made Datrawan, S.IP, serta Deputy Bidang Pengkajian dan Penginderaan Laksda TNI Dr. Dani Achdani, S.Sos., S.E., M.AP, Selasa (16/02/2021).

Ketiga orang Pati Setjen Wantannas menyaksikan Rapim TNI melalui aplikasi zoom di Ruang Situation Room Lantai 5 Gedung B, Kantor Setjen Wantannas. Sedangkan Sesjen Wantannas Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, SH, MH menghadiri langsung Rapim TNI dari Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.



Rapim TNI 2021 bertemakan TNI Kuat, Solid, Profesional, Dicintai Rakyat, Siap Mendukung Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi serta Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Demi Keutuhan NKRI.

Selain menerima pembekalan dari Presiden Joko Widodo, peserta Rapim TNI juga mendapat arahan dari Panglima TNI dan para Pemateri baik dari Kementerian atau Instansi terkait di antaranya Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Ketua Komnas HAM, dan Sesmen BUMN mewakili Menteri BUMN.

Presiden dalam arahannya menyampaikan, TNI harus selalu menjadi garda terdepan saat negara mengalami bencana atau krisis. Selain itu, Jokowi juga menekankan untuk menjaga sinergi TNI dan Polri sebagai penjaga negara dan bangsa. TNI diharapkan bisa membantu mendisiplinkan 3M dan penegakan PPKM skala mikro dan juga mensukseskan program vaksinasi masal dalam rangka pembentukan *Herd Immunity*.

Lebih lanjut, Presiden mengapresiasi atas kerja keras dan dharma bhakti TNI untuk mengatasi permasalahan negara. Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanggulangan Pandemi Covid-19 juga amat membutuhkan partisipasi aktif TNI. Presiden berharap agar tugas TNI terfokus pada penegakan dan pendisiplinan masyarakat serta menyukseskan program vaksinasi nasional.

Sementara itu, Panglima TNI menyampaikan bahwa Sinergi TNI-Polri amat penting dan merupakan modal dasar dalam mengatasi masalah bangsa (bencana alam, penegakan disiplin mematuhi protokol Covid-19, dan lain-lain).***(np)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>



SOFT ENTRY MEETING SEBAGAI AWAL DARI PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN

Jakarta, 16/02/21



Dalam rangka menghadapi pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2020, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) mengadakan *Soft Entry Meeting* bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Ruang Rapat NKRI, Lantai 5 Gedung A Setjen Wantannas, Selasa (16/02/2021).

Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal (Karo PSP), Brigjen TNI Drs. Haris Sarjana, M.M, M.Tr. (Han) dalam sambutannya mengatakan bahwa Setjen Wantannas siap mendukung kelancaran proses pemeriksaan oleh BPK.

Karo PSP berpesan kepada seluruh jajaran di Setjen Wantannas agar senantiasa mendukung kelancaran proses pemeriksaan oleh BPK.

“Apabila ada hal-hal yang tidak dipahami dengan baik, segera lakukan komunikasi dengan tim BPK,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab BPK Auditor Hendra Gunawan, S.E., M.Si, Ak., CA., ACPA dalam pengarahannya mengatakan bahwa sudah menjadi tugas dan wewenang BPK sebagaimana diamanatkan kepada BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk seluruh pemangku kepentingan, seperti apa yang sudah menjadi visi BPK yaitu Menjadi



Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.

Hendra menambahkan ruang lingkup dari pemeriksaan BPK pada tahun 2020 tidak akan terbatas pada laporan keuangan, realisasi anggaran, catatan atas laporan keuangan, dan laporan operasional selama tahun 2020 saja, tetapi juga meliputi realisasi *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran serta alokasi tambahan anggaran Setjen Wantannas dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Dalam pengarahannya Hendra menegaskan pentingnya komunikasi pemeriksaan.

“Komunikasi setiap tahapan pemeriksaan merupakan hal penting. Hal ini harus diperhatikan agar pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan lancar.”

Acara *Soft Entry Meeting* ditutup dengan penyerahan Surat Tugas tim pemeriksa laporan keuangan BPK kepada Karo PSP.***(np)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>



JAMPIM BAHAS REVITALISASI WANTANNAS MENJADI LEMBAGA NASIONAL TERPERCAYA

Jakarta, 01/03/21



Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Laksya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, SH, MH, memimpin langsung Jam Pimpinan (Jampim) yang bertempat di *Situation Room* Lantai 5 Gedung B, Kantor Setjen Wantannas, Senin (1/3/2021). Jampim diikuti oleh seluruh personel secara virtual dan tatap muka terbatas.

Tema Jampim sendiri adalah Bagaimana Membuat Wantannas Menjadi Lembaga Nasional Terpercaya, yang disampaikan sekaligus untuk mensosialisasi revitalisasi Wantannas menjadi Wankamnas. Dari tema tersebut, sebagaimana dikatakan Sesjen Wantannas, salah satu cara agar Wantannas ini menjadi Lembaga Nasional yang dipercaya salah satu indikatornya adalah kinerjanya.

“Sekarang ini kita sedang menghadapi tantangan *Society 5.0*. Oleh sebab itu, diperlukan Lembaga Keamanan Nasional yang sebenarnya sudah ada namun mengalami degradasi tugas dan fungsinya. Dalam hal inilah diperlukan



revitalisasi dari Wantannas menjadi Wankamnas, karena negara kita sangat membutuhkan kehadiran Wankamnas,” ujar Sesjen.

Sesjen Wantannas dalam arahnya mengharapkan para personel, terkhusus para Pembantu Deputi dan Analis Kebijakan dapat berkontribusi mengsosialisasi tugas dan fungsi Setjen Wantannas melalui publikasi jurnal yang merupakan hasil kajian yang pernah dibuat oleh Setjen Wantannas.

Sesjen Wantannas juga mengingatkan kepada seluruh Kedepuitan yang ada di lingkungan Setjen Wantannas untuk benar-benar mempersiapkan kegiatan Pra Sidang Dewan yang akan diselenggarakan di pada semester I Tahun Anggaran 2021 ini. ***(np)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>





SESJEN WANTANNAS LANTIK SEJUMLAH PEJABAT ESELON II



Jakarta, 03/03/21

Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, S.H, M.H., kembali melantik dan mengambil Sumpah Jabatan terhadap 4 orang personel untuk menjabat sebagai Pejabat Eselon II di lingkungan Setjen Wantannas, Rabu (3/3/2021).

Dalam sambutannya yang disampaikan melalui zoom, Sesjen Wantannas menegaskan bahwa mutasi dan promosi merupakan suatu hal yang lumrah terjadi pada organisasi. Dikatakan pula bahwa proses mutasi dan promosi telah mengikuti aturan yang berlaku. Sesjen juga mengangkat kepada para pejabat yang baru saja dilantik untuk segera bersinergi dan berkolaborasi khususnya dalam proses revitalisasi Wantannas menjadi Wankamnas.

Pejabat yang dilantik dan diambil Sumpah Jabatannya adalah Laksma TNI Supendi, S.T., sebagai Kepala Biro Umum, Kombes Pol Drs. I Nyoman Labha Suradnya, M.M., sebagai Pembantu Deputy Urusan Ekonomi Kedepuitan Pengembangan, Brigjen TNI Marjani, S.I.P., sebagai Pembantu Deputy Urusan Infolakta Kedepuitan Sistem Nasional serta Kolonel Inf Didik Sugiantoro sebagai Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Pendidikan Kedepuitan Pengembangan.***(np)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>



SETJEN WANTANNAS LAKSANAKAN VAKSINASI COVID-19 UNTUK SELURUH PEJABAT DAN PEGAWAI

Jakarta, 26/03/21



Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI menyelenggarakan Vaksinasi Covid-19 bagi Pejabat dan Pegawai di lingkungan Setjen Wantannas, pada Jumat (26/03/2021).

Vaksinasi ini merupakan bagian dari Tahap Kedua Vaksinasi Covid-19 untuk Petugas Pelayanan Publik dengan target Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pelaksanaan vaksinasi untuk penyuntikan dosis pertama CoronaVac bagi pegawai Setjen Wantannas ini melibatkan beberapa vaksinator yang berasal dari Puskesmas Gambir serta Klinik Badan Litbangkes, BMKG dan Lemhanas.

Vaksinasi yang dimulai pukul 08.00 WIB di Gedung A Lantai 5 Kantor Setjen Wantannas ini berjalan dengan lancar. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, prosedur pelaksanaan vaksinasi dilaksanakan oleh pegawai Setjen Wantannas mulai dari registrasi, mengisi jawaban wawancara, pengecekan kesehatan (tensi, suhu tubuh, cek gula darah), pelaksanaan vaksinasi, observasi



setelah di vaksin selama 30 menit, selanjutnya diarahkan untuk scan QR Code sebagai tanda selesai observasi dan yang terakhir cetak sertifikat vaksinasi.

Pemberian dosis kedua vaksinasi Covid-19 untuk 175 pegawai Setjen Wantannas rencana akan dilaksanakan setelah 14 hari terhitung sejak vaksinasi dosis pertama diberikan.***(np)



Source : <https://www.wantannas.go.id/>



SETJEN WANTANNAS SOSIALISASIKAN MANAJEMEN RISIKO DI SEKTOR PUBLIK

Jakarta, 20/05/21



Penerapan manajemen risiko di sektor publik diharapkan akan mampu mengendalikan risiko organisasi sektor publik sehingga perannya dapat berjalan maksimal. Lebih dari itu, melalui manajemen risiko, sektor publik diharapkan mampu mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.

Terkait hal tersebut, Unit Pengawasan Internal Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal Setjen Wantannas bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengadakan Sosialisasi Penyelenggaraan Manajemen Risiko Sektor Publik, Kamis (20/5/2021).

Bertempat di Ruang Rapat NKRI, Dr. Farid Handoko, Ak., MComm., Widyaiswara Madya, Pusdiklatwas BPKP menyampaikan bahwa Manajemen Risiko dapat meningkatkan kemungkinan tercapainya sasaran organisasi, memperbaiki pengendalian (pengendalian dalam peralatan kantor) dan meminimalkan kerugian (karena mengetahui dampak).

Pada RPJMN 2020-2024, ditargetkan pencapaian Level 3 dalam penyelenggaraan manajemen risiko. Instansi dapat mengadopsi Impelementasi Manajemen Risiko



Sektor Publik yang dikeluarkan oleh BSN karena sudah dengan standar ISO 31.000 tahun 2018.

Dr. Farid Handoko, Ak., MComm mengungkapkan bahwa salah satu kendala pencapaian maturitas SPIP ini adalah belum dibuatnya manajemen risiko.

“Salah satu kendala pencapaian maturitas SPIP ini adalah belum dibuatnya identifikasi risiko dan analisisnya sebagai salah satu komponen penilaian maturitas SPIP,” ucapnya.

Unsur-unsur SPIP meliputi Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi serta Pemantauan pengendalian intern. Masing-masing unsur tersebut pastinya sudah memiliki manfaat untuk memastikan atau membantu organisasi dalam menjalankan tugasnya serta mencapai tujuan organisasi tersebut.

Melihat pentingnya peran SPIP dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka pimpinan organisasi harus dapat menjadikan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya pada unit kerja terkecil saja, tapi hingga kepada masing-masing individu.

Diharapkan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan mampu mendukung upaya organisasi untuk dapat mencapai tujuannya tersebut. Kegiatan sosialisasi di lingkungan Setjen Wantannas diikuti oleh semua perwakilan unit kerja.***(np)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>



BIRO PSP SETJEN WANTANNAS SELENGGARAKAN TRAINING BUDAYA PELAYANAN PRIMA

Jakarta, 24/05/21



Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal (Biro PSP) Setjen Wantannas mengadakan *Training* Budaya Pelayanan Prima secara tatap muka, Senin, (24/05/2021).

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Biro PSP Brigjen TNI Drs. Haris Sarjana, M.M., M.Tr (Han). Dalam sambutannya, Kepala Biro PSP berharap seluruh unit kerja di lingkungan Setjen Wantannas khususnya Biro PSP, bisa memberikan pelayanan prima atau *service excellence* kepada masyarakat dan seluruh jajaran yang memiliki keterlibatan dengan organisasi Setjen Wantannas.

Widyaiswara Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Dra. Puji Hastuti, M.Pd mengajak seluruh peserta untuk meniatkan atau bertekad bahwa dalam melayani orang lain, harus selalu memberikan pelayanan yang tulus sebagai aparatur negara.

Ditegaskan oleh Puji Hastuti, aparatur negara merupakan ujung tombak atau kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tidak hanya itu, sebagai personil yang berperan dalam melayani publik, dibutuhkan SDM aparatur yang memiliki kompetensi berkualitas.



“Penyelenggara negara diharapkan dapat memahami kebutuhan dan harapan pelanggan. Dapat dikatakan sebagai layanan prima jika kita dapat melampaui kebutuhan dan harapan pelanggan,” ujar Puji Hastuti dalam paparannya.

Puji Hastuti juga memberikan pembekalan tentang bagaimana sebuah lembaga pemerintah agar bisa memberikan pelayanan publik yang prima berdasarkan standar serta berkualitas.

Training Budaya Pelayanan Prima diikuti seluruh personel Persidangan dan Humas serta perwakilan seluruh unit kerja di lingkungan Setjen Wantannas.***(na)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>





SETJEN WANTANNAS PERINGATI HARI LAHIR PANCASILA

Jakarta, 01/06/21



Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, S.H., M.H. mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan secara virtual oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Selasa (01/06/2021).

Bertempat di Lantai 5 Kantor Setjen Wantannas Jalan Medan Merdeka Barat No.15 Jakarta Pusat, upacara turut dihadiri oleh para Deputi, Staf Ahli, dan seluruh Pejabat Eselon II. Sementara, Pejabat dan pegawai lainnya mengikuti jalannya upacara secara virtual.

Peringatan Hari Lahir Pancasila dimulai pada pukul 07.40 di halaman Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menjadi Inspektur Upacara dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Melalui *daring* dan *youtube channel*, terlihat Wakil Presiden Ma'ruf Amin, mantan Presiden kelima RI yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan



Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekrnoputri, juga para menteri kabinet Indonesia Maju mengikuti upacara secara daring.

Beberapa Pejabat Tinggi Negara menjadi petugas upacara diantaranya Ketua MPR RI Bambang Soesatyo sebagai pembaca teks Pancasila, Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai pembaca teks UUD 1945 serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebagai pembaca do'a.

Sebagaimana diketahui, 1 Juni resmi ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila melalui Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2016. Keputusan ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo melalui pidato di Gedung Merdeka, Bandung pada 1 Juni 2016 silam.***(yr)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>





PELATIHAN JURNALIS, SEBUAH UPAYA LITERASI UNTUK HUMAS WANTANNAS RI

Jakarta, 12/08/21



Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal (Biro PSP) bekerja sama dengan Unit Kepegawaian Wantannas RI menyelenggarakan Pelatihan Jurnalis, Kamis (12/8/2021). Pelatihan dibuka oleh Kepala Biro PSP Brigjen TNI Drs. Haris Sarjana, M.M, M.Tr (Han) dan diikuti oleh seluruh personel Humas Setjen Wantannas.

Pelatihan dibuka oleh Kepala Biro PSP yang menyampaikan pentingnya kegiatan ini dilaksanakan agar semakin terampilnya SDM di lingkungan Setjen Wantannas khususnya Humas sehingga mampu menghadapi dan bersaing di era globalisasi seperti sekarang ini. Kepala Biro PSP menaruh harapan kepada peserta yang hadir, dengan diselenggarakannya kegiatan ini akan memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan yang sarat manfaat.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Syarifah Amelia, S.Sos, M.Si selaku pengajar pada pelatihan tersebut mengatakan bahwa ada 4 kemampuan jurnalistik yang dibutuhkan oleh seorang praktisi humas.

“4 kemampuan jurnalistik yang harus dimiliki oleh praktisi humas adalah kemampuan menulis, kemampuan membaca isu yang *up to date* dengan situasi



terkini, kemampuan membangun relasi internal dan eksternal, serta kemampuan untuk bernegosiasi atau bekerjasama”, ujarnya.



Ia juga mengatakan pentingnya seorang humas untuk bisa mengukur nilai dari sebuah berita dan menambah nilai berita itu.

“Semakin tinggi nilai berita sebuah peristiwa, semakin menarik untuk diliput media dan semakin luas diketahui

publik”, tambahnya.

Pelatihan Jurnalistik berjalan dengan penuh antusias dari peserta dan tercipta dialog yang sangat interaktif. Acara ini ditutup oleh Plt. Koordinator Persidangan dan Humas Kolonel Laut (KH) Tantawi Jauhari, S.E., M.M., CTMP dengan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Narasumber dan peserta yang hadir.***(dfn)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>



SERAH TERIMA 5000 PCS BERAS BANTUAN BULOG UNTUK MENYUKSESKAN KEGIATAN VAKSINASI WANTANNAS DI JAWA BARAT

Jakarta, 13/08/21



Dalam mendukung rencana pelaksanaan kegiatan Vaksinasi dan pembagian Sembako di kota Bandung yang akan dilaksanakan pada Minggu ke-3 Bulan Agustus 2021, Dewan Ketahanan Nasional mendapat dukungan dari Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog). Bantuan berupa 5.000 pcs Beras Fortivit Kemasan 1 kilogram senilai Rp 86.250.000 secara simbolis diserahkan oleh Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhammad Suyamto kepada Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr.(Opsla), bertempat di Ruang Tamu Sesjen Wantannas, Lantai 5 Gedung A Kantor Wantannas, pada Jumat (13/08/2021).

Kemudian acara dilanjutkan dengan penandatanganan serah terima yang diwakilkan oleh Kepala Biro Umum selaku Kepala Bidang I Laksma TNI Supendi, S.T dengan Kepala Bagian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Andes Masyri Hidayat disaksikan bersama para panitia Vaksinasi Wantannasi.



Staf Ahli Pertahanan Keamanan Laksda TNI Denih Hendrata, S.E., M.M., CHRMP selaku Ketua Vaksinasi dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan vaksinasi di Jawa Barat yang akan dipusatkan di kota Bandung menargetkan 10.000 vaksin untuk masyarakat. Bantuan dari Bulog akan langsung disalurkan kepada masyarakat yang akan menjalani vaksinasi dan diharapkan bantuan beras ini dapat membantu meringankan beban masyarakat.***(np)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>





SESJEN WANTANNAS PIMPIN PELATIHAN MENYUSUN JURNAL

Jakarta, 18/08/21



Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengadakan Pelatihan Membuat Jurnal yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan



Nasional (Sesjen Wantannas) Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, SH, MH, M.Tr (Opsla), Rabu (18/08/2021).

Acara yang berlangsung di Ruang Situation Room Lantai 5B, menghadirkan pakar tetap Wantannas yang merupakan Wisesa Utama Bela Negara Haryo B. Rahmadi, SE, M.Si (Han) yang saat ini juga sedang menempuh studi Doktorat di Universitas Pendidikan Indonesia.

Sesjen Wantannas dengan didampingi oleh para Deputy dan staf Humas menyampaikan bahwa saat ini Wantannas sedang melakukan perbaikan terhadap produk – produk kajian. “Kajian - kajian yang selama ini kita lakukan harus menjadi kajian yang strategis, sehingga produk yang dihasilkan dari kajian strategis ini nantinya bermuara pada sebuah naskah akademis, di mana semua data – data akan terkumpul dalam satu dokumen yang akan melahirkan kajian *policy paper*”, ujar Sesjen.

Salah satu dokumen tersebut yang sedang kita persiapkan adalah naskah Strategi Keamanan Nasional yang prosesnya saat ini sudah kita publis kepada Kementerian dan Lembaga.



Sementara itu, Haryo B. Rahmadi, SE, M.Si (Han) menjelaskan secara teknis tahapan awal dari penulisan Jurnal yaitu bagaimana melakukan pencarian yang efektif dan efisien di google dengan menggunakan kata kunci tertentu.

Pada akhir pelatihan, topik yang terkait dengan faktor – faktor pendukung sebuah kesuksesan menjadi pembahasan Sesjen Wantannas.

“Kunci sukses adalah pertama kita mau untuk sukses, kedua kita mampu untuk sukses, ketiga ada kesempatan untuk sukses serta yang keempat adalah takdir Tuhan Yang Maha Esa”, terang Sesjen.



“Apabila tidak ada peluang, maka kita buat peluang. Saat ini peluang ada di tangan kita karena kita berbeda dengan lembaga lain. Kita bisa membuat peluang itu dengan cara menunjukkan produk-produk kita tidaklah produk kacamangan atau asal jadi, akan tetapi kita susun dengan nilai dari anggaran yang dipercayakan kepada kita dan kita mampu memberikan yang terbaik”, jelasnya lagi.

Pada sisi lain, Sesjen Wantannas secara gamblang menegaskan bahwa faktor religius masih menjadi prioritas. Hal ini disebabkan karena memang Indonesia mengamalkan dan mempunyai landasan Pancasila, dengan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang mencirikan bahwa abainya kita terhadap masalah agama akan berdampak sangat luar biasa terhadap negeri ini.

Pelatihan Menulis Jurnal diikuti dengan penuh antusias oleh peserta dan tercipta diskusi yang sangat interaktif. Direncanakan pelatihan ini akan dilaksanakan secara simultan dan berkelanjutan.***(dfn)

Source : <https://www.wantannas.go.id/>



DUKUNG GERAKAN VAKSINASI NASIONAL WANTANNAS RI, KIMIA FARMA SALURKAN 1.000 PCS PAKET VITAMIN

Jakarta, 18/08/21



Dalam mendukung rencana pelaksanaan kegiatan Vaksinasi dan pembagian sembako yang akan dilaksanakan pada 23 – 28 Agustus 2021 di kota Bandung yang diinisiasi Dewan Ketahanan Nasional mendapat dukungan dari PT Kimia Farma Tbk. Bantuan berupa 1.000 pcs paket vitamin dan 500 botol handsanitizer secara simbolis diserahkan oleh Manager Umum dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Cherman kepada Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr.(Opsla), bertempat di Ruang Tamu Sesjen Wantannas, Lantai 5 Gedung A Kantor Wantannas, pada Kamis (18/08/2021).

Sesjen Wantannas Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 merupakan ancaman yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara. Karena itu, Wantannas melakukan segala upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19. Salah satunya melalui 'Gerakan Vaksin Nasional'.



"Kami mengucapkan terima kasih kepada PT. Kimia Farma atas bantuannya turut mensukseskan kegiatan Wantannas melalui 'Bulog Peduli'. Semoga (bantuan) ini dapat bermanfaat dan membawa pengaruh dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di negara kita," kata Harjo.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan serah terima yang diwakilkan oleh Kepala Biro Umum selaku Kepala Bidang I Laksma TNI Supendi, S.T dengan Manager Umum dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Kimia Farma, Cherman disaksikan bersama ketua panitia Vaksinasi Wantannas Staf Ahli Pertahanan Keamanan Laksda TNI Denih Hendrata, S.E., M.M., CHRMP didampingi tim dan Spv. Program TJSL Lukman dan staf. **** (np)**



Source : <https://www.wantannas.go.id/>



SESJEN WANTANNAS LANTIK KARO PSP BESERTA LIMA ORANG LAINNYA

Jakarta, 01/11/21



Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, S.H, M.H, M.Tr Opsla melantik dan mengambil Sumpah Jabatan Kolonel Chb. I Gusti Putu Wirejana, S.T., M.M.S.I sebagai Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal (Karo PSP) yang baru menggantikan Brigjen TNI Drs. Haris Sarjana, M.M., M.Tr. (Han) yang diangkat sebagai Pembantu Deputi (Bandep). Selain I Gusti Putu Wirejana, ada pula 3 orang Bandep dan 2 orang Pejabat Fungsional Arsiparis Ahli Muda yang dilantik di hari yang sama, Senin (1/11/2021) bertempat di Ruang Wawasan Nusantara, Lantai 5A, Kantor Setjen Wantannas.

Bertindak sebagai Saksi pada acara tersebut yaitu Sahli Bid. Iptek Dr. Ir. Hendri Firman Windarto, M.Eng.dan Bandep Urs. Lingpemneg Kedeputian Sisnas Brigjen TNI M. Affandi, S.IP., M.M.

Pelantikan apapun itu untuk mutasi atau promosi jabatan, seyogyanya adalah hal lumrah yang kerap terjadi pada sebuah organisasi. Namun, ada sedikit perbedaan pada pelaksanaannya di masa sekarang ini yang harus menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Yang terpenting adalah setelah proses Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan, Pejabat yang bersangkutan harus segera bersinergi dan berkolaborasi yang baik.

Pejabat yang secara bersamaan dilantik adalah Marsma TNI Dr. Afrizal Hendra, S.I.P., M.Si., CHRMP sebagai Bandep Urs. Stranas Kedeputan Polstra, Brigjen TNI Drs. Haris Sarjana, M.M., M.Tr. (Han) sebagai Bandep Urs. Info Lahta Kedeputan Sisnas, dan Kolonel Laut (P) Hadi Susilo, M.Si. sebagai Bandep Urs. Renkon Kedeputan Polstra.

Acara ceremonial Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan dihadiri secara terbatas oleh Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Wantannas *******(dfn)



Source : <https://www.wantannas.go.id/>



SESJEN WANTANNAS LANTIK KABAG DANGMAS BIRO PSP BESERTA ENAM ORANG LAINNYA

Jakarta, 18/11/21



Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, S.H, M.H, M.Tr Opsla melantik dan mengambil Sumpah Jabatan Letnan Kolonel Arh. Abdul Cholik, S.H., M.H sebagai Kepala Bagian Persidangan dan Humas (Kabag Dangmas) yang baru. Selain Abdul Cholik, ada pula 3 orang Pembantu Deputi (Bandep) dan 3 orang Analis Kebijakan (Anjak) yang dilantik di hari yang sama, Kamis (18/11/2021), bertempat di Ruang Wawasan Nusantara, Lantai 5A, Kantor Setjen Wantannas.

Bertindak sebagai Saksi pada acara tersebut yaitu Bandep Urs. Lingpemneg Kedeputusan Sisnas Brigjen TNI M. Affandi, S.IP., M.M dan Bandep Urs. Kumdang Kedeputusan Pengembangan Maulana, S.H, M.H.

Pelantikan apapun itu untuk mutasi atau promosi jabatan, seyogyanya adalah hal lumrah yang kerap terjadi pada sebuah organisasi. Namun, ada sedikit perbedaan pada pelaksanaannya di masa sekarang ini yang harus menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Yang terpenting adalah setelah proses Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan, Pejabat yang bersangkutan harus segera bersinergi dan berkolaborasi yang baik.

Pejabat yang secara bersamaan dilantik adalah Kolonel Czi Drs. A. Jaka Tandang, M.CS., M.A.P sebagai Bandep Urs. Lingal Kedeputan Sisnas, Kolonel Inf Yudha Fitri sebagai Bandep Urs. Sosbud Kedeputan Pengembangan, Kombes Pol H. Nazirwan Adji Wibowo, S.I.K., M.Si sebagai Bandep Urs. Polnas Kedeputan Polstra, Kolonel Sus Drs. H. Ahmad Yani, S.H., M.T sebagai Anjak Bid. Sosbudnas Kedeputan Jiandra, Kolonel Laut (T) Eko Erys Hidayanto, S.T., M.M., CHRM sebagai Anjak Bid. Pullahta Polnas Kedeputan Polstra dan Letnan Kolonel Adm Agus Basuki, S.T., M.M sebagai Anjak Bid. Musjian Polnas Kedeputan Polstra.

Acara ceremonial Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan dihadiri secara terbatas oleh Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Wantannas *(dfn)



Source : <https://www.wantannas.go.id/>

KILAS BALIK

DEWAN KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2020 - 2021

*"Setiap kepentingan harus mengacu kepada cita-cita nasional,
tujuan nasional dan kepentingan nasional."*

Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr. Opsla

Dewan Ketahanan Nasional memiliki tugas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Dalam buku ini terdapat "Kilas Balik" bagaimana Wantannas RI sebagai lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden berusaha untuk mencapai tujuan tersebut dalam mendukung tugas utama lembaga yaitu membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Kegiatan-kegiatan yang terangkum dalam buku ini diantaranya audiensi dengan para petinggi dalam negeri maupun luar negeri, kunjungan kerja ke berbagai daerah di seluruh Indonesia dalam rangka "belanja masalah", rapat kerja terbatas (*Rakertas*), kelompok kerja khusus (*Pokjasus*), rapat perumusan materi (*Ramusmat*) hingga prasidang dewan dilakukan dalam rangka mencari rumusan kebijakan terbaik untuk dijadikan bahan rekomendasi kebijakan kepada Presiden demi Indonesia yang lebih baik.

